



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN (LAKIP)  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan pada waktunya. LKj tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

LKj dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LKj ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LKj ini oleh setiap jajaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, 25 Januari 2025  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut



**dr. Hj. Isna Farida, M.Kes**  
NIP. 19740612 200501 2 001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implimentasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terdiri 5 Esselon III, yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Pelayanan Kesehatan dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Sedangkan Esselon IV sejumlah 3 Jabatan yakni 3 Kepala Sub Bagian.

Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, tentunya sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026, mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian dalam merumuskan isu strategia, menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan juga sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana bidang kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang/stunting pada balita.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dan disandingkan dengan Visi Misi RPJPD yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (3) mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing** yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Dasar Hukum .....	3
D. Cascading Kinerja .....	5
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	9
F. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	17
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran .....	18
H. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya.....	25
I. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	29
A. Tujuan, Sasaran Kabupaten.....	29
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	29
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	32
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	48
B. Akuntabilitas Keuangan .....	132
BAB IV PENUTUP .....	148
A. Kesimpulan .....	148
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	149

LAMPIRAN.....	151
IKU... ..	152
Pohon Kinerja .....	153
Perjanjian Kinerja.....	154
Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV.....	182
Monev Renstra.....	210
Matriks Keselarasan .....	221

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan dan UPT.....	18
Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan .....	19
Tabel 1.3 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2024.....	20
Tabel 1.4 Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT.....	21
Tabel 1.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	23
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama.....	31
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Terhadap Target 2024.....	48
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama.....	51
Tabel 3.3 Tabel Sasaran Strategis.....	70
Tabel 3.4 Tabel Sasaran Strategis.....	88

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2019-2024.....	49
Grafik 3.3 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Laut tahun 2019-2024 .....	52
Grafik 3.4 Penyebab Kematian Ibu tahun 2024 .....	53
Grafik 3.5 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2024.....	55
Grafik 3.6 Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **a) Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

### **b) Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu dalam mendukung Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini disusun berdasarkan arah dan tujuan yang mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 dengan **Visi #Tanah Laut sebagai daerah Industri dan Pelabuhan menuju masyarakat sejahtera didasari Nilai – Nilai Agama#**

Telaahan Visi Misi RPJPD yaitu: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan **Misi (3) mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing** yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Di dalam RPJP memberikan arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan yaitu Pelayanan kesehatan selain tetap fokus pada pelayanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas maupun posyandu juga kedepan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang ada di Pelaihari. Peningkatan kualitas ini guna merespon perkembangan jenis penyakit degeneratif utama maupun konsekuensi dari adanya kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk menghasilkan tenaga penyedia tenaga madya kesehatan yang dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit. Sejalan dengan itu untuk menyeimbangkan kemajuan IPTEKS di bidang kesehatan, maka pembangunan pendidikan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pendidikan kesehatan.

Arah dari pembangunan gizi adalah berupaya untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang. Pembangunan gizi juga diarahkan untuk mewujudkan keasadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh serta peningkatan pengetahuan akan gizi.

Dari arahan RPJP menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sektor kesehatan antara lain yaitu untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara seimbang, Selanjutnya diarahkan untuk mewujudkan kesadaran akan perlunya gizi yang seimbang bagi kesehatan tubuh, serta peningkatan pengetahuan tentang gizi, meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan optimalisasi peran puskesmas; puskesmas pembantu dan posyandu terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, dan meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan dasar yang prima. Dimana

rumah sakit di Pelaihari sebagai rumah sakit rujukan di kabupaten Tanah Laut dapat memastikan arah penajaman kualitas dan fokus pelayanan yang akan diberikannya dan ditunjang dengan penyediaan tenaga dokter spesialis dan peralatan yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024– 2026, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **C. Dasar Hukum**

Dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
12. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/866-KUM/2023 tentang Penetapan Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.



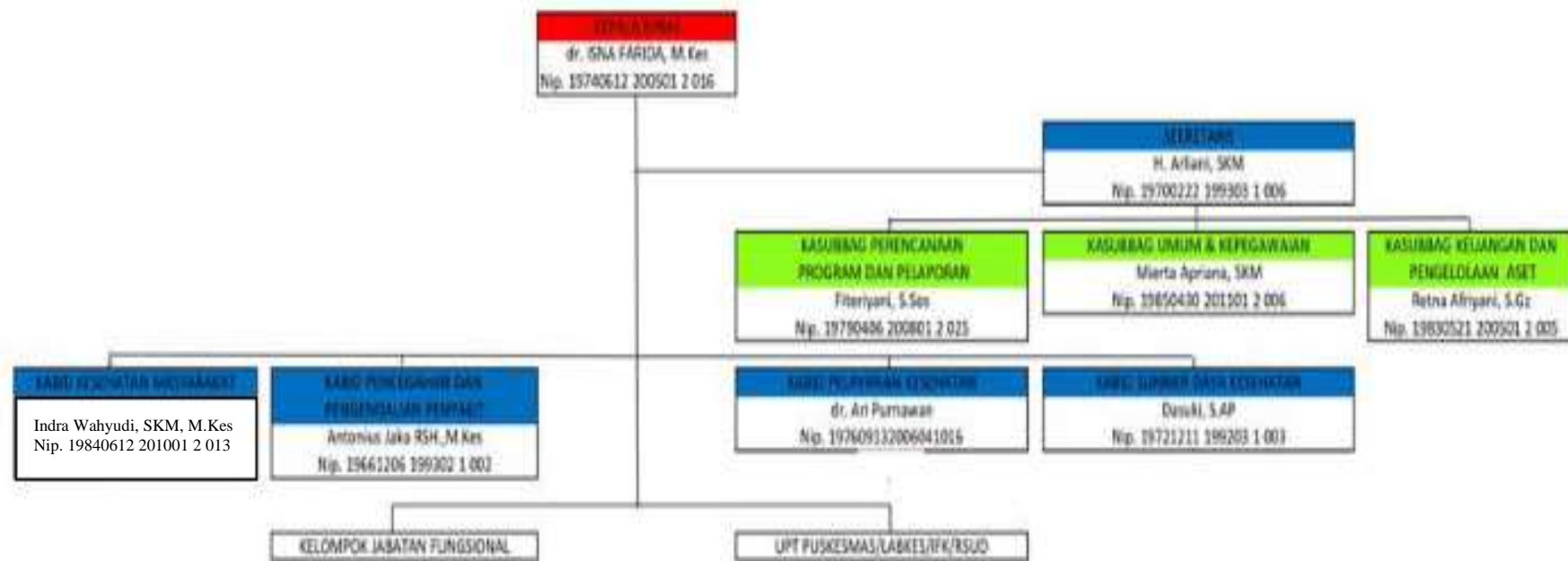






## E. Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dapat di lihat pada bagan beserta uraian tugas sebagai berikut :



**Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:**

- a. Dinas Kesehatan
- b. Sekretariat, terdiri dari
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- g. UPT Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**Tugas dan Fungsi :****Kepala Dinas**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
- d. pelaksanaan administrasi dinas
- e. pembinaan UPT Dinas dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat**

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan Mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan dinas kesehatan

- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja dinas kesehatan
- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang.
- g. Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas kesehatan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Sekretariat membawahi dari :**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset  
Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan Pengelolaan Aset.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

### **Bidang Kesehatan Masyarakat**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan masyarakat dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kesehatan Masyarakat
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dengan Mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Pelayanan Kesehatan**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan Kesehatan dengan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya Kesehatan dengan Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja bidang sumber daya kesehatan
- b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (pkrt) serta sumber daya manusia kesehatan
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

### **UPT Dinas**

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- 4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Tata Kerja**

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- 5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka, pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- 6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- 7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

### **Kepegawaian**

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

### **Jabatan**

- 1) Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- 2) Sekretaris Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- 3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- 4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## **F. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Terdapat 4 (empat) isu strategis dalam pembangunan kesehatan di tahun 2024 yaitu:

- 1) Penurunan Angka kematian ibu
- 2) Penurunan Angka kematian Bayi;
- 3) Penurunan Prevelansi stunting;
- 4) Angka Kesakitan

## G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut beserta Upt memiliki pegawai sebanyak 1.013 orang yang terdiri dari; Kepala Dinas (Pimpinan Tinggi Pratama) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Pejabat Administrator) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Pejabat Administrator) sebanyak 10 orang, Kepala Sub Bagian (Pejabat Pangawas) sebanyak 19 orang dan, staf fungsional sebanyak 982 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Dinas Kesehatan dan UPT**

No	Uraian	Eselon	Eselon	Eselon	Eselon	Staf	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			10			10
4	Kepala Sub Bagian				19		19
5	Pelaksana					76	76
6	Jabatan Fungsional Tertentu					906	906
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>982</b>	<b>1.013</b>

Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap 18 esehatan 18 yang ditamatkan oleh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dikelompokkan berdasarkan jenjang 18 esehatan 18 . Hasil pemetaaan 18 esehatan 18 pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat di tabel 1.2.

**Tabel 1.2****Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1								1
2	Sekretaris			1							1
3	Kepala Bidang		6	4							10
4	Kepala Sub Bagian		8	11							19
5	Staf		125	276	568	1	1	20		2	991
	<b>JUMLAH</b>		<b>140</b>	<b>292</b>	<b>568</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>		<b>2</b>	<b>1022</b>

Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 133 orang memiliki Pendidikan S2, 287 orang memiliki Pendidikan S1/D4, 568 orang memiliki Pendidikan D3, 1 orang memiliki Pendidikan D2, 2 orang memiliki Pendidikan D1, 20 orang memiliki Pendidikan SLTA dan 2 orang memiliki Pendidikan SD dengan jumlah 1.013 orang di Dinas Kesehatan.

Terkait dengan LKj, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta Pendidikan dari sumber daya yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM, peningkatan Pendidikan, atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

a. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan adalah sebagai berikut

**Tabel 1. 3**

**Jumlah pegawai Dinas Kesehatan menurut golongan Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Golongan							Jumlah
		IV	III	II	I	X	IX	VII	
1	Kepala Dinas	1							1
2	Sekretariat	1	12	6					19
3	Bidang Pelayanan Kesehatan	5	4						9
4	Bidang P2P	3	8	1					12
5	Bidang Kesehatan Masyarakat	3	7	1					11
6	Bidang Sumber Daya Kesehatan	3	6	1					10
7	UPT. RSUD H. Boedjasin	41	170	39	1	10		12	273
8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	1	28	28		6	1	4	68
9	UPT Labkes		7	1			1	2	11
10	UPT IFK	1	11						12
11	UPT Puskesmas Pelaihari	4	33	6		1	1	1	46
12	UPT Puskesmas Angsau	3	27	4				1	35
13	UPT Puskesmas S. Riam		17	4				1	22
14	UPT Puskesmas Panyipatan		17	3		1		4	25
15	UPT Puskesmas Batakan		11	5		1		2	19
16	UPT Puskesmas Takisung	1	22	1					24
17	UPT Puskesmas Jorong	2	18	6			1		27
18	UPT Puskesmas Asam- Asam	4	16	7		1			28
19	UPT Puskesmas Kintap	2	22	4				1	29
20	UPT Puskesmas Sei Cuka		14	3				4	21
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah		29	6		1		2	38
22	UPT Puskesmas T. Ulang	2	20	3				1	26

23	UPT Puskesmas Bati-Bati	1	20	3		2		4	30
24	UPT Puskesmas Kait-Kait	1	13	5				1	20
25	UPT Puskesmas Kurau		15	6		2		2	25
26	UPT Puskesmas Padang Luas		9	9		3	1	3	25
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya	1	24	3			1		29
28	UPT Puskesmas T. Habulu		9	8		1		2	20
29	UPT Puskesmas B. Makmur	1	13	8		2		4	28
30	UPT Puskesmas Bentok Kampung	1	16	2			3	3	25
31	UPT Puskesmas Durian Bungkok		13	2		2	2	4	23
32	UPT Puskesmas Panggung	1	17	4					22

**b. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan menurut tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut**

**Tabel 1.4**

**Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT**

No	Unit Kerja	Golongan								Jumlah
		S-2	S-1	DIII	DI	DII	SMA	SMP	SD	
1.	Kepala Dinas	1								1
2.	Sekretariat	2	6	7			4			19
3.	Bidang Pelayanan Kesehatan	3	4	2						9
4.	Bidang P2P	5	3	4						12
5.	Bidang Kesehatan Masyarakat	3	5	3						11
6.	Bidang Sumber Daya Kesehatan	3	3	4						10
7	UPT. RSUD H. Boedjasin	58	92	114			7		2	273
8	UPT. RS K.H.Mansyur Kintap	10	19	39						68
9	UPT Labkes		3	6			2			11
10	UPT IFK	1	5	6						12
11	UPT Puskesmas Pelaihari	3	14	28			1			46

12	UPT Puskesmas Angsau	4	10	21						35
13	UPT Puskesmas S. Riam	2	2	18						22
14	UPT Puskesmas Panyipatan	1	7	16	1					25
15	UPT Puskesmas Batakan	2	8	9						19
16	UPT Puskesmas Takisung	1	14	9						24
17	UPT Puskesmas Jorong	2	3	22						27
18	UPT Puskesmas Asam-Asam	4	9	15						28
19	UPT Puskesmas Kintap	1	8	20						29
20	UPT Puskesmas Sei Cuka	1	4	15	1					21
21	UPT Puskesmas Tajau Pecah	4	7	27						38
22	UPT Puskesmas T. Ulang	3	6	17						26
23	UPT Puskesmas Bati-Bati	2	8	18		1	1			30
24	UPT Puskesmas Kait-Kait	1	4	15						20
25	UPT Puskesmas Kurau	2	5	16			2			25
26	UPT Puskesmas Padang Luas	3	3	18			1			25
27	UPT Puskesmas Tirta Jaya	1	7	19			2			29
28	UPT Puskesmas T. Habulu	2	3	15						20
29	UPT Puskesmas B. Makmur	3	5	20						28
30	UPT Puskesmas Bentok Kampung		10	15						25
31	UPT Puskesmas Durian Bungkok	3	5	15						23
32	UPT Puskesmas Panggung	2	5	15						22

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2024, melaksanakan 5 program, 23 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.5**

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024**

No	Program dan Kegiatan		Anggaran
<b>DINKES</b>			<b>459.181.138.752</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>		<b>281.067.015.064</b>
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.111.084
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	122.252.705.962
	III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	29.460.399
	IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	487.337.625
	V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.354.545.987
	VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.591.835.223
	VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.881.858.591
	VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.236.054.181
	IX	Peningkatan Pelayanan BLUD	117.098.106.012
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>164.920.728.523</b>
	I	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	71.185.684.589
	II	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	93.016.002.037
	III	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	489.823.170

	IV	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.218.727
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>11.119.937.469</b>
	I	Pemberian izin praktik tenaga Kesehatan diwilayah Kabupaten/Kota	15.251.890
	II	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.709.978.207
	III	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.394.707.372
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>422.716.688</b>
	I	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	177.154.300
	II	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14.875.000
	III	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	11.700.000
	IV	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	125.790.688
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>1.650.741.008</b>
	I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	336.802.208
	II	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	586.073.800
	III	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	727.865.000

**H. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya**

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status / Progress Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	<b>Perencanaan Kinerja</b> Agar target yang ditetapkan dan perencanaan kinerja lebih realistis dan mempertimbangkan target Nasional sebagai Pembanding	Menyusun pohon kinerja sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, mencantumkan anggaran yang datanya diambil dari Perjanjian Kinerja masing-masing Pengampu Kegiatan	Triwulan II	( 26 sd 30 Juni 2024)	Matriks Pohon Kinerja
2	<b>Pengukuran Kinerja</b> 1) Dalam melakukan pengukuran efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja tidak hanya sebatas perhitungan antar anggaran dan realisasi anggaran tetapi agar dikaitkan dengan pencapaian program 2) Agar data kinerja yang dikumpulkan agar dilengkapi dengan kendala solusi dan rencana aksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana Aksi pertriwulan, agar konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan Dalam rangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>- Membuat Laporan capaian Kinerja dan Keuangan beserta alasan dan Solusi jika tidak terealisasi</li> </ul>	TW I sd TW IV	Bulan Maret, Juni, September dan Desember	Realisasi capkin pertriwulan dari Bidang Pengampu Program

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status / Progress Penyelesaian	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3.	<p><b>Pelaporan Kinerja</b></p> <p>1) Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja</p> <p>2) Agar Laporan Kinerja memuat keberhasilan dan Kegagalan dan upaya mencapai target dan hambatannya</p>	Akan di infokan pada dokumen Laporan Kinerja Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja serta memuat keberhasilan/Kegagalan atau pun hambatannya	Triwulan IV	Desember 2024 – Januari 2025	
4	<p><b>Evaluasi Internal</b></p> <p>1) Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal Tahun 2023 dengan Menyusun rencana aksi tindak lanjut</p> <p>2) Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan Tahun 2024</p>	Menyusun rencana aksi dan menyampaikan laporan Evaluasi per triwulan	TW I sd TW IV	Bulan Maret, Juni, September dan Desember	

## I. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2024 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar hukum

D. Cascading Kinerja

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

H. Tindak Lanjut atas laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPD
2. Eselon II ( Kepala Dinas/Badan)
3. Eselon III ( Sekretaris/Kepala Bagian)
  - 1). Eselon IV ( Kasubbag /Kasubbid ) A.1
  - 2). Eselon IV ( Kasubbag/Kasubbid ) A.2
4. Eselon III

(Kepala Bidang)

5. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023

6. Analisa Keberhasilan/ Kegagalan, Hambatan dan Langkah Antisipasi yang Diambil

#### B. Akuntabilitas

Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

### BAB IV PENUTUP

- a) Kesimpulan
- b) Strategi Peningkatan Kinerja

### BAB IV LAMPIRAN

1. IKU
2. Pohon Kinerja
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
5. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan 2024

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Tujuan, Sasaran Kabupaten**

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis, Tujuan bidang kesehatan yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meningkatkan Angka Harapan Hidup.

#### **B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan**

Tujuan dan Sasaran bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sesuai Rencana Strategis Dinas Kesehatan adalah :

##### **I. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Sasaran**

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu
2. Menurunkan Angka Kematian Bayi
3. Menurunkan Prevelansi Stunting
4. Menurunkan Angka Kesakitan

##### **II. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya telah sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan tahun 2024-2026.

Untuk menggambarkan bahwa penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja Dinas Kesehatan adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Kesehatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel matrik keselarasan pada lampiran.

Tabel matrik keselarasan dibuat untuk memudahkan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam menetapkan kinerja serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, sehingga terdapat keselarasan antara Renstra Dinas Kesehatan dengan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan atau Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan, sehingga perencanaan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selaras dan berkesinambungan.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab / Sumber Data	
1	Menurunkan AKI, AKB, Prevelansi Stunting, dan Angka Kesakitan	1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah lahir hidup dikali 100000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		3	Prevalensi stunting	Balita Stunting dibagi balita terentry di EPPGBM dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		4	Angka Kesakitan Sehat	Jumlah Penduduk yang sakit dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
2	Meningkatnya Kinerja Dinas Kesehatan	5	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Nilai	Sekretaris

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat adalah meliputi pengukuran peningkatan status kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, Prevalensi Gizi stunting, dan angka kesakitan,

dengan kegiatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan pelayanan gizi pada balita, kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, penanggung jawab Bidang Kesehatan Masyarakat serta Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama.

Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2024 maka perjanjian kinerja atau penetapan kinerja dijadikan sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Renstra maupun Indikator Kinerja Utama dan disepakati baik oleh Kepala Dinas, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV terdapat pada lampiran. Perjanjian kinerja tahun tersaji pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan DPA dan setelah PERDA APBD Tahun 2024 ditetapkan. Sehingga terdapat kesesuaian antara matrik perjanjian kinerja secara keseluruhan dengan dokumen perjanjian kinerja seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan disesuaikan dengan target sasaran strategis yang telah disajikan pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan.

### Indikator Utama Eselon 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Bidang Kesmas
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	Bidang Kesmas
3	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Bidang Kesmas
4	Menurunnya Angka Kesakitan	Angka Kesakitan	Bidang Yankes
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Sekretariat

### Indikator Utama Eselon 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1. Nilai Komponen Perencanaan	Sekretariat
		2. Nilai Komponen Pengukuran	
		3. Nilai Komponen Pelaporan	
		4. Nilai Komponen Evaluasi Internal	
		5. Nilai Survey Pelayanan Kesekretariatan	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>		
1	Menurunnya Resiko tinggi Pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Resiko tinggi	Bidang Kesmas
2	Meningkatnya status gizi Masyarakat	Persentase Ibu hamil KEK	
3	Meningkatnya status gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	
4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu hamil	Persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar	
5	Meningkatnya Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Melahirkan di Fasyankes dan ditolong Nakes	
6	Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	
7	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Remaja Putri	Persentase remaja yang minum Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	
8	Meningkatnya kecukupan gizi Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	
9	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan anak di bawah usia 5 tahun	Persentase Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	
10	Meningkatnya perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat	Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>		

1	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi Hipertensi	Bidang P2P
2	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Pervalensi DM	
3	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Succes Rate TB	
4	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan tidak Menular	Persentase penderita Penyakit Menular dan Penyakit Menular yang terlayani sesuai standart	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Meningkatnya Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Persentase SPA (sarana, prasarana dan alat kesehatan) sesuai standar	Bidang SDK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	IKM Layanan kesehatan	Bidang Yankes
2	Meningkatnya Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Puskesmas yang Terakreditasi Paripurna	

#### Indikator Kinerja Eselon 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, dan penelahaan objek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
3	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Tersusunnya pelaporan administrasi keuangan yang kredibel	Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kasubbag Keuangan dan Aset
2	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase capaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	
3	Tercapainya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
4	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
5	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihat pegawai	Persentase capaian administrasi kepegawaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2	Memastikan Pelayanan administrasi umum bermanfaat	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	
3	Memastikan barang milik daerah tersedia	Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	

4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
5	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Terlaksananya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
7	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
8	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
9	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
10	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
11	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
12	Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
13	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

15	Tersedianya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
16	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
17	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
18	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
19	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
20	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
21	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
22	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
23	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	

## D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

NO	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024	
	Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	Angka	70
	Sasaran 1.1 : Menurunnya Angka Kematian Ibu, Menurunnya AKB, Menurunnya Prevalensi Stunting, Menurunnya Angka Kesakitan	1	Angka Kematian Ibu	Angka	170
		2	Angka Kematian Bayi	Angka	8
		3	Prevalensi Stunting	%	14
		4	Angka Kesakitan	Angka	10
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	100
		2	Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Melahirkan di Fasyankes dan ditolong Nakes	%	100
		3	Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100
		4	Persentase remaja yang minum Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	%	100
		5	Persentase Ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	100
		6	Persentase Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	%	100
		7	Persentase penderita Penyakit Menular dan PTM yang terlayani sesuai standart	%	100
		8	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	%	98
		9	Persentase Puskesmas yang terakreditasi paripurna	%	68
		10	Persentase SPA sesuai standar	%	70
		11	Persentase Ibu hamil KEK	%	10
		12	Persentase Ibu Hamil Resiko tinggi	%	20
		13	Persentase Balita Gizi Wasting	%	7
		14	Prevalensi Hipertensi	%	10,37
		15	Prevalensi diabetes melitus	%	1,59
		16	Succes Rate TB	%	90
		17	IKM Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks	90
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan ANC Lengkap	Orang	6851
		2	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	orang	6851
		3	Jumlah Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali	orang	6851
		4	jumlah ibu nifas yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 4 kali	Orang	6851
		5	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan IMD	%	70
		6	Persentase Neonatal yang mendapatkan skrining penyakit jantung bawaan	%	20
		7	Jumlah bayi yang mendapatkan KN lengkap	Orang	5916

		8	Persentase Neonatal yang mendapatkan skrining Hipotiroid Kongenital	%	55
		9	Jumlah remaja Putri yang mendapatkan tablet Fe	Orang	13000
		10	Jumlah remaja putri yang mendapat skrining anemia	Orang	13000
		11	Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	orang	345
		12	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	orang	234462
		13	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	27962
		14	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	4287
		15	Jumlah skrening penyakit menular	Orang	4679
		16	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	orang	364117
		17	Jumlah Puskesmas Yang melaksanakan yankestrad	Puskesmas	3
		18	Persentase pelayanan kesehatan terdampak krisis kesehatan akibat bencana	%	100
		19	Persentase Anak Usia Dibawah lima Tahun yang dipantau Perkembangannya	%	100
		20	Jumlah penanganan sampah medis	kegiatan	1
		21	Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	100
		22	Persentase Usia Lanjut mendapat pelayanan sesuai standar	%	100
		23	Persentase Pelayanan kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	%	100
		24	Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	95
		25	Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lanjutan baduta	%	95
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6851
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	6539
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	Orang	5916
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30045
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Orang	51000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	222761
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	222761

8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	41831
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4	Orang	4175
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Orang	498
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5694
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7926
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi KLB sesuai standar	Dokumen	1
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	11
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	5
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	3
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	650
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12
24	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	2
25	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	18
26	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dokumen	11

27	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1
28	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1
29	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1
30	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	964
31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	24
32	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	80
33	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	4	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	4
34	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1
2	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	<b>Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial</b>	%	<b>95</b>
		2	<b>Persentase Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan bersalin</b>	%	<b>100</b>
		3	<b>Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial</b>	%	<b>95</b>
		4	<b>Jumlah Pengembangan Puskesmas</b>	<b>Unit</b>	<b>2</b>
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Unit	5
2	Pengembangan Puskesmas	1	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	11
3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	343
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	21
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	257
6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / Regional Maintenance Center	Unit	100

	7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	77
	8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Paket	2
	9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan	Paket	22
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>		<b>1</b>	<b>Persentase RME di Fasilitas Kesehatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1
<b>4</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>	<b>Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Puskesmas	22
	2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>1</b>	<b>Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>%</b>	<b>60</b>
<b>5</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>	<b>Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>%</b>	<b>80</b>
	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1
<b>6</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>	<b>Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1
<b>7</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>	<b>Persentase dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi UKBM</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>

	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		1	<b>Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</b>	%	<b>86</b>
8	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		1	<b>Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar</b>	%	<b>100</b>
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	19
	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1
9	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		1	<b>Persentase Nakes yang memiliki STR</b>	%	<b>100</b>
	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	22
10	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		1	Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti peningkatan berkompentensi	%	60
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	60
IV	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		1	<b>Persentasi Tempat Pengolahan Pangan Yang memenuhi syarat sesuai standar</b>	%	<b>62</b>
			2	<b>Persentase apotik, toko obat, optikal yang memiliki izin</b>	%	<b>100</b>
11	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>		1	Persentase Apotik, toko obat dan Optikal yang memiliki izin	%	100
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut	Sarana	44
12	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>		1	<b>Jumlah Sertifikat PIRT</b>	<b>Sertifikat</b>	<b>50</b>

	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	Dokumen	1
13	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>		1	<b>Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	2
14	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>		1	<b>Jumlah Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan Pos Market</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>
	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	72
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah</b>			<b>1</b>	<b>Nilai SAKIP Kabupaten</b>	<b>Nilai</b>	<b>70,01</b>
<b>Sasaran 2.1 : Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan</b>			<b>1</b>	<b>Nilai AKIP Dinas Kesehatan</b>	<b>Nilai</b>	<b>82</b>
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		1	Nilai hasil Evaluasi	Nilai	82
15	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		1	<b>Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4

<b>16</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Presentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1100
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3
<b>17</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>85</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2
	6	Penyediaan Bahan/Material	1	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	200
<b>18</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	2
<b>19</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12

<b>20</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6
<b>21</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>80</b>
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25
<b>22</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3
	3	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	37
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN**

**1. SASARAN RPJMD**

Dalam mencapai sasaran Strategis RPJMD Dinas Kesehatan merupakan Instansi yang memangku Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan yang dapat diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Terhadap Target 2024**

INDIKATOR UTAMA	SATUAN	REALISASI				TAHUN 2024	
		2021	2022	2023	2024	REALISASI	CAPAIAN %
Angka Harapan Hidup	Angka	69,59	69,86	74,46	69,96	74,64	100,68%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>							<b>100,68%</b>

Umur Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata peluang untuk hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indikator tersebut. Umur Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam menghitung umur harapan hidup yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup dilakukan proses normalisasi berdasarkan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

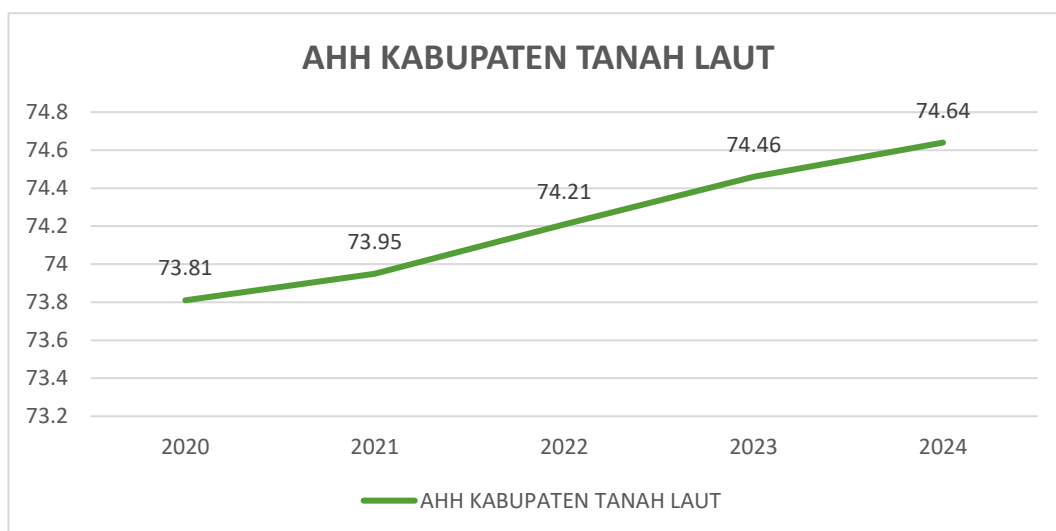
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2022-2023 yaitu pada angka 74,46 di tahun 2023 menjadi 74,64 di tahun 2024 atau terdapat peningkatan

sebesar 0,18 tahun. Realisasi tersebut berdasarkan target tahun 2024 telah mencapai 106,32%. Angka tersebut menggambarkan bahwa perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 diharapkan mencapai umur 74,64 tahun hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat. Angka tersebut juga masih berada di atas angka Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 74,18 atau terpaut 0,46 di bawah angka Kabupaten Tanah Laut dan dibawah angka Nasional yaitu 74,15 untuk AHH Indonesia.

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat secara fisik maupun non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk, di mana salah satu indikator utama untuk mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau yang sebelumnya biasa disebut Angka Harapan Hidup.

Trend peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2019-2024 dapat dilihat dari grafik berikut:

**Grafik 3.1**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2020-2024**



Perubahan Data Umur Harapan Hidup sebagai salah satu komponen perhitungan IPM :

- Mulai tahun 2023, BPS melakukan *updating* sumber data UHH hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dengan hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 yang lebih terkini dan berdasarkan jumlah sampel yang lebih besar.
- Hal ini dilakukan karena telah tersedia data hasil Sensus Penduduk yang lebih update dan lebih menggambarkan kondisi terkini dibandingkan data sebelumnya.
- Hal ini mengakibatkan adanya perubahan angka UHH menjadi 2 yaitu UHH series lama (sumber data Sensus Penduduk 2010) dan UHH series baru (sumber data Long Form Sensus Penduduk 2020)
- Untuk sumber data HLS, RLS dan Pengeluaran Perkapita masih tetap bersumber dari hasil Susenas Maret tahun berjalan (tidak ada perubahan angka)

## 2. CAPAIAN KINERJA KEPALA DINAS KESEHATAN (ESELON II)

Tabel 3.2

### Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	2024					efisiensi anggaran
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	158	170	118,7	143%	.2.285.908.875	2.035.482.200	.250.426.675
2	Angka Kematian bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	10,2	8	12,7	62.99%	296.565.407	.230.414.000	66.151.407
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	4,55	14	26,6	52,63%	2.936.933.738	.2.542.075.900	394.867.838
4	Angka Kesakitan	9.83	10	12,89	77,57	316.230.000	311.435.000	4.795.000
	Rata-rata Capaian				84,05			

Pengukuran pencapaian sasaran Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat diukur dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi gizi stunting.

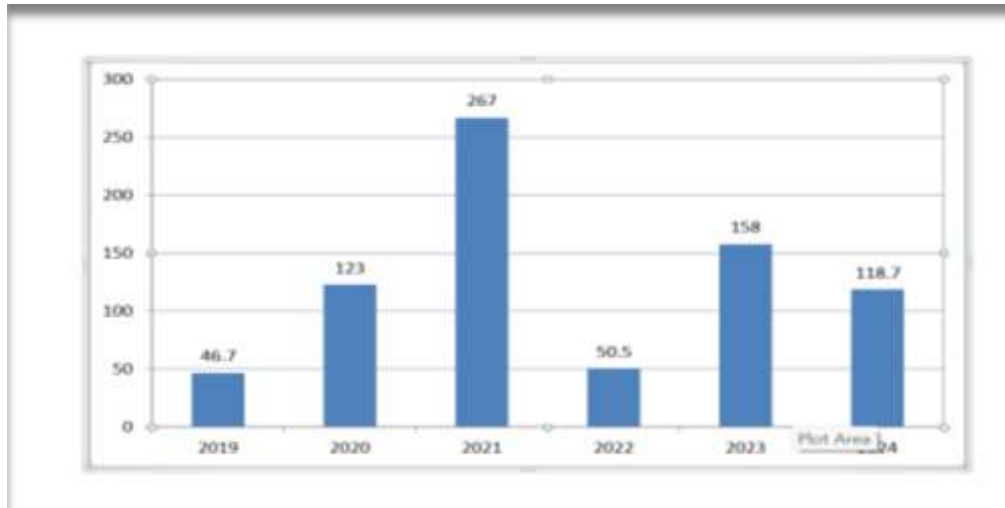
#### 1) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu pada tahun 2024 sebesar 118,7 per 100.000 kelahiran hidup dimana angka tersebut diperoleh dari perhitungan Jumlah Kematian Ibu di bagi Jumlah Kelahiran Hidup dikali 100.000, yang mana pada tahun 2024 ini ada 6 kasus kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 5053 orang, sehingga ditemukan hasil AKI yaitu 118,7 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka tersebut dibawah target Renstra Kabupaten Tanah Laut yaitu 170 per 100.000 KH, dan juga dibawah target nasional (RPJMN) yaitu sebesar 194 per 100.000 kelahiran hidup.

Selanjutnya kecenderungan AKI dalam lima tahun terakhir di gambarkan dalam gambar berikut.

**Grafik 3.2**  
**Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2019-2024**



Gambar diatas menunjukkan capaian AKI dari tahun 2019 dan 2024 meningkat, dan pada tahun 2023 kematian ibu mengalami peningkatan kasus dan ditahun 2024 mengalami penurunan kasus..

Dalam rangka penurunan angka kematian ibu, Dinas Kesehatan melakukan banyak upaya diantaranya: Deteksi Risti Ibu hamil oleh Dokter Spesialis, Kelas Ibu Hamil di Puskesmas, Audit Maternal Perinatal pada Kasus Kematian.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas didukung dengan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

b) Permasalahan

Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar kematian ada di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). hal ini juga disebabkan adanya keterlambatan penanganan baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, walaupun pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan sudah diketahui lebih dini.

**Grafik 3.3**  
**Penyebab Kematian Ibu tahun 2024**



c) Solusi

Kegiatan yang dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu pada adalah sebagai berikut:

- Peningkatan SDM Kesehatan
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas
- Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
- Pemantapan sistem rujukan
- Promosi Kesehatan

d) Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Pendampingan spesialis kebidanan dan kandungan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kegawatdaruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal di 22 Puskesmas
- Verifikasi dan Analisis data MPDN, Audit Kasus Kematian Maternal Perinatal, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Berisiko, Rakor Program Pelayanan KIA dan KB. Pelayanan USG di Puskesmas dalam rangka Skrining Ibu Hamil K1 dan K5
- Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dengan risiko tinggi
- Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program

e) Inovasi

- GERIMIS ( Gerakan Pemeriksaan USG Ibu Hamil dengan Dokter Spesialis).
- PINTU HATI ( Pendampingan dan Pemantauan Ibu Hamil dengan Risti)
- CAPLIN ( Cepat Tanggap Jemput Ibu Bersalin)

**2) Angka Kematian Bayi**

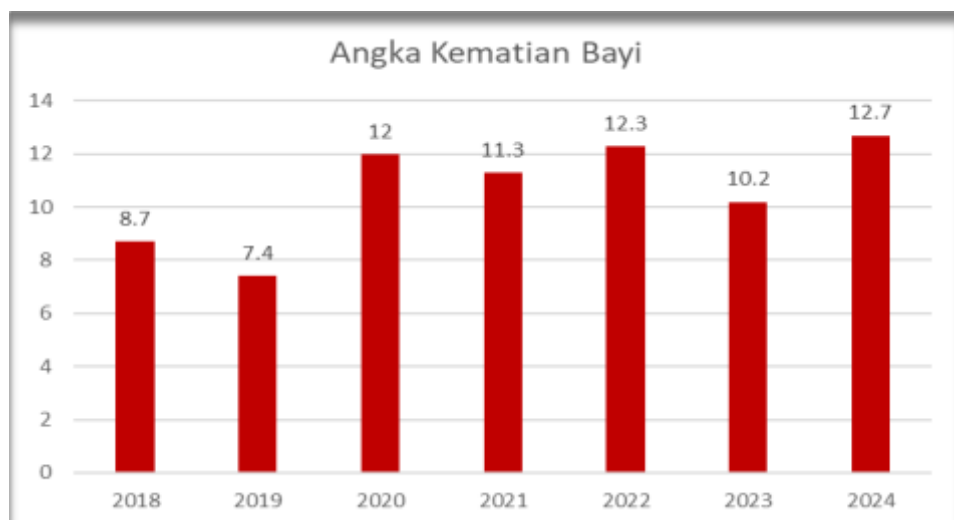
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 mencapai 12,7 per 1000 Kelahiran Hidup, angka ini lebih tinggi dari target Renstra Kabupaten Tanah Laut, namun lebih rendah dari target RPJMN yaitu 16 per 1000 Kelahiran Hidup. Kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan kejadian kasus kematian bayi sebanyak lebih dari 10% kasus kematian yang terjadi (sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal -Surveilans Respon tahun 2022).

Pada tahun 2024 jumlah absolut kematian bayi sebesar 64 kematian bayi dari 5.053 kelahiran hidup, yang berarti Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 sebesar 12,7 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan terjadi kenaikan Angka Kematian Bayi dibandingkan tahun 2023 dimana AKB sebesar 10,2 per 1.000 kelahiran hidup. Target Renstra AKB Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup yang artinya AKB tahun 2024 masih belum seperti yang diharapkan. Akan tetapi capaian AKB tahun 2024 sebesar sebesar 12,7 per 1.000 kelahiran hidup, masih dibawah angka target nasional (RPJMN) sebesar 16 per 1000 kelahiran hidup.

Dalam rangka penurunan angka kematian Bayi, Dinas Kesehatan melakukan banyak upaya diantaranya: Deteksi Risiko tinggi pada Bayi dan Balita oleh Dokter Spesialis , Audit Maternal Perinatal pada kasus kematian, Skrining Hipotiroid Kongenital dan Penyakit Jantung Kritis Bawaan pada Bayi baru Lahir, Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita

Kecenderungan pencapaian AKB pada tahun 2018-2024 di sajikan dalam gambar berikut:

**Grafik 3.4**  
**Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Laut**  
**Tahun 2018 – 2024**



a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan program Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

b) Permasalahan

Penyebab kematian bayi tidak terlepas dari kondisi kesehatan ibu saat hamil. Untuk itu sangat terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dengan kejadian kematian bayi di Tanah Laut. Penyebab kematian bayi adalah BBLR (Bayi Baru Lahir Rendah) dan prematuritas 24 orang, kelainan kardiovaskular dan respirasi 9 orang, Asfiksia 6 orang, Kelainan bawaan 3 orang, infeksi 2 orang, pneumonia 1, Demam Berdarah 1 orang, penyebab lainnya 16 orang (meningitis, penyakit terkait endokrin, kejang demam dll) dan belum diketahui penyebabnya sebanyak 2 orang.

c) Solusi

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian bayi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi
- b) program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000 hari pertama kehidupan
- c) peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan
- d) Peningkatan pelaksanaan skrining Layak hamil pada Wanita Usia Subur (WUS)
- e) Keterlibatan dokter Spesialis Anak di Puskesmas dalam rangka Deteksi Dini Risiko Tinggi pada Bayi dan Balita

- f) Pendampingan ibu hamil KEK oleh tenaga kesehatan dan kader serta pemberian PMT lokal
- g) Optimalisasi pencatatan dan pelaporan kasus kematian Bayi dan Balita melalui MPDN yang bisa diakses secara real tim

d) Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

No	FAKTOR/ KENDALA	ANALISA PENYEBAB/ KENDALA	TINDAKLANJUT/ INTERVENSI
1	Penyakit pada bayi	BBLR	Skrining Layak Hamil, Kunjungan rumah, deteksi dini Bumil berisiko tinggi, Optimalisasi asupan Zat Besi selama Kehamilan (min 90 tablet)
			Pemberian makanan Tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Protein
			Penyuluhan perorangan tentang peningkatan gizi ibu hamil
		Asfiksia	Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonates
		Pneumonia	Peningkatan KIE pada kelas ibu hamil dan Balita terkait Pentingnya imunisasi
Kelainan bawaan	Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia serta optimalisasi pemberian asam folat pada Trimester 1 (K1)		

e) Inovasi

- RUTING (Rujukan Balita Stunting)

### 3) Prevelensi Stunting

Pada Tahun 2024 berdasarkan hasil SSGI, Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Laut sebesar 26,6 %. Sedangkan berdasarkan hasil EPPGM Pada tahun 2024 prevalensi stunting (TB/U) pada Balita sebesar 5,55 % dari target <16 % yaitu sebanyak 1535 orang Balita gizi stunting dari 27674 Balita yang terentry di EPPGBM. Prevalensi 2024 lebih tinggi daripada prevalensi stunting 2023 yaitu 4,90%. Sebaran prevalensi stunting yang terbanyak adalah di wilayah kerja Puskesmas Panyipatan sebesar 15,23 %, dari data ini Dinas Kesehatan dapat menentukan lokus untuk penanganan gizi stunting. Dalam rangka penurunan angka kematian ibu, Dinas Kesehatan melakukan banyak upaya diantaranya: Pemberian PMT Lokal Pada Balita, Pemberian PMT Lokal Pada Ibu Hamil Risiko KEK dan Ibu Hamil KEK, Pemeriksaan Hb pada remaja putri, Pemeriksaan Hb pada Balita dan pemberian sirup tambah darah, untuk sebaran prevalensi gizi stunting bisa dilihat pada Grafik berikut:

**Grafik 3.5**

**Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024**



Data diatas merupakan hasil penarikan E-PPGBM Bulan Juni 2024 ditemukan sebanyak 1.535 balita stunting dari 27.674 balita yang diukur tinggi/panjang badannya. Prevalensi stunting Kabupaten Tanah Laut sendiri berada di angka 5.55 % yang mana mencapai target nasional yaitu kurang dari 14 %.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan di dukung dengan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi.

b) Permasalahan

Banyaknya kasus gizi stunting disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, lingkungan, penyakit infeksi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

c) Solusi

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna terus menurunkan Prevalensi stunting Balita pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas
- b) Pelatihan Pemantau Pertumbuhan bagi petugas
- c) Pelatihan Bagi TOT PMBA dan MTBS
- d) Implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD),
- e) Surveilans gizi, dan pemberian intervensi
- f) Konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter umum dan dokter Spesialis anak
- g) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK.
- h) Operasi Timbang

d) Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut:

No	FAKTOR/KENDALA	ANALISA PENYEBAB/KENDALA	TINDAKLANJUT/INTERVENSI
1	Balita	Penyakit kongenital	Pemberian PMT pada bumil KEK dan atau anemia
			Pemberian kehamilan
		Infeksi TB Balita, ISPA, dan Diare	Pelacakan dan pengobatan kasus TB
			Kampanye ASI eksklusif
			Promosi PHBS
			Penyuluhan kesehatan lingkungan
			Peningkatan kapasitas petugas

			dalam manajemen penyakit balita (MTBS)
		Asupan gizi	Pemberian PMT balita gizi buruk dan balita kurus
2	Petugas	Keberlanjutan Peningkatan kompetensi petugas	Pelatihan kader Makanan Bayi dan Anak (Kader PMBA)
			Workshop permasalahan gizi
			Bimtek petugas gizi
			Monev Fasilitator PMBA
			Audit kasus Gizi Buruk
			Monev pelaksanaan PISPK

e) Inovasi

- GERAK KAKI (Gerakan Atasi Kematian Ibu dan Bayi)
- Totalitas Besti (Tolong Tangani dan Fasilitasi Bumil, Bulin dan Bayi yang berisiko Tinggi)
- Liat Kemasan Mini (Les Privat keluarga Emas, Anak, Mommy dan Daddy)

**4) Angka Kesakitan**

Angka kesakitan tahun 2024 sebesar 12,89 % dimana angka tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di bagi jumlah seluruh penduduk di kali 100 %, yang mana pada tahun 2024 penduduk Kabupaten tanah laut berjumlah 369.818 orang dari seluruh penduduk ada 47.633 Penduduk kabupaten Tanah Laut mempunyai keluhan Kesehatan, Dalam rangka penurunan angka kematian Bayi, Dinas Kesehatan melakukan banyak upaya diantaranya: meningkatkan kesadaran masyarakat melalui promosi kesehatan untuk menerapkan prilaku hidup bersih sehat.

a) Program Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan oleh Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

b) Permasalahan

Faktor yang sangat mempengaruhi Angka kesakitan yaitu :

1. Faktor lingkungan: Faktor lingkungan seperti polusi, kebersihan, dan lain-lain
2. Faktor perilaku: Faktor perilaku seperti gaya hidup, pola makan, dan lain-lain

c) Solusi

Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui promosi kesehatan sehingga di harapkan masyarakat bisa menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat

d) Rencana Aksi

Melaksanakan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat

## Foto-Foto Kegiatan



## Kunjungan Bayi BBLR





**Deteksi Risiko Tinggi pada Bayi dan Balita oleh Dokter Spesialis Anak**



**Kegiatan Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri Tahun 2024**



### Kegiatan Pemberian Vitamin Tahun 2024



### Kegiatan Pemberian PMT Lokal Tahun 2024



**Kegiatan Pendampingan Ibu Hamil Risti oleh Bidan dan Dokter**

### 3. CAPAIAN KINERJA ESELON III

#### I. Sekretaris

Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	24,60	24	24,60	102,5
		Nilai Komponen Pengukuran	24,10	24	24,60	102,5
		Nilai Komponen Pelaporan	11,50	12	12,30	102,5
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	19,25	20	20	100
		Nilai Survey Pelayanan Kesekretariatan	85	90	88,80	98,67

Dari tabel indikator pendukung pada sekretariat itu Nilai Survey Pelayanan Kesekretariatan (Nilai SKM) pada tahun 2024 belum mencapai target, dari target 90 % terealisasi 88,80 %, tetapi di bandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan, sedangkan komponen-komponen yang menjadi penilaian SAKIP. Jika dibandingkan antara realisasi dengan target yang ada, semua terealisasi melebihi dari yang ditargetkan atau dengan kata lain capaiannya lebih dari 100%. Namun jika dibandingkan dengan penilaian realisasi tahun 2023. Ada nilai yang mengalami kenaikan dan ada jua nilainya tetap/sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan bahwa semua dokumen SAKIP yang disusun sudah sesuai dengan ketentuan dan pelayanan yang diberikan semakin baik.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan didukung dengan Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 8 (delapan) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Permasalahan

Ketersedian SDM yang masih kurang.

c) Solusi

Peningkatan SDM dan melakukan evaluasi dalam pencapaian kinerja di bagian ke sekretariat secara berkala.

d) Rencana Aksi Tahun 2025

Evaluasi Kinerja di lakukan secara berkala.

e) Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyusunan SAKIP Tahun Anggaran 2022 yaitu:

- Kurang Terintegrasinya data program
- Ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan SDM yang cukup berkualitas walaupun dengan keterbatasan jumlah yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur yakni sebanyak 18 PNS yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 1 orang Kasubbag Keuangan, 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dan 15 orang staf. Sekretaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta telah mencapai kinerjanya sebesar 101% dengan realisasi anggaran Rp.218.153.016.384 dari pagu anggaran Rp.249.961.585.112 dengan rata rata 87% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Sekretariat rata - rata sebesar 13 % dari 5 Program 20 Kegiatan. Kegiatan ini menjadi tanggung jawab Sekretaris.

Adapun hal-hal yang akan dilakukan dalam meningkatkan sasaran Indikator yang masih belum tercapai yaitu:

- Peningkatan SDM baik dibagian Subbag Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Aset serta Subbag Perencanaan dan Pelaporan sebagai ujung tombak keberhasilan dalam mencapai sasaran yang diharapkan.
- Melakukan evaluasi dalam pencapaian kinerja di bagian ke sekretariat secara berkala.

Untuk mendukung sasaran strategis nomor 8 Sumber Daya Manusia yang ada yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut dengan dibantu oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Aset, serta Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dengan pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Program dan Kegiatan sesuai DPA tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran capaian kinerjanya rata-rata tahun 2023 101 % dengan kategori sangat baik.

## II. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tabel Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun (%)			Tahun 2024					
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
1	Menurunnya Resiko tinggi Pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Resiko tinggi	28	28,5	21,6	20	20,5	97,56	2.285.908.875	2.035.482.200	250.426.675
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu hamil	Persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar	85,5	81,5	77,7	100	70,3	70,3			
3	Meningkatnya status gizi Masyarakat	Persentase Ibu hamil KEK	13.0	13.51	12.8	10	13.4	74.62	2.936.933.738	2.542.075.900	394.867.838
4	Meningkatnya status gizi Masyarakat	Persentase Balita Wasting	3.74	3.86	3.69	7	5.08	137			
5	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Remaja Putri	Persentase remaja yang minum Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	48.51	95.86	99.41	100	99,41	100			
6	Meningkatnya kecukupan gizi Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100	100	100	100	100	100			

7	Meningkatnya Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Melahirkan di Fasyankes dan ditolong Nakes	99,6	99,6	99,5	100	99,7	99,7	1.167.083.888	813.747.940	353.335.948
8	Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	99.5	95.88	89.46	100	84.35	84.35	296.565.407	230.414.000	66.151.404
9	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan anak di bawah usia 5 tahun	Persentase Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	86.23	88.46	84.58	100	84.6	84.62	1.699.532.986	1.579.443.600	120.089.386
10	Meningkatnya perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat	Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	47,0	68,0	99,8	65	92.3	60	586.079.800	531.692.175	54.387.625

### 1) Persentase Ibu Hamil Risiko tinggi

Persentase ibu hamil Risiko Tinggi tahun 2024 adalah 20,5% lebih rendah dari Persentase Ibu Hamil Risiko Tinggi tahun 2023 yaitu 21,6%. Namun meskipun telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, masih belum mencapai target 20% dari seluruh ibu hamil dengan realisasi 20,5%. Masih perlu dilakukan upaya dalam menurunkan Persentase ibu hamil Risiko Tinggi di tahun 2025.

#### a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

b) Permasalahan

Ibu Hamil Risiko Tinggi masih di 20,5% disebabkan oleh antara lain:

- a) Faktor Budaya dimana ganti pasangan baru harus memiliki anak atau belum memiliki anak dengan jenis kelamin yang diinginkan tanpa melihat faktor risiko ibu.
- b) Pemahaman terhadap PUS tentang Faktor Risiko pada ibu hamil yang masih harus ditingkatkan.
- c) Kapasitas petugas dalam skrining Ibu Hamil Risiko Tinggi masih harus ditingkatkan.

c) Solusi

Solusi yang telah diupayakan di tahun 2024:

- a) Melakukan Sosialisasi dan pembentukan Jejaring Skrining Layak hamil.
- b) Melakukan deteksi dini Ibu hamil Risiko Tinggi dengan melaksanakan kegiatan Pendampingan oleh Spesialis Ke Puskesmas melalui pemeriksaan USG dan peningkatan Kapasitas petugas dalam penanganan Ibu Hamil Risti.
- c) Melakukan bimbingan teknis terhadap petugas dalam upaya meningkatkan pemanfaatan penggunaan buku KIA.

d) Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan MOU antara Dinkes dan Kemenag terkait Perkawinan usia anak sebagai salah satu upaya penurunan Ibu Hamil Berisiko yang berakibat pada AKI/AKB.
- b) Pendampingan spesialis kebidan dan kandungan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kegawatdaruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal di 22 Puskesmas.
- c) Verifikasi dan Analisis data MPDN, Audit Kasus Kematian Maternal Perinatal, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Berisiko.

- d) Kunjungan dokter spesialis kebidanan ke Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dengan risiko tinggi.
- e) Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program.
- e) Inovasi
  - Totalitas Bestie ( Tolong, Tangani dan Fasilitasi Bumil,Bulin dan Bayi yang berisiko Tinggi)
  - Pintu hati ( Pendampingan dan Pemantauan Ibu Hamil Risti)

## **2) Persentase ibu hamil yang dilayani sesuai standar**

Pada tahun 2024 targetnya 100% (6257 orang) dan realisasi sebesar 69,8 % (4371 oarang) hal ini masih berada dibawah target, Ini berarti pada tahun 2024 realisasinya mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 77,7%. dari target 100%.

### **a) Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

### **b) Permasalahan**

Permasalahan tidak tercapainya Presentase Ibu hamil yang dilayani sesuai standar antara lain Karena:

- a) Adanya kasus hamil diluar nikah, hamil diusia ibu tua dan atau banyak anak sehingga malu untuk memeriksakan kehamilan sejak awal kehamilan.
- b) Standar Pelayanan Minimal K6 baru dimulai pada Triwulan 2 tahun 2024.

- c) Masih ada ibu hamil yang periksa hanya di Dokter Spesialis atau di PMB sehingga tidak tercatat di Laporan Bidan setempat.
  - d) Tenaga dokter yang telah mengikuti Pelatihan USG Dasar pindah tempat / Melanjutkan Pendidikan.
- c) Solusi
- Solusi yang telah diupayakan di tahun 2024:
- a) Meningkatkan mutu Pelayanan ibu hamil dengan penguatan pemeriksaan Skrining Dokter dan Pemeriksaan USG TM1 dan TM3 (K5) di Puskesmas.
  - b) Meningkatkan Pencatatan Pelaporan dengan aplikasi E Kohort.
  - c) Bekerjasama dengan Linsek ( aparat desa,kader) dengan pendataan atau sweeping.
- d) Rencana Aksi Tahun 2025
- Pada Tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan Rakor Program Pelayanan KIA dan KB. Pelayanan USG di Puskesmas dalam rangka Skrining Ibu Hamil K1 dan K5.
  - b) Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program.
  - c) Puskesmas yang Dokternya Pindah/Melanjutkan Pendidikan membuat surat ke Dinkes untuk mohon bantuan tenaga Dokter Umum yang terlatih USG Dasar untuk dapat menjadwal pelayanan USG diPuskesmas tersebut.
- e) Inovasi
- SINARI BUMI ( Sungai Cuka dan Arutmin bekerjasama Melaksanakan USG pada Ibu Hamil)
  - GERIMIS( Gerakan Pemeriksaan USG ibu Hamil dengan Dokter Spesialis)

### 3) **Persentase ibu hamil KEK**

Pada tahun 2024 targetnya 10% dan realisasi sebesar 684 ibu mengalami KEK hal ini berada diatas target, sehingga nilai capaian hanya 13,4 %. Ini berarti pada tahun 2024 capaiannya mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Dimana realisasi pada tahun 2023 sebesar 12,8%. dari target 11,5%.

#### a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran dengan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

#### a) Permasalahan

Masih tingginya angka prevalensi ibu hamil mengalami KEK di kabupaten tanah laut, disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kejadian anemia, kekurangan asupan, vitamin selama hamil, pendidikan rendah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya nutrisi selama hamil.

#### b) Solusi

Solusi yang telah diupayakan di tahun 2024:

- a) Meningkatkan mutu Pelayanan ibu hamil dengan penguatan pemeriksaan Skrining Dokter dan Pemeriksaan USG TM1 dan TM3 (K5) di Puskesmas
- b) Meningkatkan Pencatatan Pelaporan di Aplikasi EPPGBM.
- c) Kerjasama Lintas Program, Bidan, Perawat dan Promkes dalam menangani Ibu Hamil yang mengalami KEK
- d) Memberikan edukasi pentingnya asupan gizi selama hamil melalui kelas ibu hamil
- e) Perencanaan Kehamilan dan Keluarga berencana

- c) Rencana Aksi Tahun 2025  
Pada Tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan Evaluasi Program Gizi dengan Petugas Gizi Puskesmas.
  - b) Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program.
  - c) Pelaksanaan PMT lokal menggunakan dari dana DAK Puskesmas
  - d) Distribusi PMT berupa susu dan biskuit untuk Ibu Hamil yang mengalami KEK.
- d) Inovasi
  - CETAR MEMBAHANA ( Catin pintar membuka Jendela Dunia)
  - PANTAU BURIS (Tim Gerak cepat Pantau Ibu Hamil Berisiko)

#### **4) Persentase Balita Wasting**

- a) Program dan Kegiatan  
Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan dengan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dan Gizi Masyarakat.
- b) Permasalahan  
Banyaknya kasus gizi wasting disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya asupan, pola asuh yang kurang tepat, lingkungan, penyakit infeksi, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, penyakit bawaan, riwayat BBLR dan adanya permasalahan sosial di dalam keluarga.

c) Solusi

Kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan terus dilakukan untuk menurunkan Prevalensi wasting:

- a) Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas.
- b) Pelatihan Pemantauan dan Pertumbuhan bagi petugas.
- c) Pelatihan Bagi TOT PMBA dan SDIDTK.
- d) Implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- e) Surveilans gizi, dan pemberian intervensi.
- f) Konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter umum dan dokter Spesialis anak.
- g) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK.
- h) Sweeping atau kunjungan rumah bagi balita yang tidak berhadir ke posyandu dengan riwayat wasting.
- i) Validasi data Wasting sebelum dilaporkan ke Aplikasi EPPGBM.

d) Rencana Aksi Tahun 2025

- a) Melaksanakan Evaluasi Program Gizi dengan Petugas Gizi Puskesmas.
- b) Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program.
- c) Pelaksanaan PMT lokal menggunakan dari dana DAK Puskesmas.
- d) Distribusi PMT berupa susu dan biskuit untuk Balita wasting.
- e) Pemberian makan untuk balita wasting menggunakan dana APBD 2025 Dinas Kesehatan.
- f) Memberikan edukasi melalui kelas balita.

## 5) **Persentase Remaja yang minum Tablet Tambah Darah**

### a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan dengan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

### b) Permasalahan

Pelaksanaan TTD Remtari pada tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik, distribusi TTD ke seluruh sekolah maupun di posyandu remaja sudah dilaksanakan. kepatuhan minum TTD yang menjadi kendala, masih ada remaja putri yang mengalami anemia.

### c) Solusi

Solusi yang telah diupayakan di tahun 2024:

- a) Melaksanakan Evaluasi Program Gizi dengan Petugas Gizi Puskesmas.
- b) Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program.
- c) Pemberian edukasi pentingnya minum TTD untuk remaja
- d) Pencatatan dan pelaporan konsumsi (kepatuhan) TTD melalui aplikasi CERIA atau satu sehat.

### d) Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Evaluasi Program Gizi dengan Petugas Gizi Puskesmas.
- b) Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program.
- c) Pelaksanaan pencanangan TTD rematri disetiap sekolah
- d) Pelaksanaan rutin AKSI Bergizi di setiap sekolah
- e) Pemberian edukasi di posyandu remaja

- e) Inovasi
  - PAMIT RIANTI ( Patuh Minum Tablet Fe Berantas Anemia dan Stunting)

**6) Persentase Ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi**

Pada tahun 2024 targetnya 100% dan realisasi sebesar 684 ibu mengalami KEK mendapat tambahan asupan gizi baik berupa PMT lokal maupun PMT biskuit atau susu.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan dengan program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.

b) Permasalahan

Tidak ada permasalahan dalam pemberian asupan gizi untuk ibu hamil yang mengalami KEK.

c) Solusi

Pemeriksaan ibu hamil yang mengalami KEK dan terus dilakukan pemberian PMT lokal, Biskuit dan susu diberikan.

d) Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Evaluasi Program Gizi dengan Petugas Gizi Puskesmas.
- b) Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program.
- c) Melakukan Monitoring pemberian PMT yang telah dilaksanakan pada Ibu Hamil KEK.

- e) Inovasi
  - KAWAL KATOK EMAS ( kerja sama awal kehamilan kader, dan tokoh masyarakat
  - PANTAU BURIS (Tim Gerak cepat Pantau Ibu Hamil Berisiko)

**7) Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Melahirkan di Fasyankes dan ditolong Nakes**

Tahun 2021 Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Melahirkan di Fasyankes dan ditolong Nakes sesuai standar sebanyak 99,6%, Presentase ini tetap di tahun 2022, Dan menurun ditahun 2023 yaitu 99,5%, Kembali mengalami kenaikan ditahun 2024 menjadi 99,7%.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan dengan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

b). Permasalahan

Masih ada persalinan di Non Fasyankes dan Non Faskes, adanya kasus abortus.

c). Solusi

Solusi yang telah dilaksanakan di tahun 2024:

- a) Melaksanakan Bimtek Ibu Bersalin dalam upaya peningkatan kapasitas petugas dalam penguatan pertolongan persalinan di Faskes (Puskesmas, RS ) serta penguatan pemanfaatan buku KIA.
- b) Penyediaan BMHP untuk Persalinan di Fasyankes.
- c) Audit Kematian Ibu Bersalin.
- d) Rakor Ibu Bersalin ( alur rujukan dan rujukan terencana).

- d). Rencana Aksi Tahun 2025  
Pada Tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
- a) Bimtek Ibu bersalin Penguatan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dan Pemanfaatan Buku KIA.
  - b) Kerjasama Lintas Sektor.
  - c) Penyediaan BMHP untuk Persalinan.
  - d) Audit Kematian Ibu Bersalin.
- e). Inovasi
- TIM GERCEP PANTAU BURIS (Tim Gerakan Cepat Pantau Ibu Hamil Berisiko).
  - GERAKAKI ( Gerakan Atasi Kematian Ibu dan Bayi)

**8) Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar**

Tahun 2021 Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar sebanyak 99,5 %. Persentase ini mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada Tahun 2022 cakupan sebesar 95,88%, tahun 2023 sebesar 89,46% dan pada tahun 2024 menjadi lebih rendah yaitu sebanyak 84,3%.

a). Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas didukung dengan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

b). Permasalahan

Permasalahan pada Pelayanan Bayi Baru Lahir disebabkan:

- a) Masih ada kematian di masa Neonatal dengan penyebab tertinggi adalah prematuritas dan BBLR.
- b) Belum semua tenaga kesehatan (bidan dan perawat) terlatih gawat darurat neonatal.
- c) Tidak optimalnya/ tidak tersedianya alat kesehatan yang terkait dalam tatalaksana gawat darurat neonatal (infant warmer yang tidak berfungsi baik)

c) Solusi

- a) Meningkatkan pelayanan skrining layak hamil dengan berkoordinasi dengan lintas program terkait.
- b) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan (termasuk kunjungan rumah).
- c) Melibatkan Dokter Spesialis Anak dalam Pelayanan dan Skrining pada Bayi dan Balita Risiko Tinggi.
- d) Optimalisasi pelayanan Bayi Baru Lahir dan Balita dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit.

d) Rencana Aksi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) Skrining Layak Hamil pada Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur.
- b) Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Tatalaksana Gawat Darurat Neonatal.
- c) Pemenuhan Alat Kesehatan terkait pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir dengan berkoordinasi dengan Farmasi Alkes.

- e) Inovasi
  - Totalitas Besti (Tolong Tangani dan Fasilitasi Bumil, Bulin dan Bayi yang berisiko Tinggi)

**9) Persentase Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar**

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar tahun 2021 sebesar 86,23%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya menjadi 88,46% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu 84,58%. sedangkan di Tahun 2024 persentase pelayanan kesehatan Balita sesuai standar mencapai 84,62% meningkat sekitar 0,04% jika dibandingkan tahun 2023.

a). Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas didukung oleh Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

b). Permasalahan

- a) kurangnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan balitanya dalam rangka skrining perkembangan (masih terfokus pada skrining pertumbuhan).
- b) tenaga kesehatan belum semua terlatih SDIDTK.
- c) belum tersedianya SDIDTK kit di Puskesmas sebagai alat dalam skrining perkembangan balita.

c) Solusi

Solusi yang telah diupayakan di tahun 2024:

- a) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan pertumbuhan perkembangan dan skrining secara berkala.

- b) peningkatan kapasitas petugas terkait pemantauan pertumbuhan perkembangan dan pemenuhan alat untuk skrining perkembangan pada balita.
- d) Rencana Aksi Tahun 2025  
Pada Tahun 2025 akan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - a) Penyelenggaraan Pelatihan SDIDTK bagi bidan dan petugas gizi.
  - b) Fasilitasi Puskesmas dalam ketersediaan SDIDTK kit.
- e) Inovasi
  - Liat Kemasan Mini (Les Privvat keluarga Emas, Anak, Mommy dan Daddy)

#### **10) Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat**

Untuk pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2024 adalah 60% (dari 9.891 jumlah rumah tangga yang dilakukan Survey PHBS terdapat 5.961 rumah tangga yang ber PHBS), capaian ini belum mencapai target Renstra pada tahun 2024 sebesar 65%, tetapi angka ini meningkat dari tahun 2023 yang capaiannya sebesar 51%. Dari capaian PHBS tahun 2024 diketahui rumah tangga yang berPHBS yaitu sebanyak 60%, berarti masih ada 40% masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat.

##### a). Program dan Kegiatan

Program Untuk mendukung capaian sasaran ini didukung yakni Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

b). Permasalahan

Salah satu indikator yang membuat capaian PHBS tidak tercapai adalah indikator ke 10 yaitu masih banyak masyarakat yang merokok dalam rumah yaitu sebesar 63%, karena capaian PHBS kriterianya dari 10 indikator, bila salah satu indikator tidak memenuhi maka dianggap rumah tangga tidak ber PHBS, sehingga indikator ke 10 yaitu masih banyak masyarakat yang merokok dalam rumah masih rendah menyebabkan total capain PHBS juga menjadi rendah.

c) Solusi

Untuk meningkatkan capaian PHBS maka dilaksanakanlah kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penyuluhan PHBS oleh petugas Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan melalui lomba PHBS atau Pembinaan PHBS ke desa, oleh petugas Puskesmas dan Kader PHBS di desa.
- b) Dinas Kesehatan sudah menganggarkan biaya untuk kegiatan kader PHBS melaksanakan survei dengan biaya Rp. 10.000,- per rumah tangga sehingga Puskesmas yang kurang dana atau tidak ada dana tetap dapat melaksanakan survei PHBS tersebut.
- c) Meningkatkan koordinasi dengan sektor atau program lain seperti program Kesehatan Lingkungan dengan meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 Pilar STBM yaitu pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dimana masyarakat diajak untuk melihat permasalahan lingkungan dan perilaku yang tidak sehat dan memecahkan sendiri permasalahannya yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan.

d). Rencana Aksi Tahun 2025

- a) Melaksanakan Lomba PHBS tingkat Kabupaten Tanah Laut yang bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten Tanah Laut dimana pemenang tingkat Kabupaten akan mengikuti Lomba PHBS tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- b) Membiayai Kader PHBS di desa dalam melaksanakan survei PHBS tahun 2025 sebanyak 100 rumah tangga per Puskesmas.

e. Inovasi

- SIP OK (Survei PHBS Oleh Kader) yaitu survei online pelaksanaan PHBS oleh kader PHBS dengan aplikasi menggunakan Hp

**Foto-Foto Kegiatan**





Gambar Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir





Gambar Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita

### **III. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Sasaran strategis ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang P2P dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tabel Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Ralisasi Tahun			Tahun 2024					
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
1	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi Hipertensi	4,09	4,34	6,48	10,37	6,91	150	61.480.565	61.176.000	304.565
2	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Pervalensi DM	1,09	1,25	1,47	1,59	1,43	111	437.163.849	399.299.200	37.864.649

3	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Succes Rate TB	84,95	84,38	81,17	90	79,61	88,45	153.695.750	135.515.000	18.180.750
4	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan tidak Menular	Persentase penderita Penyakit Menular dan Penyakit Menular yang terlayani sesuai standart	100	100	100	100	100	100	1.041630.257	612.628.750	

### 1) Prevelensi Hipertensi

Prevalensi Hipertensi adalah jumlah penderita hipertensi didalam wilayah kerjanya di bagi dengan jumlah penduduk dalam wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun di kali 100%. Realisasi tahun 2021 sebesar 4,09% dengan capaian 14.362 orang, tahun 2022 sebesar 4,34% dengan capaian 15.264 orang, dan tahun 2023 sebesar 6,48% dengan capaian 23.204 orang. Target pada tahun 2024 adalah 10,37% dan diperoleh realisasi sebesar 6,91% dengan capaian 25.204 orang.

#### a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas didukung oleh Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

#### b) Permasalahan

Permasalahan tidak tercapainya target penderita hipertensi adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, tenaga kesehatan yang kurang terlatih, pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan secara berkala, kurangnya koordinasi antara lintas program dan lintas sektoral, jumlah SDM yang masih kurang, penjangkaran sasaran belum optimal dan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang.

- c) Solusi
  - a) Telah dilaksanakannya Skrining Hipertensi kepada masyarakat
  - b) Peningkatan kapasitas SDM dengan adanya pertemuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan.
  - c) Telah dilaksanakan Edukasi yang lebih baik dan dukungan dari tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan pasien
  - d) Pencatatan dan pelaporan di ASIK dan SIPTM
  
- d) Rencana Aksi Tahun 2025
  - a) Meningkatkan kegiatan skrining hipertensi di Posbindu
  - b) Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang penyakit hipertensi
  - c) Meningkatkan dan menertibkan pencatatan dan pelaporan yang lebih optimal
  - d) Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sector

## 2) Prevelensi Diabetes Melitus

Prevalensi Diabetes Mellitus adalah jumlah penderita diabetes mellitus didalam wilayah kerjanya di bagi dengan jumlah penduduk dalam wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun di kali 100%. Realisasi tahun 2021 sebesar 1,09% dengan capaian 3.825 orang, tahun 2022 sebesar 1,25% dengan capaian 4.411 orang, dan tahun

2023 sebesar 1,47% dengan capaian 5.226 orang. Target pada tahun 2024 adalah 1,59% dan diperoleh realisasi sebesar 1,43% dengan capaian 5.208 orang.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan dengan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

b) Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, tenaga kesehatan yang kurang terlatih, pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan secara berkala, kurangnya koordinasi antara lintas program dan lintas sektoral, jumlah SDM yang masih kurang, penjangkaran sasaran belum optimal dan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang.

c) Solusi

- a) Telah di laksanakan skrining diabetes mellitus di Masyarakat
- b) Pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan skrining diabetes mellitus
- c) Peningkatan kapasitas SDM dengan adanya pertemuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan.
- d) Memberikan Edukasi yang lebih baik dan dukungan dari tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan pasien

- e) Pencatatan dan pelaporan di ASIK dan SIPTM
- d) Rencana Aksi Tahun 2025
  - a) Meningkatkan skrining diabetes mellitus di Posbindu
  - b) Penambahan sarana dan prasarana untuk kegiatan skrining diabetes mellitus
  - c) Meningkatkan dan mentertibkan pencatatan dan pelaporan
  - d) Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sector

### 3) Success Rate TB

Succes Rate TB pada tahun 2024 Jumlah pasien yang menjalani pengobatan sebanyak 672, dan sebanyak 532 orang atau 79,61 % di nyatakan sembuh dan lengkap pengobatan, di bandingkan tahun 2023 sebesar 81,17 % terjadi penurunan 1,02 % dan di lihat dari target yakni 90% masih belum tercapai.

#### a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan didukung dengan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan

- Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis

#### b) Permasalahan

- a) Tingkat pengetahuan penderita tentang penyakit dan pengobatan yang belum maksimal
- b) Mobilitas penderita

- c) Letak geografi dan jarak ke fasyankes untuk akses pengobatan
  - d) Sebagian besar penderita TBC berasal dari masyarakat menengah kebawah sehingga kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan (uang transportasi, tidak bisa meninggalkan pekerjaan, dsb)
  - e) Kebanyakan pasien TBC yang meninggal sudah berusia lanjut dan dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk disertai dengan komorbid lain
- 
- c) Solusi
    - a) Promosi dan preventif lebih digiatkan di tingkat fasyankes dan di desa-desa
    - b) Koordinasi kesemua pihak (LS dan LP) terkait pengobatan pasien
    - c) Menunjang kesehatan pasien TBC dengan memberikan PMT dan vitamin
- 
- d) Rencana Aksi Tahun 2025
    - a) Skrening TB pada penderita Diabetes mellitus
    - b) Memperkuat Jejaring dengan lintas sektor dan Klinik Swasta
    - c) Skrening TB di tempat kerja (Perusahaan) dan Pondok Pesantren
- 
- e) Inovasi
    - Pemberian PMT untuk penderita TBC
    - Skrening TBC pada penderita DM dengan menggunakan X-Ray

- Merangkul Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TB kabupaten untuk OJT langsung ke fasyankes untuk penanggulangan TBC
- Membentuk DPPM untuk merangkul faskes swasta dalam upaya penanggulangan TBC di Kabupaten Tanah Laut

#### **4) Prevelensi Penderita Penyakit Menular dan Penyakit tidak Menular**

Prevalensi Penderita Penyakit Menular dan Penyakit tidak Menular yang dilayani sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 100%.

##### a) Program dan Kegiatan

Program yang mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan didukung yakni Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan TidaK Menular

##### b) Permasalahan

- a) Tingkat pengetahuan penderita tentang penyakit dan pengobatan yang belum maksimal
- b) Mobilitas penderita
- c) Letak geografi dan jarak ke fasyankes untuk akses pengobatan
- d) Penderita berasal dari masyarakat menengah kebawah sehingga kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan (uang transportasi, tidak bisa meninggalkan pekerjaan)

##### c) Solusi

- a) Promosi dan preventif lebih digiatkan di tingkat fasyankes dan di desa-desa
- b) Koordinasi kesemua pihak (LS dan LP) terkait pelayanan Kesehatan masyarakat

- c) Skrening Kesehatan baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular
- d) Rencana Aksi Tahun 2025
  - a) Membuat SK Tim tentang pencegahan dan pengendalian penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
  - b) Skrening dan Investigasi kasus penyakit menular dan tidak menular
- e) Inovasi
  - Skrening dan sosialisasi dan peningkatan kafasitas pada remaja tentang penyakit menular
  - Skrening dan pemeriksaan kasus penyakit tidak menular

#### Foto-Foto Kegiatan





Gambar Kegiatan Skrining PTM





Gambar Kegiatan Pemeriksaan IVA





Gambar Sosialisasi TPKJM di Kecamatan



Gambar Pertemuan Kesehatan Jiwa



Gambar Pertemuan NAPZA





Gambar Kegiatan Skrining Narkoba Bersama BNNK



Gambar Kegiatan Pendampingan ODGJ Ke RSJ Sabang Lihum



Gambar Kegiatan Pengawasan KTR



Gambar Pertemuan Pengelola PTM di Puskesmas



Gambar Sosialisasi Perda KTR di Sekolah





Gambar Kegiatan Monev di Puskesmas



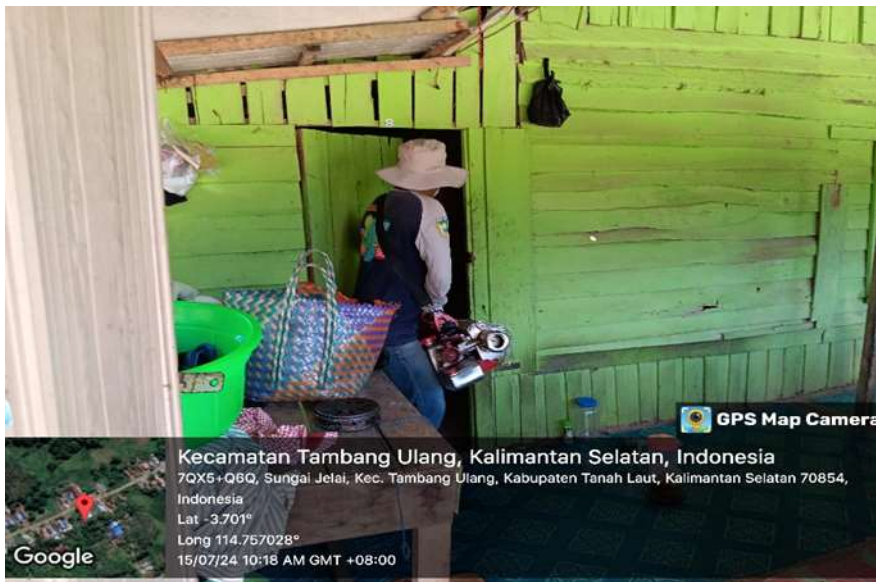
Gambar Kegiatan Pemetaan Daerah Resertif Malaria



Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan, Indonesia  
7QX5+Q6Q, Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70854,  
Indonesia  
Lat -3.701°  
Long 114.757028°  
15/07/24 10:08 AM GMT +08:00



Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan, Indonesia  
7QX5+Q6Q, Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70854,  
Indonesia  
Lat -3.701°  
Long 114.757028°  
15/07/24 10:07 AM GMT +08:00



Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan, Indonesia  
7QX5+Q6Q, Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70854,  
Indonesia  
Lat -3.701°  
Long 114.757028°  
15/07/24 10:18 AM GMT +08:00

Gambar Kegiatan Foging Focus penanggulangan DBD



Gambar Kegiatan Skrening VCT Mobile HIV pada Populasi Kunci





Gambar Kegiatan Peningkatan kapasitas dan sosialisasi HIV di sekolah dan Ponpes





Gambar Kegiatan Kegiatan Assesment Eradikasi Frambusia di Kabupaten Tanah Laut

#### IV. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Sasaran strategis ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun			Tahun 2024					
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
1	Meningkatnya Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Persentase SPA (sarana, prasarana dan alat kesehatan) sesuai standar	73,84	72,24	68,83	70	70,71	101	50.163.351.605	44.965.288.207	5.198.063.398

#### 1) **Persentase SPA**

Pencapaian kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya akreditasi fasilitas kesehatan dengan indikator kinerja persentase SPA (sarana, prasarana dan alat kesehatan) sesuai standar tahun 2024 telah mencapai target dengan realisasi sebesar 70,71% dari target 70%.

##### a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan didukung dengan 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas
  - Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
  - Sub Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
  - Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
  - Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
    - Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
  - b. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan
    - Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
  - c. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
    - Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

b) Permasalahan

Pemenuhan alat kesehatan belum 100% dikarenakan anggaran tahun 2024 masih terbagi dengan pemenuhan alkes untuk RSUD H Darlan Ismail. Tahun 2024 tidak mendapatkan dana DAK. Usulan Alkes sudah diajukan ke kementerian kesehatan sejak 2023 namun hingga sekarang belum dapat kejelasan tentang pemenuhan Alkes melalui program SOPHI. Pemenuhan sarana prasarana belum semua Puskesmas memiliki ruang pelayanan sesuai standar, IPAL, Air bersih dan Mobil Pusling.

c) Solusi

Melakukan usulan anggaran baik untuk murni maupun anggaran perubahan serta melakukan koordinasi lanjutan berkaitan dengan program SOPHI dengan Kementerian Kesehatan. Mengoptimalkan anggaran BLUD untuk pemenuhan Alkes yang kecil. Pemenuhan sarana prasarana Puskesmas di lanjutkan di tahun 2025 dengan penambahan dana DAK berupa IPAL dan Air Bersih.

d) Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan koordinasi lanjutan berkaitan dengan program SOPHI dengan Kementerian Kesehatan. Mengoptimalkan anggaran BLUD untuk pemenuhan Alkes yang kecil. Pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas tahun 2025 berupa peningkatan mutu puskesmas, pengadaan mobil pusling, IPAL dan Air bersih.

## Foto-Foto Kegiatan





Gambar Pemenuhan Alkes Tahun 2024



Gambar Pengadaan PLTS puskesmas 5 unit



Gambar unit Ambulan Rs Bumi Makmur dan 4 unit Mobil Pusing

#### 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Sasaran strategis ini adalah Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Yankes dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun			Tahun 2024					
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	IKM Layanan kesehatan	83,24	85,97	85,29	90	85,29	94,77	149.223.727	133.715.000	15.508.727
2	Meningkatnya Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Puskesmas yang Terakreditasi Paripurna	0	0	40,90	68	91	133,8	519.886.400	471.156.400	48.730.000

##### 1) **IKM Layanan Kesehatan**

###### a) Program dan Kegiatan

Program yang mendukung capaian sasaran dengan dilaksanakan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

###### b) Permasalahan

Dari Sembilan unsur yang di nilai, yang masih belum memenuhi yakni ada keterbatasan sarana dan prasarana dan Kecepatan dalam pemberian pelayanan yang kurang karena keterbatasan SDM

###### c) Solusi

Kegiatan yang telah dilaksanakan yakni pembinaan puskesmas, peningkatan mutu puskesmas.

d) Rencana Aksi Tahun 2025

Melakukan pembinaan dan peningkatan mutu puskesmas.

**2) Puskesmas yang Terakreditasi Paripurna**

Puskesmas yang Terakreditasi Paripurna pada tahun 2024 berjumlah 20 Puskesmas atau 91 % , di bandingkan tahun 2023 yakni sebesar 40,90% terjadi peningkatan / bertambah 11 Puskesmas pada tahun 2024.

a) Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan oleh Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota

b). Permasalahan

Tidak ada permasalahan yang bermakna dalam pelaksanaan kegiatan dan survei akreditasi, namun hanya ada beberapa kendala yang berkaitan dengan koordinasi Puskesmas dengan Dinkes dalam hal pemenuhan elemen penilaian yang berhubungan dengan peran Dinas kesehatan yakni sebagai berikut:

a) Pelaksanaan kredensialing tenaga kesehatan Puskesmas oleh Dinkes

b) Peran dan pelaksanaan kegiatan Tim TPCB Dinkes yang belum optimal

c) Solusi

a) Pembentukan tim Kredensial Dinas Kesehatan dan pelaksanaan kegiatan kredensialing tenaga kesehatan.

b) Optimalisasi peran dan fungsi Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinkes

- d) Rencana Aksi Tahun 2025
  - a) Pembentukan tim Kredensial Dinas Kesehatan dan Penganggaran kegiatan kredensialing tenaga kesehatan tahun 2025.
  - b) Melaksanakan kredensialing tenaga kesehatan tahun 2025
  - c) Optimalisasi dan revitalisasi peran fungsi Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinkes
  - d) Pelaksanaan pembinaan kluster ke Puskesmas Puskesmas yang menjadi binaan TPCB
- e) Inovasi
  - Pembentukan dan pelaksanaan tugas Pendamping Tim Mutu Dinas Kesehatan

## Foto- Foto Kegiatan









Gambar Kegiatan Akreditasi di Puskesmas

### 3. CAPAIAN KINERJA ESELON IV

#### I. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sasaran strategis ini adalah Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	Persentase capaian administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Memastikan Pelayanan administrasi umum bermanfaat	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Memastikan barang milik daerah tersedia	Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Terlaksananya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	277 orang	25 orang	25 orang	100 %
7	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 Paket	6 Paket	100 %
8	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Paket	3 Paket	100 %
9	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %
10	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %
11	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %
12	Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	3 Paket	100 %

13	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %
14	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		200 Dok	200 Dok	100 %
15	Tersedianya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	100 %
16	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit	3 Unit	100 %
17	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	37 Paket	37 Paket	100 %
18	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	2 Unit	100 %
19	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %
20	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	12 Lap	12 Lap	100 %
21	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	17 Unit	17 Unit	100 %
22	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Jenis	54 Unit	53 Unit	53 Unit
23	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		2 Unit	2 Unit	2 Unit

Dari tabel di atas kinerja Kasubbag umum dan kepegawaian pada tahun 2024 tercapai 100% dari target yang di tetapkan.

a). Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 3). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b). Permasalahan
- Terlambatnya melakukan kegiatan ke UPT lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dikarenakan banyaknya kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang mengakibatkan terlambat nya kegiatan untuk ke UPT lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
- c) Solusi
- Merencanakan kaji ulang jadwal kegiatan ke UPT lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan.
- d). Rencana Aksi Tahun 2025
1. Diklat Manajemen untuk Kepala Puskesmas lingkup UPT Dinas Kesehatan.
  2. Bimbingan Teknis Aplikasi Absensi SIAP lingkup UPT Dinas Kesehatan.
  3. Sosialisasi Pengusulan Melalui E-Cuti lingkup Upt Dinas Kesehatan.
  4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kedisiplinan PNS lingkup UPT Dinas Kesehatan.
  5. Assesment Kepagawaian untuk Kepala Puskesmas lingkup UPT Dinas Kesehatan.

Foto- Foto Kegiatan

FOTO KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI  
TENTANG KEDISIPLINAN PEGAWAI  
DI UPT PUSKESMAS TAMBANG ULANG  
TANGGAL, 31 JULI 2024



FOTO KEGIATAN SOSIALISASI SINKRONISASI  
PAK INTEGRASI DAN PEMBUATAN PAK KONVERSI DI APLIKASI E-  
KINERJA  
LINGKUP UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT  
DI UPT PUSKESMAS ASAM-ASAM  
Tanggal, 14 Oktober 2024



## II. Kasubbag Keuangan dan Aset

Sasaran strategis Kasubbag Keuangan dan Aset dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Tersusunnya pelaporan administrasi keuangan yang kredibel	Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100 %	100%	100%

2	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase capaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100 %	100%	100%
3	Tercapainya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1069 org/bln	100%	100%
4	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	3 Dok	100%	100%
5	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	6 Lap	100%	100%

Dari tabel di atas kinerja Kasubbag keuangan dan aset pada tahun 2024 tercapai 100% dari target yang di tetapkan:

a). Program dan Kegiatan

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD

b). Permasalahan

1. Dalam sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan 1000 lebih ASN yang digaji, masih ditemukan adanya kelebihan dan kekurangan pembayaran gaji ASN, yang diantaranya disebabkan terlambatnya ASN yang bersangkutan mengajukan keputusan tunjangan anak, terlambatnya ASN yang bersangkutan menyerahkan SK tugas belajar kepada Dinas Kesehatan, atau keterlambatan keluarnya SK Pensiun ASN dalam sub kegiatan penatausahan BMD pada SKPD, Dinas Kesehatan memiliki aset dengan jumlah besar dan tersebar di 26 UPT

sehingga diperlukan penatausahaan aset yang terintegrasi sehingga tercapai tertib administrasi dan pengelolaan aset yang baik. Dalam kegiatan inventarisasi barang didapatkan kesulitan dalam mengidentifikasi BMD sesuai spesifikasi pencatatannya, apalagi untuk BMD yang di adakan beberapa tahun atau belasan tahun yang lalu.

2. Dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD, dengan 26 UPT didalamnya yang mempunyai 3 Sumber dana yaitu dana APBD, BOK dan BLUD, rentan terjadi kesalahan dalam transaksi dan pencatatan pendapatan serta belanjanya. Jumlah pagu anggaran yang besar dibandingkan jumlah realisasi yang kecil pada awal tahun karena kegiatan kosntruksi atau pengadaan biasanya mulai dilakukan di pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun, menyebabkan rendahnya realisasi pada triwulan satu dan dua sehingga tidak mencapai target realisasi yang ditetapkan.

c). Solusi

1. Untuk meminimalisir kekurangan dan kelebihan pembayaran gaji ASN, akan di buat Surat UntukEdaran untuk secepatnya dapat melaporkan pemutusan tunjangan anak apabila umurnya sudah melebihi ketentuan dan menyampaikan surat keterangan kuliah apabila memang masih berstatus mahasiswa.
2. Untuk memudahkan dalam inventarisasi BMD , dilakukan pencatatan yang lebih tertib pada setiap pengadaan BMD yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan seluruh UPT nya
3. Untuk meminimalisir kesalahan dalam transaksi dan pencatatan, Sub keuangan dan aset melakukan bimtek ke seluruh UPT agar berhati hati dalam melakukan transaksi dan pencatatan keuangan. Membuat surat edaran untuk mempercepat realisasi kegiatan tanpa harus menunggu akhir tahun anggaran.

d). Rencana Aksi Tahun 2025

Membuat surat edaran untuk tertib pembayaran gaji, melakukan bimtek dan pertemuan untuk para bendahara UPT agar didapatkan laporan keuangan yang akuntabel dan minim kekeliruan.

Foto- Foto Kegiatan



### III. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

Sasaran strategis Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dengan pencapaian kinerja seperti pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, dan penelaahan objek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	100 %	100%	100%
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100%
3	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%

Dari tabel di atas kinerja Kasubbag Perencanaan dan pelaporan pada tahun 2024 tercapai 100% dari target yang di tetapkan:

a) Program dan Kegiatan

program kegiatan yang mendukung Indikator diatas yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan

- Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Permasalahan

Terbatasnya waktu yang di berikan saat menyusun renja perubahan sehingga harus bisa menyesuaikan dengan waktu yang diberikan.

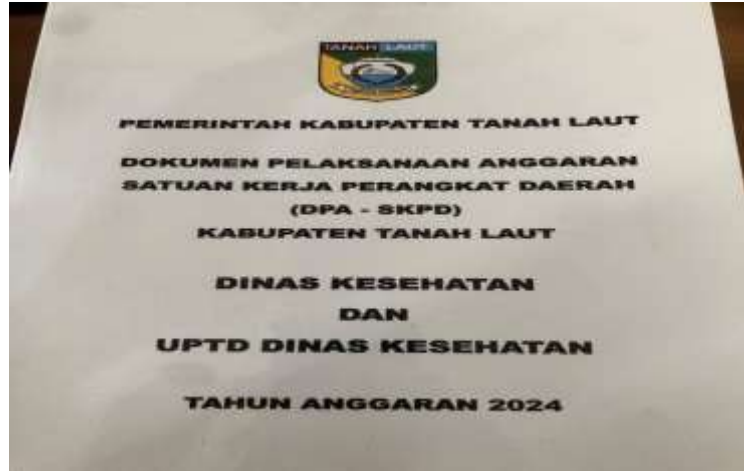
c) Solusi

Sebelum waktu menyusun renja perubahan terlebih dahulu menyiapkan hal-hal yang prioritas untuk dimasukkan di renja perubahan.

d) Rencana Aksi Tahun 2025

dengan Melakukan Evaluasi kinerja per triwulan.

Foto- Foto Kegiatan



**B. Akuntabilitas Keuangan**

**1. Anggaran Realisasi Tahun 2023**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		
			KEUANGAN (Rp)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6= (4/3)
<b>DINKES</b>		<b>249,961,585,112</b>	<b>218,153,016,384</b>	<b>31,808,568,728</b>	<b>87</b>

<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>		<b>124,572,387,092</b>	<b>107,537,386,428</b>	<b>17,035,000,664</b>	<b>86</b>
	<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>69,938,387</b>	<b>34,101,230</b>	<b>35,837,157</b>	<b>49</b>
		Sub Kegiatan :				
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69,938,387	34,101,230	35,837,157	49
	<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>121,382,528,563</b>	<b>105,096,423,209</b>	<b>16,286,105,354</b>	<b>87</b>
		Sub Kegiatan :				
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	121,312,528,834	105,040,448,709	16,272,080,125	87
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69,999,729	55,974,500	14,025,229	80
	<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>13,999,150</b>	<b>13,960,000</b>	<b>39,150</b>	<b>100 %</b>
		Sub Kegiatan :				
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13,999,150	13,960,000	39,150	100
	<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>674,505,973</b>	<b>628,016,860</b>	<b>46,489,113</b>	<b>93</b>
		Sub Kegiatan :				
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,864,624	47,873,500	16,991,124	74
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42,990,723	35,626,071	7,364,652	83
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81,048,788	73,511,616	7,537,172	91
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,664,000	2,400,000	264,000	90
	5	Penyediaan Bahan/Material	20,000,000	19,998,000	2,000	100
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462,937,838	448,607,673	14,330,165	97
	<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5,994,000</b>	<b>4,872,000</b>	<b>1,122,000</b>	<b>81</b>
		Sub Kegiatan :				
	18	Pengadaan Mebel	5,994,000	4,872,000	1,122,000	81

<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,190,656,019</b>	<b>1,528,174,179</b>	<b>662,481,840</b>	<b>70</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	401,444,415	212,739,959	188,704,456	53
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,789,211,604	1,315,434,220	473,777,384	74
<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>234,765,000</b>	<b>231,838,950</b>	<b>2,926,050</b>	<b>99</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210,900,000	210,844,950	55,050	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,865,000	20,994,000	2,871,000	88
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>111,796,599,237</b>	<b>100,984,232,706</b>	<b>10,812,366,531</b>	<b>90</b>
<b>I</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>46,871,515,582</b>	<b>38,708,464,520</b>	<b>8,163,051,062</b>	<b>83%</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>				
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	436,438,882	389,811,680	46,627,202	89.32
2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,914,537,951	3,469,664,959	444,872,992	88.64
3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	431,763,915	422,000,000	9,763,915	97.74
4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,945,680,102	3,372,740,351	1,572,939,751	68.20
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	32,703,517,265	27,030,467,044	5,673,050,221	82.65
6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	395,740,000	197,576,250	198,163,750	49.93
7	Pengadaan Obat, Vaksin	1,699,140,196	1,656,258,550	42,881,646	97
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2,344,697,271	2,169,945,686	174,751,585	93

	<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>8,742,440</b>	<b>5,875,000</b>	<b>2,867,440</b>	<b>67</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8,742,440	5,875,000	2,867,440	67
	<b>III</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>424,952,232</b>	<b>195,663,750</b>	<b>229,288,482</b>	<b>46</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	352,735,032	169,395,000	183,340,032	48
	2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	72,217,200	26,268,750	45,948,450	36
	<b>IV</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>64,491,388,983</b>	<b>62,074,229,436</b>	<b>2,417,159,547</b>	<b>96</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	344,808,975	302,750,200	42,058,775	88
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22,418,950	22,402,750	16,200	100
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	47,970,000	47,970,000	-	100
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	365,372,850	326,036,250	39,336,600	89
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	55,760,000	42,310,000	13,450,000	76
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29,805,506	29,805,506	-	100
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	29,997,570	29,190,080	807,490	97%
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	58,414,810	54,034,108	4,380,702	93
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	393,873,452	336,219,661	57,653,791	85
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	20,633,939	20,289,400	344,539	98
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	552,261,923	49,527,250	502,734,673	9

12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21,984,670	20,421,000	1,563,670	93
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	91,215,280	55,120,000	36,095,280	60
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	49,551,240	2,420,000	47,131,240	5
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,895,502,096	2,249,642,116	645,859,980	78
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	62,335,500	35,037,880	27,297,620	56
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	312,096,000	228,232,534	83,863,466	73
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	168,105,280	137,586,080	30,519,200	82
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	71,943,192	52,270,000	19,673,192	73
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	280,255,571	185,828,700	94,426,871	66
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4,730,000	4,730,000	-	100
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	343,063,599	69,170,908	273,892,691	20
23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	313,701,770	266,346,000	47,355,770	85
24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	55,633,441,068	55,568,439,868	65,001,200	100
25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	117,780,000	106,843,000	10,937,000	91
26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,200,252,267	935,484,000	264,768,267	78
27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	518,042,000	474,436,400	43,605,600	92
28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	59,901,100	25,190,000	34,711,100	42

	29	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	30,901,100	30,463,050	438,050	99
	30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	259,380,000	250,905,000	8,475,000	97
	31	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	135,889,275	115,127,695	20,761,580	85
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>12,946,148,033</b>	<b>9,310,885,300</b>	<b>3,635,262,733</b>	<b>72</b>
	<b>I</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>11,935,350,062</b>	<b>8,527,158,400</b>	<b>3,408,191,662</b>	<b>71</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	11,640,310,062	8,244,918,400	3,395,391,662	71
	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	295,040,000	282,240,000	12,800,000	96
	<b>II</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,010,797,971</b>	<b>783,726,900</b>	<b>227,071,071</b>	<b>78</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,010,797,971	783,726,900	227,071,071	78
<b>IV</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>361,893,945</b>	<b>108,073,750</b>	<b>253,820,195</b>	<b>30</b>
	<b>I</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>116,913,300</b>	<b>54,213,500</b>	<b>62,699,800</b>	<b>46</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				

	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116,913,300	54,213,500	62,699,800	46
<b>II</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>		<b>84,109,434</b>	<b>12,786,250</b>	<b>71,323,184</b>	<b>15%</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	84,109,434	12,786,250	71,323,184	15
<b>III</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>		<b>10,100,000</b>	<b>10,100,000</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10,100,000	10,100,000	-	100
<b>IV</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>		<b>150,771,211</b>	<b>30,974,000</b>	<b>119,797,211</b>	<b>21</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	150,771,211	30,974,000	119,797,211	21
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>284,556,805</b>	<b>212,438,200</b>	<b>72,118,605</b>	<b>75</b>

	I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	92,222,565	45,930,440	46,292,125	50
		Sub Kegiatan :				
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	92,222,565	45,930,440	46,292,125	50
	II	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,999,240	44,897,760	101,480	100
		Sub Kegiatan :				
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	44,999,240	44,897,760	101,480	100
	III	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	147,335,000	121,610,000	25,725,000	83%
		Sub Kegiatan :				
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	147,335,000	121,610,000	25,725,000	83

## 2. Anggaran Realisasi Tahun 2024

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI KEUANGAN			
			KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6= (4/3)	
<b>DINKES</b>		<b>264,222,187,174</b>	<b>247,911,756,257</b>	<b>16,310,430,917</b>	<b>93.8</b>	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>135,142,041,691</b>	<b>129,809,641,441</b>	<b>5,332,400,250</b>	<b>96</b>	
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135,111,084	104,092,000	31,019,084	77
		Sub Kegiatan :				
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,992,254	77,717,000	22,275,254	78

	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,118,830	26,375,000	8,743,830	75
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>122,252,705,962</b>	<b>118,106,934,674</b>	<b>4,145,771,288</b>	<b>97</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122,202,807,989	118,066,141,662	4,136,666,327	97
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49,897,973	40,793,012	9,104,961	82
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>29,460,399</b>	<b>26,981,167</b>	<b>2,479,232</b>	<b>92</b>
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	29,460,399	26,981,167	2,479,232	92
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>150,000,000</b>	<b>146,750,000</b>	<b>3,250,000</b>	<b>98</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,000,000	146,750,000	3,250,000	98
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1,334,325,212</b>	<b>1,289,398,421</b>	<b>44,926,791</b>	<b>97</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47,357,001	42,498,676	4,858,325	90
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129,925,207	104,540,581	25,384,626	80
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59,969,116	58,825,080	1,144,036	98
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	84,975,853	72,735,948	12,239,905	86
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	2,400,000	600,000	80
	6	Penyediaan Bahan/Material	14,200,000	14,200,000	-	100
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	989,899,900	989,704,336	195,564	100
	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,998,135	4,493,800	504,335	90
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>888,998,942</b>	<b>762,245,000</b>	<b>126,753,942</b>	<b>86</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					

	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	495,224,613	411,900,000	83,324,613	83
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73,260,000	71,220,000	2,040,000	97
	3	Pengadaan Mebel	74,062,039	64,825,000	9,237,039	88
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246,452,290	214,300,000	32,152,290	87
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>9,910,420,572</b>	<b>8,974,830,835</b>	<b>935,589,737</b>	<b>91</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450,000,000	186,199,011	263,800,989	41
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,460,420,572	8,788,631,824	671,788,748	93
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>441,019,520</b>	<b>398,409,344</b>	<b>42,610,176</b>	<b>90</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257,000,000	236,540,344	20,459,656	92
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,695,000	11,185,000	17,510,000	39
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155,324,520	150,684,000	4,640,520	97
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>126,307,804,591</b>	<b>115,787,006,635</b>	<b>10,520,797,956</b>	<b>92</b>
<b>IX</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>50,163,351,605</b>	<b>44,965,288,207</b>	<b>5,198,063,398</b>	<b>90</b>
	<b>Sub Kegiatan :</b>					
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,650,491,942	2,274,415,886	376,076,056	85.8
	2	Pengembangan Puskesmas	10,822,900,750	10,061,000,000	761,900,750	92.9
	3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	11,488,030,461	9,358,226,799	2,129,803,662	81.5

	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,576,455,611	2,868,816,176	707,639,435	80.2
	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15,423,665,808	14,580,322,013	843,343,795	94.5
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	273,445,000	169,133,952	104,311,048	61.8
	7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	395,343,000	155,217,498	240,125,502	39.6
	8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5,494,276,034	5,471,975,383	22,300,651	100
	9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	38,743,000	26,180,500	12,562,500	68
	<b>X</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75,599,004,259</b>	<b>70,312,733,428</b>	<b>5,286,270,831</b>	<b>93</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,285,908,875	2,035,482,200	250,426,675	89
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,167,083,888	813,747,940	353,335,948	70
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	296,565,407	230,414,000	66,151,407	78
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,699,532,986	1,579,443,600	120,089,386	93
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	469,394,550	270,805,250	198,589,300	58
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	336,011,974	321,456,750	14,555,224	96
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	349,999,130	325,734,740	24,264,390	93
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	61,480,565	61,176,000	304,565	100
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	437,163,849	399,299,300	37,864,549	91

10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	152,570,425	53,199,500	99,370,925	35
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	831,330,006	773,932,048	57,397,958	93
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	99,010,154	82,571,000	16,439,154	83
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	162,960,000	160,594,000	2,366,000	99
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	79,980,376	-	79,980,376	0
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,936,933,738	2,542,075,900	394,857,838	87
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19,994,300	19,994,300	-	100
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,398,118,385	1,191,305,845	206,812,540	85
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	312,097,414	266,221,224	45,876,190	85
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	89,997,501	76,420,000	13,577,501	85
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	484,372,360	429,962,900	54,409,460	89
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	449,476,168	234,992,300	214,483,868	52
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,041,630,257	615,829,750	425,800,507	59
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57,258,856,200	55,137,717,900	2,121,138,300	96
24	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potens KLB ke Lab Rujukan/Nasional	58,124,000	11,701,000	46,423,000	20
25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	89,961,990	77,996,990	11,965,000	87

	26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,475,426,641	1,286,604,261	188,822,380	87
	27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	519,886,400	471,156,400	48,730,000	91
	28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	85,975,000	62,285,000	23,690,000	72
	29	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	249,995,000	160,308,000	89,687,000	64
	30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	274,980,000	257,881,250	17,098,750	94
	31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	153,695,750	135,515,000	18,180,750	88
	32	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	33,466,890	5,440,000	28,026,890	16
	33	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	60,083,272	49,743,480	10,339,792	83
	34	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	176,940,808	171,725,600	5,215,208	97
	<b>XI</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>316,230,000</b>	<b>311,435,000</b>	<b>4,795,000</b>	<b>98</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	316,230,000	311,435,000	4,795,000	98
	<b>XII</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>229,218,727</b>	<b>197,550,000</b>	<b>31,668,727</b>	<b>86</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	149,223,727	133,715,000	15,508,727	90
	2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	79,995,000	63,835,000	16,160,000	80
<b>III</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>1,529,238,904</b>	<b>1,301,132,068</b>	<b>228,106,836</b>	<b>85</b>
	<b>XIII</b>	<b>Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>15,251,890</b>	<b>9,012,500</b>	<b>6,239,390</b>	<b>59</b>

	1	Pengendalian Perizinan Praaktik Tenaga Kesehatan	15,251,890	9,012,500	6,239,390	59
	<b>XIV</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>556,870,567</b>	<b>366,094,000</b>	<b>190,776,567</b>	<b>66</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	374,400,000	259,200,000	115,200,000	69
	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	182,470,567	106,894,000	75,576,567	59
	<b>XV</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>957,116,447</b>	<b>926,025,568</b>	<b>31,090,879</b>	<b>97</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	957,116,447	926,025,568	31,090,879	97
<b>IV</b>		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>422,716,688</b>	<b>327,321,238</b>	<b>95,395,450</b>	<b>77</b>
	<b>XVI</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>14,875,000</b>	<b>12,676,250</b>	<b>2,198,750</b>	<b>85</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14,875,000	12,676,250	2,198,750	85
	<b>XVII</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>214,381,000</b>	<b>177,154,300</b>	<b>37,226,700</b>	<b>83</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>				

		1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	214,381,000	177,154,300	37,226,700	83
	<b>XVI</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>		<b>12,500,000</b>	<b>11,700,000</b>	<b>800,000</b>	<b>94</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>					
		1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12,500,000	11,700,000	800,000	94
	<b>XIX</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>		<b>180,960,688</b>	<b>125,790,688</b>	<b>55,170,000</b>	<b>70</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>					
		1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	180,960,688	125,790,688	55,170,000	70
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>820,385,300</b>	<b>686,654,875</b>	<b>133,730,425</b>	<b>84</b>
	<b>XX</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>139,441,500</b>	<b>130,382,700</b>	<b>9,058,800</b>	<b>94</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>					
		1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	139,441,500	130,382,700	9,058,800	94
	<b>XXI</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>586,073,800</b>	<b>477,692,175</b>	<b>108,381,625</b>	<b>82</b>

		<b>Sub Kegiatan :</b>					
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp 586,073,800	Rp 477,692,175	Rp 108,381,625	82	
	<b>XXII</b>	<b>Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota</b>	<b>Rp 94,870,000</b>	<b>Rp 78,580,000</b>	<b>Rp 16,290,000</b>	<b>83%</b>	
		<b>Sub Kegiatan :</b>					
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 94,870,000	Rp 78,580,000	Rp 16,290,000	83%	

### Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting, Angka Kesakitan	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting dan Angka Kesakitan	93,9%	93,8%	0,1 %

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan dinas kesehatan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dinas kesehatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan

Dinas Kesehatan Pada Tahun Anggaran 2024 dengan 26 UPT yang berada dilingkup Dinas Kesehatan yakni Dinas Kesehatan sebagai induk SKPD dengan 2 UPT (Instalasi Farmasi Kesehatan dan Instalasi Laboratorium Kesehatan) Kemudian 2 UPT RSUD (RSUD H. Boejasin dan KH. Mansyur) serta 22 UPT Puskesmas dengan Pagu Keseluruhan Rp. 459.181.138.752,47,- dengan Realisasi Rp. 420,833,206,771 atau dengan Persentase 91,65

Berdasarkan hasil pengukuran hasil kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2024, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator sasaran berkriteria sangat berhasil yaitu Angka Kematian Ibu, sedangkan 3 (tiga) indikator tidak berhasil yaitu Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup, Prevalensi Gizi Stunting, dan Angka Kesakitan.

Paling banyak penyebab kematian bayi adalah penyebab lainnya, ini menunjukkan kompleksnya bentuk komplikasi yang mungkin dialami anak selama periode bayi (0-11 bulan), salah satunya adalah kurang optimalnya dalam penanganan gizi sejak dalam kandungan, perlu penanganan yang lebih intensif untuk peningkatan gizi ibu hamil, sedangkan angka kesakitan belum tercapai dari target

karena masih ada masyarakat yang tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sedangkan prevalensi stunting tidak tercapai berdasarkan data SSGI.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Dari hasil capaian kinerja yang ada, maka strategi untuk peningkatan capaian kinerja kedepan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama bidang kesehatan.
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal.
3. Peningkatan promosi kesehatan dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan kesehatan, mengaktifkan Desa Siaga terutama menggairahkan kembali Posyandu sebagai Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang efektif menggerakkan program kesehatan di desa.

4. Diperlukan keberadaan dan aktivitas konkrit pelaku pembangunan kesehatan untuk lebih menggalakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan. Hal ini diperlukan sinergisme, kemitraan serta koordinasi di antara pelaku pembangunan kesehatan di berbagai tingkat administrasi di daerah yang meliputi Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Pelaihari, 25 Januari 2025

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes

NIP. 19740612 200501 2 016

# LAMPIRAN

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024

Kabupaten	: Tanah Laut
Nama SKPD	: Dinas Kesehatan
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;</li><li>b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;</li><li>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;</li><li>d. Pelaksanaan administrasi dinas;</li><li>e. Pembinaan UPT Dinas;</li><li>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li></ol>

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan Rumus	Pemangkujawab / Sumber Data
1	Menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi Stunting dan Angka Kerasihan	1. Angka kematian ibu	170	Jumlah kematian ibu melahirkan dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan 100000	Dinas Kesehatan
		2. Angka kematian bayi	8	Jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan 1000	
		3. Prevalensi stunting	14%	Jumlah balita stunting dibagi jumlah balita yang ditimbang dikalikan 100%	
		4. Angka Kerasihan	10%	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Kehidupan Kerasihan	

  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
dr. Hj. INNA FARIDA M.Kes  
NIP. 19740612 2008012016

# Pohon Kinerja

## POHON KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024



## Perjanjian Kinerja



### PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT **DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 21098

---

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Isna Farida, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Syamsir Rahman  
Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pj. Bupati.  
Kabupaten Tanah Laut,

**Syamsir Rahman**

Kepala Dinas Kesehatan.  
Kabupaten Tanah Laut.

**dr. Isna Farida, M.Kes**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	170
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	8
3	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	14 %
4	Menurunnya Angka Kesakitan	Angka Kesakitan	10 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	82

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Rp. 126.307.804.591</b>
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.163.351.605
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 75.599.004.259
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp. 316.230.000
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 229.218.727
2.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>Rp. Rp1.529.238.904</b>
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. Rp15.251.890
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. Rp556.870.567
		Pengembangan Mutu dan	Rp. Rp957.116.447

		Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
<b>3.</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>Rp.</b>	<b>Rp422.716.688</b>
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.	Rp14.875.000
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp.	Rp214.381.000
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp.	Rp12.500.000
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp.	Rp180.960.688
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>Rp.</b>	<b>Rp820.385.300</b>
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	Rp139.441.500
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	Rp586.073.800
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	Rp94.870.000
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Rp.</b>	<b>Rp135.142.041.691</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	Rp135.111.084
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	Rp122.252.705.962
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	Rp29.460.399
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	Rp150.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	Rp1.334.325.212

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. Rp888.998.942
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp9.910.420.572
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp441.019.520
	<b>Total</b>	<b>Rp. Rp264.222.187.174</b>

Pelaihari, 19 September 2024

Pj. Bupati.  
Kabupaten Tanah Laut.



**Syamsir Rahman**

Kepala Dinas Kesehatan.  
Kabupaten Tanah Laut.



**dr. Isna Farida, M.Kes**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 21098

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Arliani, SKM  
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

  
**dr. Hj. Isna Farida, M.Kes**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Sekretaris

  
**H.Arliani, SKM**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19700222 199303 1 006


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	1. Nilai Komponen Perencanaan	24
		2. Nilai Komponen Pengukuran	24
		3. Nilai Komponen Pelaporan	12
		4. Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
		5. Nilai Survey Pelayanan Kesekretariatan	90

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Rp. 135.142.041.691</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 135.111.084
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 122.252.705.962
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. Rp29.460.399
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 150.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.334.325.212
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 888.998.942
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.910.420.572


		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 441.019.520
		<b>Total</b>	<b>Rp. 135.142.041.691</b>

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

  
**dr. Hj. Isna Farida, M.Kes**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Pelatihari: 19 September 2024

Sekretaris

  
**H. Ariani, SKM**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19700222 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 21098

**PERJANJIAN PERUBAHAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fiteriyani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H.Arliani, SKM  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris Dinas Kesehatan

  
**H.Arliani, SKM**

Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19700222 199303 1 006

Kepala Sub Bagian  
Perencanaan Program dan Pelaporan

  
**Fiteriyani S.Sos**

Penata Tk.I / III d  
NIP. 197904062008012025

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Terlaksananya penerimaan, pengumpulan, dan penelaahan objek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Rp. 135.111.084
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp. 135.111.084
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 99.992.254
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 35.118.830
		<b>Total</b>	<b>Rp. 135.111.084</b>

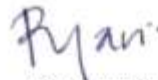
Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris Dinas Kesehatan



**H. Arliani, SKM**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19700222 199303 1 006

Kepala Sub Bagian  
Perencanaan Program dan Pelaporan



**Fiterivani, S.Sos**  
Penata Tk.I / III d  
NIP. 197904062008012025



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 21098

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Retna Afriyani, S.Gz, M.M  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H.Arliani, SKM  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris Dinas Kesehatan

**H.Arliani, SKM**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19700222 199303 1 006

Kepala Sub Bagian  
Keuangan dan Aset

**Retna Afriyani, S.Gz, M.M**  
Penata Tk.I / III d  
NIP. 19830521 200501 2 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Tersusunnya pelaporan administrasi keuangan yang kredibel	Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
2	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase capaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %
3	Tercapainya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1069 orang/bulan
4	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen
5	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Rp. 122.282.166.361</b>
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 122.252.705.962</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 122.202.807.989
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 49.897.973
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 29.460.399</b>
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 29.460.399
		<b>Total</b>	<b>Rp. 122.282.166.361</b>

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris Dinas Kesehatan



**H. Arliani, SKM**  
Pembina Tk. I / IV b

Kepala Sub Bagian  
Keuangan dan Aset



**Retna Afriyani, S.Gz. M.M**  
Penata Tk. I / III d



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 21098

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mierta Apriana, SKM, M.M  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H.Arliani, SKM  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris Dinas Kesehatan

**H.Arliani, SKM**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19700222 199303 1 006

Kepala Sub Bagian  
Umum dan Kepegawaian

**Mierta Apriana, SKM, M.M**  
Penata Tk.I / III d  
NIP. 19850430 201101 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	Persentase capaian administrasi kepegawaian	100 %
2	Memastikan Pelayanan administrasi umum bermanfaat	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	85 %
3	Memastikan barang milik daerah tersedia	Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
4	Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
5	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
6	Terlaksananya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang
7	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket
8	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
9	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
10	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
11	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
12	Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket
13	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

14	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen
15	Tersedianya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
16	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit
17	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Paket
18	Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
19	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
20	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
21	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit
22	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit
23	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Rp. 12,724,764,246
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp. 150.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 150.000.000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp. 1.334.325.212
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 47.357.001
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 129.925.207
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 59.969.116

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	84,975,853
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	3.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Rp.	14.200.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	989,899,900
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.	4.998.135
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>888.998.942</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	495.224.613
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	73.260.000
	Pengadaan Mebel	Rp.	74.062.039
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	246.452.290
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.910.420.572</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	450.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	9.460.420.572
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>441.019.520</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	257.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	28.895.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	155.324.520
	<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.724.764.246</b>

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris Dinas Kesehatan



**H. Arliani, SKM**  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 19700222 199303 1 006

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**Miarta Apriana, SKM, M.M**  
Penata Tk.I / III d  
NIP. 19850430 201101 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 21098

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Wahyudi, SKM, M.Kes  
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut,

dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Kepala Bidang Kesmas,

Indra Wahyudi, SKM, M.Kes  
Pembina / IV a  
NIP. 19840612 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Menurunnya Resiko tinggi Pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Resiko tinggi	20 %
2	Meningkatnya status gizi Masyarakat	Persentase Ibu hamil KEK	10 %
3	Meningkatnya status gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	7 %
4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu hamil	Persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar	100 %
5	Meningkatnya Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Melahirkan di Fasyankes dan ditolong Nakes	100 %
6	Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
7	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Remaja Putri	Persentase remaja yang minum Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	100 %
8	Meningkatnya kecukupan gizi Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100 %
9	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan anak di bawah usia 5 tahun	Persentase Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	100 %
10	Meningkatnya perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat	Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	60 %

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Rp. 11.202.531.471
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.202.531.471
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 2.285.908.875
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 1.167.083.888
		Pengelolaan Pelayanan	Rp. 296.565.407

	Kesehatan Bayi Baru Lahir		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp.	1.699.532.986
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp.	469.394.550
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp.	349.999.130
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp.	2.936.933.738
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp.	19.994.300
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp.	1.398.118.385
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp.	312.097.414
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp.	89.961.990
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>Rp. 820.385.300</b>
	<b>Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp.	<b>139.441.500</b>
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	139.441.500
	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp.	<b>586.073.800</b>
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp.	586.073.800
	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp.	<b>94.870.000</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp.	94.870.000
3	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		<b>Rp. 407.841.688</b>
	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Rp.	<b>214.381.000</b>
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	Rp.	214.381.000


	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Rp. 12.500.000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp. 12.500.000
	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	Rp. 180.960.688
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp. 180.960.688
	<b>Total</b>	<b>Rp. 12.430.758.459</b>

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut.

  
**dr. Hj. Isna Farida, M.Kes**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Kepala Bidang Kesmas

  
**Indra Wahyudi, SKM, M.Kes**  
Pembina / IV a  
NIP. 19840612 201001 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 21098

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Antonius Jaka RSH, SKM, M.Kes  
Jabatan : Kepala Bidang P2P

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Kepala Bidang P2P

Antonius Jaka RSH, SKM, M.Kes  
Pembina / IV a  
NIP. 19661206 199302 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi Hipertensi	10,37 %
2	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Pervalensi DM	1,59 %
3	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Succes Rate TB	90 %
4	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan tidak Menular	Persentase penderita Penyakit Menular dan Penyakit Menular yang terlayani sesuai standart	100 %

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Rp. 4.697.345.670
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.697.345.670
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 336.011.974
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 61.480.565
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 437.163.849
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 152.570.425
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 831.330.006
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 99.010.154
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp. 162.960.000
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp. 484.372.360
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp. 449.476.168
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp. 1.041.630.257

	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potens KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Rp.	58.124.000
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp.	85.975.000
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp.	249.995.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Rp.	153.695.750
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp.	33.466.890
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp.	60.083.272

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

  
**dr. Hj. Isna Farida, M.Kes**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Kepala Bidang P2P

  
**Antonius Jaka RSH, SKM, M.Kes**  
Pembina / IV a  
NIP. 19661206 199302 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 21098

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Ari Purnawan  
Jabatan : Kepala Bidang Yankes

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut,

dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Kepala Bidang Yankes,

dr. Ari Purnawan  
Pembina / IV a  
NIP. 19760913 200604 1 016

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	IKM Layanan kesehatan	90 %
2	Meningkatnya Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Puskesmas yang Terakreditasi Paripurna	68 %

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Rp. 60.244.575.845
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. 59.699.127.118
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp. 79.980.376
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp. 89.997.501
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp. 57.258.856.200
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 1.475.426.641
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp. 519.886.400
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp. 274.980.000
		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Rp. 316.230.000</b>
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp. 316.230.000
		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 229.218.727</b>
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp. 149.223.727
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp. 79.995.000

3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Rp.	14.875.000
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.	14.875.000
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp.	14.875.000
		<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>60.259.450.845</b>

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut.

dr. Hj. Isna Fajida, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Bidang Yankes.

dr. Ari Purnawan  
Pembina / IV a  
NIP. 19760913 200604 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.09 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 21098

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dasuki, S.AP  
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 01 Juli 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut.

dr. Hj. Isna Farida, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Dasuki, S.AP  
Pembina / IV a  
NIP. 19721211 199203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>A. KINERJA UTAMA</b>			
1	Meningkatnya Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Persentase SPA (sarana, prasarana dan alat kesehatan) sesuai standar	70 %

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Rp. 50.163.351.605
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.163.351.605
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 2.650.491.942
		Pengembangan Puskesmas	Rp. 10.822.900.750
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 11.488.030.461
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp. 3.576.455.611
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 15.423.665.807
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Rp. 273.445.000
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp. 395.343.000
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp. 5.494.276.034
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp. 38.743.000
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		Rp. 1.529.238.904
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 15.251.890
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp. 15.251.890
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 556.870.567
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp. 374.400.000
		Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 182.470.567

	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 957.116.447</b>
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 957.116.447
	<b>Total</b>	<b>Rp. 51.692.590.509</b>

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut.

**dr. Isna Farida. M.Kes**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19740612 200501 2 016

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.



**Dasuki. S.AP**  
Pembina / IV a  
NIP. 19721211 199203 1 003

## Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT BULAN MARET TAHUN 2024										
Bulan : MARET 2024										
No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			KOT
					FISIK/ KINERJA	%	RENYARAN	SESUAI ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6	7=(5/6)	Rp	8	9	10=(8/9)
<b>DINKES</b>				Rp 257.856.555.000		34%	Rp 48.879.283.828	Rp 209.276.269.187	82%	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMBERHYTAMAN BERGAM KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Neto aktif dinas kesehatan</b>	<b>83 Persen</b>	<b>Rp 127.961.998.369</b>		<b>52%</b>	<b>Rp 52.568.526.669</b>	<b>Rp 105.261.263.848</b>	<b>24%</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 120.121.084</b>		<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 120.121.084</b>	<b>0%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	<b>1</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>7</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 00.000.000</b>	<b>0%</b>	
	<b>2</b>	<b>Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 00.000.000</b>	<b>0%</b>	
<b>10</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan capaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 126.252.795.962</b>		<b>13%</b>	<b>Rp 36.875.848.854</b>	<b>Rp 99.277.456.108</b>	<b>24%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	<b>1</b>	<b>Penyusunan Capaian Tunggakan ASN</b>	<b>Jumlah Orang yang Menyetor Capaian Tunggakan ASN</b>	<b>12</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 00.000.000</b>	<b>0%</b>	
	<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan APBD</b>	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan APBD</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 00.000.000</b>	<b>0%</b>	
<b>100</b>	<b>Administrasi Barang HKM Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan capaian administrasi barang HKM daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Rp 29.468.369</b>			<b>Rp 130.000</b>	<b>Rp 29.218.369</b>	<b>1%</b>	
	<b>1</b>	<b>Penatausahaan Barang HKM Daerah Pada APBD</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang HKM Daerah pada APBD</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 100.000</b>	<b>Rp 29.218.369</b>	<b>1%</b>	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan capaian administrasi pengawasan perangkat daerah</b>	<b>90 Persen</b>	<b>Rp 156.000.000</b>		<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 156.000.000</b>	<b>0%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	<b>1</b>	<b>Penyusunan dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran</b>	<b>Jumlah Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran yang Hanggubur Penyaluran dan Pelaporan</b>	<b>20</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 100.000.000</b>	<b>0%</b>	
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan capaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>90 Persen</b>	<b>Rp 767.063.269</b>		<b>81%</b>	<b>Rp 152.243.848</b>	<b>Rp 613.756.166</b>	<b>20%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>									
	<b>1</b>	<b>Penyusunan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Kompleks (Sesuai LKPD/Perencanaan) Perangkat Daerah yang Disetujui</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 00.000.000</b>	<b>0%</b>	
	<b>2</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja</b>	<b>Jumlah Paket Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja yang Disetujui</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 11.000.000</b>	<b>Rp 48.263.262</b>	<b>20%</b>	
	<b>3</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Rincian Tangga</b>	<b>Jumlah Paket Perencanaan Rincian Tangga yang Disetujui</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 48.579.738</b>	<b>0%</b>	
	<b>4</b>	<b>Penyusunan Barang Cetak dan Pengiriman</b>	<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disetujui</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>Rp 0.000.000</b>	<b>Rp 00.000.000</b>	<b>0%</b>	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLH DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET
						FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%	
						6	7=(5/6)		Rp	8		
5	Persediaan Bahan Baku dan Peraturan Penunjang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Penunjang Undangan yang Disediakan	2	Paket	Rp 3.000.000	2	paket	100%	Rp 400.000	Rp 2.600.000	13%	
6	Persediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	kg	Rp 14.200.000	0	kg	0%	Rp -	Rp 14.200.000	0%	
7	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	kg	Rp 499.925.000	3	kg	25%	Rp 113.219.940	Rp 386.705.060	23%	
8	Penatausahaan Anop Dirans pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anop Dirans pada SKPD	200	duk	Rp 4.998.135	0	duk	0%	Rp -	Rp 4.998.135	0%	
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang MILK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian pengadaan barang milk daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	Rp 786.089.852			59%	Rp -	Rp 786.089.852	0%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	Rp 495.224.613	1	unit	100%	Rp -	Rp 495.224.613	0%	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	unit	Rp 73.260.000	3	unit	100%	Rp -	Rp 73.260.000	0%	
3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	unit	Rp 74.062.039	0	unit	0%	Rp -	Rp 74.062.039	0%	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	Rp 145.543.200	0	unit	0%	Rp -	Rp 145.543.200	0%	
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	Rp 10.418.428.572			63%	Rp 2.394.952.775	Rp 8.114.467.797	22%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	kg	Rp 950.000.000	3	kg	100%	Rp 19.661.175	Rp 930.338.825	2%	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	kg	Rp 9.460.428.572	3	kg	25%	Rp 2.376.291.600	Rp 7.184.136.972	24%	
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang MILK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian pemeliharaan barang milk daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	Rp 428.111.440			48%	Rp 35.241.000	Rp 393.870.440	8%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
1	Pemeliharaan Barang MILK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Dilayarkan (diayarkan) Regak dan Perawatannya	17	unit	Rp 257.000.000	17	unit	100%	Rp 33.441.000	Rp 223.559.000	13%	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	54	unit	Rp 28.895.000	11	unit	20%	Rp 1.800.000	Rp 26.895.000	6%	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Direhabilitasi	2	unit	Rp 143.416.440	0	unit	0%	Rp -	Rp 143.416.440	0%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			KET	
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		
												7=(5/6)
1	2	3	4	5	6	7=(5/6)	Rp	8	9	10=(8/5)	11	
II	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Penertasan capaian SPH bidang kesehatan	100	Persen	Rp 117.408.864.288			7%	Rp 15.815.862.150	Rp 101.772.992.135	14%	
		Penertasan Rumah Sakti yang terakreditasi	100	Persen								
		Penertasan FKTP yang terakreditasi (internal study)	100	Persen								
I	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UNP Kawasan/ Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penertasan pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	80	Persen	Rp 44.837.035.879			9%	Rp 5.508.000	Rp 44.837.035.879	0%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	5	Unit	Rp 2.600.491.942	0	Unit	0%	Rp -	Rp 2.600.491.942	0,00%
	2	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	3	Unit	Rp 10.003.015.194	0	Unit	0%	Rp -	Rp 10.003.015.194	0,00%
	3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	342	Unit	Rp 11.748.964.081	0	Unit	0%	Rp 2.500.000	Rp 11.747.464.081	0,02%
	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	21	Unit	Rp 4.102.500.149	0	Unit	0%	Rp -	Rp 4.102.500.149	0,00%
	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	227	Unit	Rp 10.838.586.479	0	Unit	0%	Rp 3.000.000	Rp 10.835.586.479	0,02%
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / Regional Maintenance Center	100	Unit	Rp 273.445.000	0	Unit	0%	Rp -	Rp 273.445.000	0,00%
	7	Pemeliharaan Rubin dan Bekas Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / Regional Maintenance Center	15	Unit	Rp 395.343.000	0	Unit	0%	Rp -	Rp 395.343.000	0,00%
	8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	2	Paket	Rp 4.990.443.034	0	Paket	0%	Rp 4.000.000	Rp 4.990.443.034	0%
	9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di bedakan	23	Paket	Rp 38.743.000	0	Paket	0%	Rp -	Rp 38.743.000	0%
II	<b>Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Penertasan akses point sistem informasi kesehatan yang digunakan	100	Persen	Rp 532.214.516			0,00%	Rp -	Rp 532.214.516	0%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Pengujian Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengujian Sistem Informasi Kesehatan	1	Dok	Rp 532.214.516	0	Dok	0%	Rp -	Rp 532.214.516	0%
III	<b>Pembelian Ijin Rumah Sakti Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penertasan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 27 Puskesmas dan 5 RSUD yang terakreditasi internal utama	80	Persen	Rp 239.218.727			9%	Rp -	Rp 239.218.727	9%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Pengujian Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	27	Pokokmen	Rp 145.223.727	0	Unit	0%	Rp -	Rp 145.223.727	0%
	2	Penyajian Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyajian Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Dok	Rp 79.995.000	0	Dok	0%	Rp -	Rp 79.995.000	0%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLN DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KST
						FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%	
						6	7=(5/4)		8	9		
IV	Pemrosesan Layanan Kesehatan untuk URM dan UNP Bujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemrosesan layanan pemrosesan layanan kesehatan untuk URM dan UNP tingkat tinggi daerah kabupaten/kota	100	orang	Rp 73.080.880.143			20%	Rp 15.206.363.130	Rp 36.174.523.013	22%	
Sub Kegiatan :												
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Salah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4801	orang	Rp 2.285.809.575	1197	orang	17%	Rp 101.770.000	Rp 2.182.138.875	5%	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Salah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4339	orang	Rp 1.204.721.782	1332	orang	20%	Rp -	Rp 1.204.721.782	0%	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Salah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4224	orang	Rp 526.350.181	1288	orang	21%	Rp -	Rp 526.350.181	0%	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Salah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30802	orang	Rp 1.886.532.886	8172	orang	20%	Rp -	Rp 1.886.532.886	0%	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Persebaran Dewasa	Salah Anak Usia Persebaran Dewasa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81000	anak	Rp 488.384.550	0	anak	0%	Rp 28.181.250	Rp 488.213.300	0%	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Salah Produkta Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	212701	orang	Rp 326.288.774	27949	orang	13%	Rp 176.724.200	Rp 159.532.774	53%	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Salah Produkta Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41801	orang	Rp 348.869.130	6030	orang	14%	Rp -	Rp 348.869.130	0%	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Salah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100776	orang	Rp 81.480.960	7864	orang	7%	Rp 55.851.000	Rp 5.627.560	91%	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Salah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4175	orang	Rp 436.215.980	2320	orang	51%	Rp 28.225.200	Rp 408.988.780	8%	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Salah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	498	orang	Rp 152.570.425	250	orang	50%	Rp 14.874.500	Rp 137.695.925	10%	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Salah Orang Terpapar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3634	orang	Rp 608.919.853	841	orang	15%	Rp 4.925.000	Rp 604.994.853	1%	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertular HIV	Salah Orang Terpapar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7326	orang	Rp 96.498.442	1487	orang	19%	Rp -	Rp 96.498.442	0%	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Salah Dikeman Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	ak	Rp 162.960.000	0	ak	0,00%	Rp -	Rp 162.960.000	0%	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Bencana Bencana	Salah Dikeman Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Bencana Bencana Sesuai Standar	11	ak	Rp 79.980.376	0	ak	0,00%	Rp -	Rp 79.980.376	0%	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Salah Dikeman Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	ak	Rp 217.287.500	0	ak	0%	Rp 19.894.200	Rp 217.287.500	9%	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Salah Dikeman Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	ak	Rp 12.994.200	1	ak	100%	Rp 7.515.000	Rp 12.479.200	38%	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Salah Dikeman Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	ak	Rp 1.388.118.580	0	ak	0%	Rp -	Rp 1.388.118.580	0%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET			
						FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%				
						6	7=(5/4)		8	9			10=(8/5)		
1	2	3	4	5	6	7=(5/4)	Rp	8	9	10=(8/5)	11				
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dukungan Hasil Pengabdian Pelayanan Promosi Kesehatan	1	dk	Rp	312.097.414	0	dk	0%	Rp	-	Rp	312.097.414	0%	
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dukungan Hasil Pengabdian Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Acupan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5	dk	Rp	89.997.501	0	dk	0%	Rp	-	Rp	89.997.501	0%	
20	Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah Dukungan Hasil Pengabdian Surveillance Kesehatan	3	dk	Rp	484.372.360	1	dk	33%	Rp	-	Rp	484.372.360	0%	
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jawa dan NAPZA	Jumlah Penyadigama NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	650	ring	Rp	448.476.168	0	ring	0%	Rp	58.468.000	Rp	58.468.000	15%	
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dukungan Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9	ring	Rp	1.041.830.257	2	ring	40,0%	Rp	22.345.000	Rp	1.019.285.257	2%	
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dukungan Hasil Pengabdian Jasa Kesehatan Masyarakat	12	dk	Rp	80.258.858.200	3	dk	25%	Rp	15.216.751.300	Rp	41.942.106.900	27%	
24	Pengambilan dan pengiriman spesimen Penyakit Potensi Zoonosis Lab. Regional/Provinsi	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Regional/Provinsi yang Diambil/dikirimkan	4	unit	Rp	58.124.000	4	unit	100%	Rp	-	Rp	58.124.000	0%	
25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dukungan Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2	dk	Rp	89.961.990	0	dk	0%	Rp	-	Rp	89.961.990	0%	
26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dukungan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18	dk	Rp	1.477.757.762	8	dk	0%	Rp	146.314.800	Rp	1.331.442.962	10%	
27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11	dk	Rp	519.886.400	2	dk	18%	Rp	-	Rp	519.886.400	0%	
28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktus Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktus Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	lap	Rp	85.375.000	0	lap	0%	Rp	-	Rp	85.375.000	0%	
29	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dukungan Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	1	dk	Rp	249.995.000	1	dk	100%	Rp	-	Rp	249.995.000	0%	
30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Terwujud, Terakreditasi dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	unit	Rp	274.980.000	0	unit	0%	Rp	-	Rp	274.980.000	0%	
31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	964	ring	Rp	145.093.250	157	ring	16%	Rp	11.420.000	Rp	133.673.250	8%	
32	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHR)	Jumlah Orang Terhingga Menuliskan HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7050	ring	Rp	33.466.800	9	ring	0%	Rp	-	Rp	33.466.800	0%	
33	Pengelolaan pelayanan kesehatan Maternal	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan maternal	80	ring	Rp	60.083.272	4	ring	5%	Rp	-	Rp	60.083.272	0%	
34	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dukungan hasil pengabdian upaya kesehatan ibu dan anak	1	dk	Rp	176.940.808	0	dk	0%	Rp	-	Rp	176.940.808	0%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	11		
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	86	Persen	Rp 1.478.838.904			81%	Rp 43.200.000	Rp 1.435.638.904	3%	
I	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100	Persen	Rp 15.251.890				Rp -	Rp 15.251.890		
	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	22	dok	Rp 15.251.890	0	dok		Rp -	Rp 15.251.890	
II	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	90	Persen	Rp 506.470.567			90%	Rp 43.200.000	Rp 463.270.567	9%	
	Sub Kegiatan :											
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15	orang	Rp 324.000.000	12	orang	80%	Rp 43.200.000	Rp 280.800.000	13%
	2	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	Rp 182.470.567	1	dok	100%	Rp -	Rp 182.470.567	0%
III	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase tenaga kesehatan yang berkompentensi	80	Persen	Rp 957.116.447			32%	Rp -	Rp 957.116.447	0%	
	Sub Kegiatan :											
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Mutu dan Kompetensinya	60	orang	Rp 957.116.447	19	orang	32%	Rp -	Rp 957.116.447	0%
IV	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase apotik, toko obat dan optikal yang memiliki izin	100	Persen	Rp 422.716.888			2%	Rp -	Rp 422.716.888	0%	
		Persentase TPP (Tempat pengolahan pangan) yang memenuhi syarat sesuai standar	62	Persen								
I	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	Persen	Rp 14.875.000			9%	Rp -	Rp 14.875.000	0%	
	Sub Kegiatan :											
		Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dilaksanakan dan Diawasi dalam rangka Pemenuhan dan Tumbuh Tumbuh Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44	sesuai	Rp 14.875.000	4	sesuai	9%	Rp -	Rp 14.875.000	0%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			KOT	
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%		
1	2	3	4		5	6	7=(6/4)	8	9	10=(8/5)	11	
II	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase jumlah industri pangan yang telah memiliki izin produksi oleh industri rumah tangga	100	Persen	Rp 214.381.000			0%	Rp -	Rp 214.381.000	0%	
	Sub Kegiatan :											
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	1	duk	Rp 214.381.000	0	duk	0%	Rp -	Rp 214.381.000	0%	
III	Penerbitan Sertifikat Laki Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase jumlah industri rumah tangga yang mempunyai sertifikat laki higien sanitasi TPM	100	Persen	Rp 12.500.000			0%	Rp -	Rp 12.500.000	0%	
	Sub Kegiatan :											
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laki Higien Sanitasi Tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	duk	Rp 12.500.000		duk	0%	Rp -	Rp 12.500.000	0%	
IV	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase jumlah IRT yang terdapat dan telah dilakukan pemeriksaan untuk persyaratan izin edar	100	Persen	Rp 180.960.688			0%	Rp -	Rp 180.960.688	0%	
	Sub Kegiatan :											
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sisaan Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	72	Unit	Rp 180.960.688	0	unit	0%	Rp -	Rp 180.960.688	0%	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat	65	Persen	Rp 304.241.300		17%	Rp 49.662.700	Rp 254.578.600	16%	
I	Advokasi, Pemberdayaan, Kerjasama, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat	65	Persen	Rp 139.441.500			0%	Rp 39.312.700	Rp 100.128.800	28%	
	Sub Kegiatan :											
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat	1	duk	Rp 139.441.500	0	duk	0%	Rp 39.312.700	Rp 100.128.800	28%	
II	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat	65	Persen	Rp 69.929.800			0%	Rp -	Rp 69.929.800	0%	
	Sub Kegiatan :											
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1	duk	Rp 69.929.800	0	duk	0%	Rp -	Rp 69.929.800	0%	
III	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase dokumen hasil pembinaan teknis dan supervisi UKBM	100	Persen	Rp 94.870.000			50%	Rp 10.350.000	Rp 84.520.000	11%	
	Sub Kegiatan :											
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	duk	Rp 94.870.000	1	duk	50%	Rp 10.350.000	Rp 84.520.000	11%	

**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
BULAN JUNI TAHUN 2024**

Bulan : JUNI 2024

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISKAL		REALISASI KEUANGAN			KET		
					FINIS/ KINERJA	%	KEUANGAN	MRP PAGO ANGGARAN	%			
1	2	3	4	5	6	7=6/4	Rp	8	9	10= 8/7	11	
<b>DOKER</b>				Rp 200.416.197.922		49%	Rp 112.289.209.287	Rp 148.139.989.888	49%			
<b>I</b>	<b>PROGRAM PEMURJANG UNITSAR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Nilai setiap dinas kebebasan</b>	<b>83 Persen</b>	Rp 137.961.900.000		89%	Rp 73.826.738.527	Rp 64.041.161.982	84%			
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan capaian perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	Rp 135.111.084		87%	Rp 42.088.000	Rp 83.023.084	81%			
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	Rp 91.992.234	4	Dok	87%	Rp 32.961.000	Rp 67.029.234	89%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	Rp 35.118.850	4	Lap	100%	Rp 9.126.000	Rp 25.992.850	88%
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan capaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	Rp 126.283.706.962		99%	Rp 68.307.179.487	Rp 56.948.830.478	99%			
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Indik	Rp 126.202.807.989	6	Indik	50%	Rp 68.287.241.737	Rp 36.905.966.252	53%
	2	Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BKPD	Jumlah Dokumen Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BKPD	3	Dok	Rp 49.897.813	3	Dok	100%	Rp 9.533.700	Rp 38.964.233	30%
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan capaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	Rp 29.466.599			Rp 12.038.730	Rp 17.427.869	41%			
	1	Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada BKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Barang Milik Daerah pada BKPD	6	Lap	Rp 29.466.599	6	Lap	100%	Rp 12.038.730	Rp 17.427.869	41%
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>80 Persen</b>	Rp 150.000.000		0%	Rp -	Rp 150.000.000	0%			
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Profilisasi dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pelatihan dan Pelatihan	25	Orang	Rp 150.000.000	0	orang	0%	Rp -	Rp 150.000.000	0%
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan capaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>95 Persen</b>	Rp 767.001.200		81%	Rp 488.663.308	Rp 268.837.885	55%			
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Pemangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kebutuhan Instalasi Listrik/Pemangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Lap	Rp 25.974.381	6	Lap	100%	Rp 26.875.176	Rp 4.009.805	90%
	2	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	3	Paket	Rp 79.947.392	3	paket	100%	Rp 31.164.300	Rp 48.783.092	39%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM RPA	TARGET KIBERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KBT				
						FISIK/ KIBERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%						
1	2	3	4		5	6	7=6/5	8	9	10= 8/9	11					
	3	Penyediaan Perabot Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabot Rumah Tangga yang Diantarkan	2	Paket	Rp	49.979.790	2	paket	100%	Rp	41.231.472	Rp	8.748.326	82%	
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diantarkan	2	duk	Rp	74.975.894	2	duk	100%	Rp	16.139.290	Rp	58.836.604	22%	
	5	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Diantarkan	2	Paket	Rp	3.000.000	2	paket	100%	Rp	1.200.000	Rp	1.800.000	40%	
	6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Diantarkan	3	lap	Rp	14.200.000	0	lap	0%	Rp	-	Rp	14.200.000	0%	
	7	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	12	lap	Rp	499.925.000	6	lap	50%	Rp	373.053.157	Rp	126.871.843	75%	
	8	Penyediaan Arsy Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyediaan Arsy Dinas pada SKPD	200	duk	Rp	4.998.135	200	duk	100%	Rp	-	Rp	4.998.135	0%	
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Barang NIBB Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Perentase capaian pengadaan barang milik daerah pemangjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	Rp	<b>788.089.852</b>			<b>100%</b>	Rp	<b>483.120.000</b>	Rp	<b>304.969.852</b>	<b>61%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Penyediaan Kebutuhan Perorangan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kebutuhan Perorangan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan yang Diantarkan	1	unit	Rp	495.224.613	1	unit	100%	Rp	411.900.000	Rp	83.324.613	83%	
	2	Penyediaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diantarkan	3	unit	Rp	73.260.000	3	unit	100%	Rp	71.220.000	Rp	2.040.000	97%	
	3	Penyediaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diantarkan	37	unit	Rp	74.062.039	37	unit	100%	Rp	-	Rp	74.062.039	0%	
	4	Penyediaan Sewa dan Pemroses Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sewa dan Pemroses Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diantarkan	2	unit	Rp	145.543.200	2	unit	100%	Rp	-	Rp	145.543.200	0%	
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Perentase capaian penyediaan jasa pemangjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	Rp	<b>10.410.420.572</b>			<b>90%</b>	Rp	<b>4.497.051.485</b>	Rp	<b>5.913.369.087</b>	<b>43%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diantarkan	12	lap	Rp	950.000.000	6	lap	50%	Rp	57.693.225	Rp	892.306.775	9%	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diantarkan	12	lap	Rp	9.460.420.572	6	lap	50%	Rp	4.439.358.460	Rp	5.021.062.112	47%	
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang NIBB Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Perentase capaian pemeliharaan barang milik daerah pemangjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	Rp	<b>429.311.440</b>			<b>79%</b>	Rp	<b>89.401.360</b>	Rp	<b>349.910.140</b>	<b>19%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Permis Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Diperbaiki Pajak dan Permisnya	17	unit	Rp	257.000.000	17	unit	100%	Rp	73.201.300	Rp	183.798.700	29%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISE			REALISASI KEUANGAN			KBT				
						FISE/ KINERJA		%	KEUANGAN		%					
						a	b		c	d						
1	2	3	4	5	6	7=a/b	8	9	10=c/d	11						
	2	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	34	unit	Rp	28.695.000	18	unit	33%	Rp	7.100.000	Rp	21.595.000	29%	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pemasaran Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Pemasaran Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	2	unit	Rp	143.416.440	2	unit	100%	Rp	-	Rp	143.416.440	0%	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAH UPAYA KESEHATAN PERORANGAS DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Pemeriksaan capaian SPM bidang kesehatan	100	Person	Rp	130.348.500.031			28%	Rp	38.083.607.030	Rp	82.165.893.491	32%		
		Pemeriksaan Rumah Sakti yang terakreditasi	100	Person												
		Pemeriksaan FKTP yang terakreditasi (minimal 1000)	100	Person												
<b>IX</b>	<b>Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UEM dan USP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan	80	Person	Rp	44.846.556.879			18%	Rp	3.157.747.016	Rp	38.688.768.863	12%		
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	5	Unit	Rp	2.530.491.942	0	Unit	0%	Rp	63.664.050	Rp	2.596.627.892	2,40%	
	2	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditugaskan sarana,prasarana,alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	2	Unit	Rp	10.003.015.194	0	Unit	0%	Rp	-	Rp	10.003.015.194	0,00%	
	3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	342	Unit	Rp	11.740.964.081	187	Unit	58%	Rp	1.018.114.320	Rp	10.731.849.760	8,66%	
	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana - Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Didukung Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	21	Unit	Rp	4.102.500.149	0	Unit	0%	Rp	-	Rp	4.102.500.149	0,00%	
	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	227	Unit	Rp	10.638.090.479	13	Unit	6%	Rp	1.913.186.200	Rp	8.725.404.229	17,98%	
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pelayanan fasilitas kesehatan regional / Regional Maintenance Center	100	Unit	Rp	273.445.000	0	unit	0%	Rp	-	Rp	273.445.000	0,00%	
	7	Pemeliharaan Rutin dan Berhala Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpenuhi Sesuai Standar	15	Unit	Rp	395.343.000	0	Unit	0%	Rp	-	Rp	395.343.000	0,00%	
	8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Mekanisme dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	2	Paket	Rp	4.994.443.034	2	paket	100%	Rp	2.162.782.391	Rp	2.831.660.643	43%	
	9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Mekanisme dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan	22	Paket	Rp	38.743.000	0	paket	0%	Rp	-	Rp	38.743.000	0%	
<b>X</b>	<b>Pengadaan Layanan Kesehatan untuk UEM dan USP Wilayah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pemeriksaan capaian pencapaian layanan kesehatan untuk UEM dan USP wilayah tingkat daerah Kabupaten/Kota	100	person	Rp	74.640.821.399			48%	Rp	32.861.367.824	Rp	41.779.163.885	44%		
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6851	wang	Rp	2.255.908.876	2185	wang	32%	Rp	440.065.000	Rp	1.836.823.876	30%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET	
						FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%		
						FISIK/ KINERJA	%		Rp	%			
1	2	3	4		5	6	7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/5)	11	
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6539	orang	Rp 1.204.721.782	2685	orang	41%	Rp 1.330.000	Rp 1.203.371.782	0%	
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6228	orang	Rp 526.350.181	2589	orang	42%	Rp 12.710.000	Rp 513.635.181	2%	
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30883	orang	Rp 1.699.532.986	12896	orang	42%	Rp -	Rp 1.699.532.986	0%	
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51000	Anak	Rp 469.394.550	5134	anak	10%	Rp 209.556.350	Rp 259.838.300	45%	
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222761	Orang	Rp 336.256.774	89172	orang	27%	Rp 355.123.750	Rp 81.133.024	70%	
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41831	Orang	Rp 349.999.130	10812	orang	26%	Rp -	Rp 349.999.130	0%	
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109779	Orang	Rp 61.480.565	14947	orang	14%	Rp 61.176.000	Rp 304.565	100%	
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4	4175	Orang	Rp 438.213.965	3381	orang	81%	Rp 41.803.200	Rp 396.410.765	10%	
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	498	Orang	Rp 152.570.425	356	orang	71%	Rp 16.074.500	Rp 136.495.925	11%	
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694	Orang	Rp 609.919.653	1600	orang	28%	Rp 97.603.798	Rp 512.315.855	10%	
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terindeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7926	Orang	Rp 99.499.442	3517	orang	44%	Rp -	Rp 99.499.442	0%	
	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	dok	Rp 162.960.000	1	dok	100,00%	Rp -	Rp 162.960.000	0%	
	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	11	dok	Rp 79.980.376	0	dok	0,00%	Rp -	Rp 79.980.376	0%	
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	dok	Rp 2.936.933.738	1	dok	25%	Rp 10.400.000	Rp 2.926.533.738	0%	
	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	dok	Rp 19.994.300	1	dok	100%	Rp 19.994.300	Rp -	100%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DFA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2021 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			NET	
						FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%		
						6	7=8/4		8	9			10=8/9
1	2	3	4	5			Rp.	Rp.		11			
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	duk	Rp. 1.394.118.365	1	duk	50%	Rp. 19.300.000	Rp. 1.392.818.365	1%	
	18	Pengelolaan Pelayanan Primosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Primosi Kesehatan	1	duk	Rp. 312.097.414	1	duk	100%	Rp. 102.675.000	Rp. 208.422.414	33%	
	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Anulus Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Anulus Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5	duk	Rp. 89.997.501	0	duk	0%	Rp. -	Rp. 89.997.501	0%	
	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	duk	Rp. 484.372.360	2	duk	67%	Rp. 119.697.900	Rp. 364.674.460	23%	
	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jera dan XAPZA	Jumlah Penyelenggara XAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	650	orang	Rp. 449.476.168	184	orang	28%	Rp. 111.368.800	Rp. 338.107.368	25%	
	22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6	orang	Rp. 1.041.630.287	3	orang	60,0%	Rp. 36.365.000	Rp. 1.005.265.287	9%	
	23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	duk	Rp. 56.258.808.200	6	duk	50%	Rp. 29.854.819.400	Rp. 26.404.038.800	53%	
	24	Pengujian dan pengiriman spesimen Penyakit Pada KLR ke Lab rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4	unit	Rp. 56.124.000	4	unit	100%	Rp. 511.000	Rp. 57.613.000	1%	
	25	Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat	2	duk	Rp. 89.961.990	0	duk	0%	Rp. -	Rp. 89.961.990	0%	
	26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18	duk	Rp. 1.477.737.762	13	duk	72%	Rp. 880.189.718	Rp. 597.548.044	60%	
	27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11	duk	Rp. 519.886.400	11	duk	100%	Rp. 466.746.400	Rp. 53.140.000	90%	
	28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Darurat Pasca Imunisasi dan Peristiwa Obat Maksimal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Darurat Pasca Imunisasi dan Peristiwa Obat Maksimal)	1	lap	Rp. 85.975.000	0	lap	0%	Rp. -	Rp. 85.975.000	0%	
	29	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	1	duk	Rp. 219.995.000	1	duk	100%	Rp. 32.037.500	Rp. 217.957.500	13%	
	30	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Pengawasan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Terwujud, Terbelah dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Pengawasan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	unit	Rp. 274.380.000	0	unit	0%	Rp. 9.340.000	Rp. 265.040.000	4%	
	31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	964	orang	Rp. 145.093.200	418	orang	43%	Rp. 13.420.000	Rp. 131.673.200	9%	
	32	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHS)	Jumlah Orang Terpapar Menoritas HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24	orang	Rp. 33.466.800	21	orang	88%	Rp. 2.190.000	Rp. 31.276.800	7%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KBT				
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGO ANGGARAN	%						
1	2	3	4		5	6	7=(6/4)	8	9	10=(8/5)	11					
	33	Perbaikan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		80	orang	Rp	40.083.272	5	orang	4%	Rp	4.268.000	Rp	53.828.272	7%
	34	Perbaikan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil perbaikan upaya kesehatan ibu dan anak		1	duk	Rp	176.940.808	1	duk	100%	Rp	36.000.000	Rp	140.940.808	30%
	<b>XI</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Desa Terintegrasi</b>	Persentase skala point sistem informasi kesehatan yang digunakan		100	Persen	Rp	<b>532.214.516</b>			0,00%	Rp	-	Rp	<b>532.214.516</b>	<b>0%</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Perbaikan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil perbaikan Sistem Informasi Kesehatan		1	duk	Rp	532.214.516	0	duk	0%	Rp	-	Rp	532.214.516	0%
	<b>XII</b>	<b>Peningkatan Iala Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota</b>	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 22 Puskesmas dan 3 RSUD yang terakreditasi minimal utama		80	Persen	Rp	<b>229.218.727</b>			<b>18%</b>	Rp	<b>63.492.900</b>	Rp	<b>165.726.227</b>	<b>28%</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas kesehatan yang dilakukakan pengukuran indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan		22	Pukerman	Rp	149.223.727	8	unit	36%	Rp	61.745.000	Rp	87.478.727	41%
	2	Penyiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rajukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyajian Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rajukan		1	duk	Rp	79.995.000	0	duk	0%	Rp	1.747.500	Rp	78.247.500	2%
<b>III</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>		Persentase Pukerman dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar		86	Persen	Rp	<b>1.478.828.904</b>			<b>68%</b>	Rp	<b>125.100.000</b>	Rp	<b>1.353.728.904</b>	<b>8%</b>
	<b>XIII</b>	<b>Pembinaan Iala Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pembinaan Iala Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		100	Persen	Rp	<b>15.251.890</b>				Rp	-	Rp	<b>15.251.890</b>	
	1	Pengembangan Perilaku Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Perilaku Praktik Tenaga Kesehatan		22	duk	Rp	15.251.890	0	duk		Rp	-	Rp	15.251.890	
	<b>XIV</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Kelembahan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan SDM kesehatan sesuai standar		90	Persen	Rp	<b>906.470.547</b>			<b>40%</b>	Rp	<b>108.000.000</b>	Rp	<b>798.470.547</b>	<b>21%</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Peningkatan Kelembahan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Meneraih Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pelayanan)		15	orang	Rp	324.000.000	12	orang	80%	Rp	108.000.000	Rp	216.000.000	33%
	2	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1	dukumen	Rp	182.470.567	0	duk	0%	Rp	-	Rp	182.470.567	0%
	<b>XV</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota</b>	Persentase tenaga kesehatan yang berkemampuan		80	Persen	Rp	<b>937.116.447</b>			<b>95%</b>	Rp	<b>17.100.000</b>	Rp	<b>940.016.447</b>	<b>2%</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Mutu dan Kompetensi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Dasar Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Mutu dan Kompetensi		60	orang	Rp	937.116.447	57	orang	95%	Rp	17.100.000	Rp	940.016.447	2%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2023 (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			KKT				
					FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%					
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10=(8/5)	11				
IV	PROGRAM BINAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINTAHAN	Perawatan apotik, toko obat dan optikal yang memiliki izin	100	Persen	Rp	422.716.688		7%	Rp	37.900.000	Rp	384.816.688	9%	
		Perawatan TPT (tempat pengolahan pangan) yang memiliki aparat sesuai standar	62	Persen										
XVI	Pembelian Iain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Perencanaan Pembelian Iain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	Persen	Rp	14.875.000		27%	Rp	-	Rp	14.875.000	0%	
		Sub Kegiatan :												
		Facilitas Penunahan Sertifikasi Iain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44	serwa	Rp	14.875.000	12	serwa	27%	Rp	-	Rp	14.875.000	0%
XVII	Pembelian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Iain Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Perencanaan jumlah industri pangan yang telah memiliki izin produksi oleh industri rumah tangga	100	Persen	Rp	214.381.000		0%	Rp	27.360.000	Rp	187.021.000	13%	
		Sub Kegiatan :												
		Perencanaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Iain Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	duk	Rp	214.381.000	0	duk	0%	Rp	27.360.000	Rp	187.021.000	13%
XVIII	Pembelian Sertifikat Lain Higien Sertifikat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) selain Iain Jasa Daga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Perencanaan jumlah industri rumah tangga yang mempunyai sertifikat lain higien sesuai TPM	100	Persen	Rp	2.900.000		0%	Rp	9.600.000	Rp	2.900.000	77%	
		Sub Kegiatan :												
		Perencanaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikasi Sertifikat Lain Higien Sertifikat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) selain Iain Jasa Daga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	duk	Rp	2.900.000	0	duk	0%	Rp	9.600.000	Rp	2.900.000	77%
XIX	Pembelian dan Tindak Lanjut Hasil Pembelian Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Perencanaan jumlah IRT yang terdapat dan telah melakukan pemertinan untuk sertifikasi Iain obat	100	Persen	Rp	180.960.688		0%	Rp	1.000.000	Rp	179.960.688	1%	
		Sub Kegiatan :												
		Pembelian Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	72	Unit	Rp	180.960.688	0	not	0%	Rp	1.000.000	Rp	179.960.688	1%
V	PROGRAM PEMBEDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Perencanaan masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat	60	Persen	Rp	304.241.000		80%	Rp	118.902.700	Rp	185.337.600	39%	
XX	Adaptasi, Pemberdayaan, Kesehatan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat	65	Persen	Rp	139.441.000		100%	Rp	65.537.700	Rp	73.903.300	49%	
		Sub Kegiatan :												
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Adaptasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	duk	Rp	139.441.000	1	duk	100%	Rp	65.537.700	Rp	73.903.300	49%
XXI	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat	65	Persen	Rp	69.829.800		0%	Rp	17.966.000	Rp	51.863.800	36%	
		Sub Kegiatan :												
		Peningkatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	duk	Rp	69.829.800	0	duk	0%	Rp	17.966.000	Rp	51.863.800	36%
XXII	Peningkatan dan pelaksanaan upaya kesehatan sumber daya masyarakat (UKDM) tingkat daerah	Perencanaan dokumen hasil bimbingan teknis dan operasional UKDM	100	Persen	Rp	94.870.000		90%	Rp	37.600.000	Rp	57.270.000	40%	
		Sub Kegiatan :												
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Peningkatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Sumber Daya Masyarakat (UKDM)	2	duk	Rp	94.870.000	1	duk	30%	Rp	37.600.000	Rp	57.270.000	40%

**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024**

Bulan : SEPTEMBER 2024

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DIM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			LST		
					FISIK/ KINERJA	%		KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%			
1	2	3	4	5	6	7=(8/4)	Rp	8	9	10=(9/5)	11		
<b>DIMKES</b>				Rp	364.222.187.174		57%	Rp	163.072.792.320	Rp	101.149.394.854	62%	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PERUBAHAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Nilai ekshp dinas kesehatan</b>	<b>83 Persen</b>	Rp	135.142.041.691		85%	Rp	97.300.967.873	Rp	37.841.053.818	73%	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	Rp	135.111.084		57%	Rp	58.942.000	Rp	76.169.084	44%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	Rp	99.992.254	4	Dok	57%	Rp	49.818.000	50%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	Rp	35.118.830	4	Lap	100%	Rp	35.993.830	96%
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	Rp	122.282.705.962		88%	Rp	88.951.327.948	Rp	33.301.368.014	73%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	Orang	Rp	122.202.807.989	9	Orang	70%	Rp	86.928.009.186	73%
	2	Pelembagaan Pemertahanan dan Pengujian/Verifikasi Keanggotaan SKPD	Jumlah Dokumen Pemertahanan dan Pengujian/Verifikasi Keanggotaan SKPD	3	Dok	Rp	49.807.973	2	Dok	100%	Rp	23.228.762	47%
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100 Persen</b>	Rp	29.460.399		100%	Rp	19.413.667	Rp	10.046.732		
	1	Pertertahanan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Pertertahanan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Lap	Rp	29.460.399	6	Lap	100%	Rp	19.413.667	66%
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>80 Persen</b>	Rp	180.000.000		88%	Rp	88.000.000	Rp	43.000.000	80%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang	Rp	180.000.000	22	Orang	88%	Rp	88.000.000	80%
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>85 Persen</b>	Rp	1.334.325.313		84%	Rp	701.842.248	Rp	632.482.964	53%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>												
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diwujudkan	5	Paket	Rp	47.357.001	4	Paket	100%	Rp	35.873.176	76%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diwujudkan	3	Paket	Rp	129.525.207	3	Paket	100%	Rp	66.919.300	52%
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diwujudkan	2	Paket	Rp	99.969.116	2	Paket	100%	Rp	41.311.472	41%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KET				
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%						
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10=(8/5)	11						
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Rp	84.975.853	2	Paket	100%	Rp	40.840.748	Rp	35.135.105	80%	
	5	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	Rp	3.000.000	2	Dokumen	100%	Rp	1.800.000	Rp	1.200.000	60%	
	6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket	Rp	14.200.000	0	Paket	0%	Rp	-	Rp	14.200.000	0%	
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	Rp	385.895.000	9	lap	75%	Rp	381.601.752	Rp	488.298.148	81%	
	8	Penastanaan Arap Diseminasi pada SKPD	Jumlah Dokumen Penastanaan Arap Diseminasi pada SKPD	200	duk	Rp	4.958.138	200	duk	100%	Rp	4.493.808	Rp	504.330	90%	
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Perentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Peran	Rp	<b>886.998.942</b>			<b>100%</b>	Rp	<b>857.948.000</b>	Rp	<b>321.083.942</b>	<b>63%</b>		
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Pengadaan Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	Rp	431.224.812	1	unit	100%	Rp	411.000.000	Rp	83.224.812	83%	
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	unit	Rp	73.260.000	3	unit	100%	Rp	71.200.000	Rp	2.060.000	97%	
	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27	unit	Rp	74.062.030	27	unit	100%	Rp	64.825.000	Rp	9.237.030	88%	
	4	Pengadaan Barana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Barana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	Rp	246.452.290	2	unit	100%	Rp	10.000.000	Rp	236.452.290	4%	
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Perentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Peran	Rp	<b>9.910.420.372</b>			<b>75%</b>	Rp	<b>6.728.582.666</b>	Rp	<b>3.181.837.906</b>	<b>68%</b>		
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Penyediaan Jasa Konsultasi, Bunker Dayn Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Bunker Dayn Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	Rp	450.000.000	9	lap	75%	Rp	115.980.348	Rp	334.019.652	30%	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	Rp	9.460.420.372	9	lap	75%	Rp	6.612.602.320	Rp	2.847.818.052	70%	
<b>VIII</b>	<b>Pembelajaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Perentase capaian pembelajaran barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Peran	Rp	<b>441.019.520</b>			<b>86%</b>	Rp	<b>194.923.344</b>	Rp	<b>246.096.176</b>	<b>44%</b>		
	<b>Sub Kegiatan :</b>															
	1	Penyediaan Jasa Pembelajaran, Biaya Pembelajaran, Pajal dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diperbaiki Pajal dan Perawatannya	17	unit	Rp	287.000.000	17	unit	100%	Rp	115.212.844	Rp	171.787.156	60%	
	2	Pembelajaran Perawatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Perawatan dan Meubel Lainnya yang Dipelihara	24	unit	Rp	28.800.000	21	unit	87%	Rp	8.730.000	Rp	19.965.000	30%	
	3	Pembelajaran/Rehabilitasi Barana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	Rp	125.219.520	2	unit	100%	Rp	70.980.500	Rp	54.239.020	46%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM IPA	TARGET KIBERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			KKT	
						FISIK/ KIBERJA	%	KEUANGAN	SISA PADU ANGGARAN	%		
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7=(6/4)	8	9	10= 8/3	11.	
II	PROGRAM PEMERIHAN UPAYA KESEHATAN PERUBAHAN DAR UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perawatan pasien SPM tingkat kesehatan	100	Person	Rp 126.307.804.091			41%	Rp 65.135.350.259	Rp 61.172.954.384	82%	
		Perawatan Rumah Saku yang terakreditasi	100	Person								
		Perawatan FKTP yang terakreditasi (asional/wadys)	97	Person								
IX	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UCM dan UKP Nonorganisasi Daerah Kabupaten/Kota	Perawatan pemohon penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	80	Person	Rp 88.163.381.808			44%	Rp 17.100.970.748	Rp 33.061.580.857	34%	
	Rek Registen :											
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	3	Unit	Rp 2.630.491.942	0	Unit	0%	Rp 220.416.237	Rp 2.409.075.715	8,32%
	2	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditugaskan sesuai peraturan, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	11	Unit	Rp 10.832.903.730	11	Unit	100%	Rp -	Rp 10.003.013.194	0,00%
	3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditugaskan sesuai, Perawatan, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	343	Unit	Rp 11.488.030.461	303	Unit	94%	Rp 4.099.308.235	Rp 7.388.632.225	35,68%
	4	Rehabilitasi dan Perbaikan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bersan , Perawatan dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Perbaikan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	21	Unit	Rp 3.376.455.611	0	Unit	0%	Rp 194.504.864	Rp 3.181.890.747	5,44%
	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didatangkan	227	Unit	Rp 15.423.665.808	227	Unit	88%	Rp 6.584.796.500	Rp 7.038.869.308	54,36%
	6	Pengadaan dan Perbaikan Alat Kulturasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / Regional Maintenance Center	100	Unit	Rp 273.443.000	0	unit	0%	Rp -	Rp 273.443.000	0,00%
	7	Perbaikan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	77	Unit	Rp 395.343.000	0	Unit	0%	Rp -	Rp 395.343.000	0,00%
	8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang didatangkan	2	Paket	Rp 3.404.270.034	2	paket	100%	Rp 4.138.172.431	Rp 1.296.103.613	31%
	9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	22	Paket	Rp 38.743.000	2	paket	14%	Rp 3.622.900	Rp 35.120.100	9%
X	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UCM dan UKP Registen Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perawatan pasien penyediaan layanan kesehatan untuk UCM dan UKP registen tingkat daerah kabupaten/kota	100	person	Rp 75.099.004.209			71%	Rp 47.886.287.011	Rp 37.713.717.048	63%	
	Rek Registen :											
	1	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6851	wrang	Rp 2.285.998.876	2504	wrang	43%	Rp 386.645.000	Rp 1.899.353.876	26%
	2	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6639	wrang	Rp 1.167.083.888	3527	wrang	54%	Rp 17.708.418	Rp 1.149.375.472	2%
	3	Pengadaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6328	wrang	Rp 206.363.407	3363	wrang	54%	Rp 111.284.000	Rp 185.281.407	38%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISKAL		REALISASI KEUANGAN			KET					
						FISKAL/ KINERJA	%	KEUANGAN	BISA PADU ANGGARAN	%						
												7=(6/4)	8	9	10= (8/9)	11
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (8/9)	11						
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30882	orang	Rp	1.699.532.986	17049	orang	99%	Rp	13.428.000	Rp	1.686.104.986	1%	
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51000	Anak	Rp	469.394.550	50572	anak	99%	Rp	243.805.250	Rp	225.589.300	62%	
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222761	Orang	Rp	336.011.974	91463	orang	41%	Rp	284.808.750	Rp	51.203.224	85%	
	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35178	Orang	Rp	349.999.130	17939	orang	51%	Rp		Rp	349.999.130	0%	
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109779	Orang	Rp	61.480.365	19776	orang	18%	Rp	61.176.000	Rp	304.365	100%	
	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4	4175	Orang	Rp	437.163.845	4320	orang	103%	Rp	62.433.200	Rp	374.730.645	14%	
	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	498	Orang	Rp	152.570.425	452	orang	91%	Rp	28.824.500	Rp	123.745.925	79%	
	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terpapar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694	Orang	Rp	831.330.000	2059	orang	36%	Rp	131.113.708	Rp	700.216.292	10%	
	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Status Terpapar HIV	Jumlah Orang Terpapar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7926	Orang	Rp	99.010.154	5384	orang	68%	Rp	16.550.000	Rp	82.460.154	17%	
	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dukumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	duk	Rp	162.940.000	1	duk	100,00%	Rp	111.404.000	Rp	51.536.000	68%	
	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok Terpapar Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dukumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok Terpapar Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	11	duk	Rp	79.980.376	4	duk	36,36%	Rp	-	Rp	79.980.376	0%	
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Mayabek	Jumlah Dukumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigitan Mayabek	4	duk	Rp	2.936.933.738	2	duk	50%	Rp	555.510.900	Rp	2.381.422.838	79%	
	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dukumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	duk	Rp	19.994.200	1	duk	100%	Rp	19.994.200	Rp	-	100%	
	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dukumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	duk	Rp	1.398.118.380	1	duk	50%	Rp	144.161.271	Rp	1.253.957.114	10%	
	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dukumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	duk	Rp	312.097.414	1	duk	100%	Rp	171.311.190	Rp	140.786.224	50%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM OPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			KBT
					FISIK/ KINERJA	%	Rp	Rp	%	10- (8/3)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (8/3)	11	
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Amalan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dukumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Amalan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 dek	Rp 81.997.501	5 dek	100%	Rp 71.820.000	Rp 18.277.501	87%		
20	Pengelolaan Sarafotika Kesehatan	Jumlah Dukumen Hasil Pengelolaan Sarafotika Kesehatan	3 dek	Rp 484.272.360	3 dek	100%	Rp 217.837.400	Rp 186.534.960	66%		
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwu dan NAPZA	Jumlah Penyelenggara NAPZA yang Mendukung Pelayanan Kesehatan	650 orang	Rp 448.476.188	210 orang	32%	Rp 148.870.300	Rp 300.605.888	33%		
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dukumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dukumen	Rp 1.041.630.227	4 Dukumen	80,0%	Rp 340.067.000	Rp 801.963.227	23%		
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dukumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dek	Rp 37.258.898.200	9 dek	75%	Rp 42.744.974.600	Rp 14.313.881.600	78%		
24	Pengendalian dan pengurangan operasi Proyek Patena KIB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Operasi Proyek Patena Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didokumentasikan	4 Paket	Rp 58.124.000	4 Paket	100%	Rp 4.015.000	Rp 54.109.000	7%		
25	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dukumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 dek	Rp 89.961.990	0 dek	0%	Rp -	Rp 89.961.990	0%		
26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dukumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18 dek	Rp 1.475.426.641	15 dek	83%	Rp 1.105.996.884	Rp 369.430.137	79%		
27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terserdiatkan di Kabupaten/Kota	11 unit	Rp 519.886.400	11 unit	100%	Rp 471.156.400	Rp 48.730.000	91%		
28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Berat Insidensi dan Pemberian Obat Maksimal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Berat Insidensi dan Pemberian Obat Maksimal)	1 lap	Rp 81.975.000	1 lap	100%	Rp 39.985.000	Rp 46.990.000	47%		
29	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Keperan Wabah	Jumlah Dukumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Keperan Wabah	1 dek	Rp 249.995.000	1 dek	100%	Rp 65.071.250	Rp 184.923.750	26%		
30	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sistem Pemantauan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Terseleksi, Terakreditasi dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dengan Satu Sistem Pemantauan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	Rp 274.980.000	1 unit	100%	Rp 31.230.000	Rp 243.750.000	11%		
31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis	Jumlah orang dengan Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	964 orang	Rp 133.695.750	760 orang	79%	Rp 28.730.000	Rp 121.945.750	17%		
32	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Terdaftar Menyandang HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 orang	Rp 31.468.850	20 orang	104%	Rp 3.940.100	Rp 29.326.850	12%		
33	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	80 orang	Rp 60.081.273	30 orang	13%	Rp 18.218.000	Rp 44.868.273	23%		
34	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dukumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dek	Rp 176.940.808	1 dek	100%	Rp 36.000.000	Rp 140.940.808	20%		

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			KBT
						FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA FAKSI ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6	7-8/9	8	9	10-11/11	11	
XI	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rerata Terintegrasi	Perantarai akses portal sistem informasi kesehatan yang digunakan	110	Person	Rp. 316.230.000			0,03%	Rp. -	Rp. 316.230.000	0%
	Sub Kegiatan :										
	1. Pengelahan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelahan Sistem Informasi Kesehatan	1	duk	Rp. 316.230.000	0	duk	0%	Rp.	Rp. 316.230.000	0%
XII	Penerbitan Iain Berekah Boleh Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perantarai fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 22 Puskesmas dan 3 RSUD yang terakreditasi minimal utama	80	Person	Rp. 225.218.727			80%	Rp. 147.992.500	Rp. 81.226.227	60%
	Sub Kegiatan :										
	1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengelahan Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22	unit	Rp. 149.201.727	22	unit	100%	Rp. 115.095.000	Rp. 34.106.727	77%
2. Penetapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	duk	Rp. 76.017.000	0	duk	0%	Rp. 32.907.500	Rp. 43.109.500	41%	
III	<b>PROGRAM PENGKAYAT KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNITAS</b>	Perantarai Pendidikan dengan 3 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	40	Person	Rp. 1.529.228.904			63%	Rp. 378.344.000	Rp. 1.150.884.904	39%
XIII	Penerbitan Iain Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Perantarai Penerbitan Iain Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100	Person	Rp. 15.251.890				Rp. -	Rp. 15.251.890	
	1. Pengendalian Perlatan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perlatan Praktek Tenaga Kesehatan	22	duk	Rp. 15.251.890	0	duk		Rp. -	Rp. 15.251.890	0%
XIV	Regulasi Perencanaan Kesehatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URP dan URM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perantarai penerbitan SKM kesehatan sesuai standar	90	Person	Rp. 556.870.567			52%	Rp. 151.200.300	Rp. 405.670.267	27%
	Sub Kegiatan :										
	1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Monevulasi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10	orang	Rp. 374.400.000	12	orang	62%	Rp. 131.200.000	Rp. 243.200.000	40%
2. Pemenuhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dukumen	Rp. 182.470.567	0	duk	0%	Rp. -	Rp. 182.470.567	0%	
XV	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perantarai tenaga kesehatan yang berkemampuan	80	Person	Rp. 937.116.447			86%	Rp. 227.148.500	Rp. 709.967.947	34%
	Sub Kegiatan :										
1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Mutu dan Keterampilan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Mutu dan Keterampilan	40	orang	Rp. 937.116.447	37	orang	93%	Rp. 227.148.000	Rp. 709.968.447	24%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TAHAP KEBERJA		ANGGARAN 2004 (Rp.)	SEALIRAN FISKAL		SEALIRAN KEUANGAN			LRT
						FISKAL/ KEBERJA	%	KEUANGAN	SIKA PAGO ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6	7=8/6	8	9	10=9/8	11	
IV	PROGRAM BEDIJAH FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Perawatan apotik, toko obat dan optikal yang memiliki lisensi	100	Peran	Rp 422.716.688		41%	Rp 74.622.488	Rp 348.094.200	18%	
		Perawatan TPT (Tempat pengolahan pangan) yang memiliki aparat sesuai standar	62	Peran							
XVI	Pembelian Iain Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro (UAT Tradisional) (UMOT)	Perawatan Pembelian Iain Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro (UAT Tradisional) (UMOT)	100	Peran	Rp 14.875.000		42%	Rp 10.437.000	Rp 4.437.000	30%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
		1 Fasilitas Perawatan Kesehatan Iain Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro (UAT Tradisional) (UMOT)	44	Dukungan	Rp 14.875.000	10	Dukungan	Rp 10.437.000	Rp 4.437.000	30%	
XVII	Pembelian Serbuk/Butir Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-107 sebagai Iain Produk, serbuk	Perawatan jumlah industri pangan yang telah memiliki lisensi produksi oleh industri rumah tangga	100	Peran	Rp 214.381.000		100%	Rp 47.049.300	Rp 167.331.700	28%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
		1 Pengolahan dan Pengemasan serta Tidak Lajut Pengemasan Serbuk/Butir Produk Pangan	1	Duk	Rp 214.381.000	1	Duk	Rp 47.049.300	Rp 167.331.700	28%	
XXII	Pembelian Serbuk/Butir Laktogen Susu Tempa Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jus Susu, Susu Murni/Susu dan Susu Air Murni (SAM)	Perawatan jumlah industri rumah tangga yang mempunyai sertifikat laktogen susu TPM	100	Peran	Rp 12.500.000		100%	Rp 11.700.000	Rp 800.000	94%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
		1 Pengolahan dan Pengemasan serta Tidak Lajut Pengemasan Serbuk/Butir Laktogen Susu Tempa Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jus Susu, Susu Murni/Susu dan Susu Air Murni (SAM)	1	Duk	Rp 12.500.000	1	Duk	Rp 11.700.000	Rp 800.000	94%	
XXI	Pembelian dan Tidak Lajut Hasil Persewaan Pori Market pada Produk dan Produk Makanan Makanan Industri Rumah Tangga	Perawatan jumlah IRT yang terdaftar dan telah dilakukan persewaan untuk perantara lisensi	100	Peran	Rp 180.560.688		0%	Rp 2.435.688	Rp 175.925.000	3%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
		1 Persewaan Pori Market pada Produk Makanan Makanan Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengemasan serta Tidak Lajut Pengemasan	72	Unit	Rp 180.560.688	0	unit	Rp 2.435.688	Rp 175.925.000	3%	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RUDANG KEBERKATAN	Perawatan masyarakat yang melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat	65	Peran	Rp 820.285.300		62%	Rp 123.582.700	Rp 696.702.600	22%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
XX	Advisasi, Pemberdayaan, Kesehatan, Peningkatan Pemas serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perawatan masyarakat yang melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat	68	Peran	Rp 120.441.800		100%	Rp 112.012.700	Rp 27.429.100	80%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
		1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Duk	Rp 120.441.800	1	Duk	Rp 112.012.700	Rp 27.429.100	80%	
XXI	Pemberdayaan Beluk dalam rangka Promosi Persewaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perawatan masyarakat yang melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat	65	Peran	Rp 586.073.800		100%	Rp 17.966.000	Rp 568.107.800	3%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
		1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Duk	Rp 586.073.800	1	Duk	Rp 17.966.000	Rp 568.107.800	3%	
XXII	Peningkatan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota	Perawatan dukungan keall berorganisasi tingkat dan operasional UKBM	100	Peran	Rp 94.870.000		90%	Rp 53.605.000	Rp 41.265.000	87%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
		1 Bantuan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	Duk	Rp 94.870.000	1	Duk	Rp 53.605.000	Rp 41.265.000	87%	

**CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
BULAN DESEMBER TAHUN 2024**

Bulan : DESEMBER 2024

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLH DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
						FISIK/ KINERJA	%	Rp	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7=(5/6)	8	9	10=(8/5)		
<b>SKNKS</b>					Rp 264.222.187.174		93,9%	Rp 247.911.799.287	Rp 16.310.486.917	83,9%	
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Nilai setiap dinas kesehatan	82	Person	Rp 135.142.041.881		89,92%	Rp 120.809.041.441	Rp 5.332.400.200	89%	
	<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Rp 135.111.884		100%	Rp 104.082.500	Rp 31.019.084	77%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
	1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dok	Rp 98.992.254	7	100%	Rp 77.711.000	Rp 22.275.254	78%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	Rp 35.118.830	4	100%	Rp 26.371.000	Rp 8.747.830	75%
	<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah		Rp 123.262.706.963		100%	Rp 118.106.834.834	Rp 4.145.771.388	97%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	Rp 132.202.907.080	12	100%	Rp 118.066.141.662	Rp 4.136.966.327	97%
	2	Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Dok	Rp 49.897.973	3	100%	Rp 40.765.412	Rp 9.134.561	82%
	<b>III</b>	<b>Administrasi Barang MIS Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian administrasi barang MIS daerah pada perangkat daerah		Rp 26.448.399		100%	Rp 26.281.187	Rp 2.479.232		
	1	Penatausahaan Barang MIS Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MIS Daerah pada SKPD	6	Lap	Rp 26.448.399	6	100%	Rp 26.281.187	Rp 2.479.232	97%
	<b>IV</b>	<b>Administrasi Suplai/penjualan Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian administrasi suplai/penjualan perangkat daerah		Rp 136.000.000		100%	Rp 148.790.000	Rp 3.290.000	97%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
	1	Penelitian dan Penelitian Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Penelitian dan Penelitian	25	Orang	Rp 136.000.000	25	100%	Rp 148.790.000	Rp 3.290.000	98%
	<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah		Rp 1.234.328.212		100%	Rp 1.288.398.421	Rp 44.526.791	97%	
		<b>Sub Kegiatan :</b>									
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dipelekan	6	Paket	Rp 47.007.201	6	100%	Rp 42.499.474	Rp 4.507.727	96%
	2	Penyediaan Perabot dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabot dan Peralengkapan Kantor yang Dipelekan	3	Paket	Rp 128.825.207	3	100%	Rp 134.043.581	Rp 25.264.624	80%
	3	Penyediaan Perabot Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabot Rumah Tangga yang Dipelekan	2	Paket	Rp 58.989.116	2	100%	Rp 56.615.060	Rp 1.944.036	96%
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Dipelekan	2	Paket	Rp 84.075.882	2	100%	Rp 71.731.540	Rp 12.226.905	80%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KEMERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN						
						FISIK/ KEMERJA	%	KEUANGAN	SESA PAGO ANGGARAN	%					
1	2	3	4	5	6	7=(5/4)	8	9	10=(8/7)						
	5	Persediaan Bahan Baku dan Perabot Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perabot Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	Rp	3.000.000	2	Dokumen	100%	Rp	2.400.000	Rp	600.000	80%
	6	Persediaan Bahan/Mebel	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Paket	Rp	14.200.000	3	Paket	100%	Rp	14.200.000	Rp	-	100%
	7	Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	Rp	980.998.900	12	lap	100%	Rp	980.704.334	Rp	195.564	100%
	8	Penelaahan Anggaran Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penelaahan Anggaran Dinas pada SKPD	200	duk	Rp	4.084.135	200	duk	100%	Rp	4.433.800	Rp	504.125	90%
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang HBB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	Rp	<b>888.998.943</b>			<b>100%</b>	Rp	<b>763.345.000</b>	Rp	<b>126.753.943</b>	<b>86%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	Rp	495.224.613	1	unit	100%	Rp	411.900.000	Rp	83.324.613	83%
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	unit	Rp	73.288.000	3	unit	100%	Rp	71.220.000	Rp	2.968.000	97%
	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	unit	Rp	74.062.000	37	unit	100%	Rp	64.825.000	Rp	9.237.000	88%
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	Rp	248.452.290	2	unit	100%	Rp	214.380.000	Rp	34.072.290	87%
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	Rp	<b>8.918.420.572</b>			<b>100%</b>	Rp	<b>8.974.836.835</b>	Rp	<b>935.986.737</b>	<b>93%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	Rp	450.000.000	12	lap	100%	Rp	386.199.011	Rp	263.800.989	41%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	Rp	8.468.420.572	12	lap	100%	Rp	8.708.627.824	Rp	671.786.748	93%
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang HBB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	Rp	<b>441.819.530</b>			<b>99%</b>	Rp	<b>398.489.344</b>	Rp	<b>42.610.176</b>	<b>90%</b>	
	<b>Sub Kegiatan :</b>														
	1	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	17	unit	Rp	257.000.000	17	unit	100%	Rp	238.940.344	Rp	20.499.656	93%
	2	Pemeliharaan Perabot dan Meubel Lainnya	Jumlah Perabot dan Meubel Lainnya yang Dipelihara	54	unit	Rp	28.895.000	53	unit	98%	Rp	11.165.000	Rp	17.510.000	30%
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2	unit	Rp	155.924.530	2	unit	100%	Rp	112.984.000	Rp	43.640.530	97%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLH DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			
						FISIK/ KINERJA	%	Rp	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%	
1	2	3	4		5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/5)		
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Perawatan pasien GPM tidak terbatas	100	Person	Rp 126.307.004.891		85%	Rp 116.707.006.635	Rp 10.330.797.956	92%		
		Perawatan kuratif, sakit yang terkontrol	100	Person			100%					
		Perawatan FKTP yang terkontrol (risiko rendah)	87	Person			100%					
<b>IX</b>	<b>Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UMR dan URP Kecamatan/Desa di Kabupaten/Kota</b>	Perawatan pemeliharaan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan	100	Person	Rp 88.168.391.605		91%	Rp 44.968.388.307	Rp 5.198.003.398	90%		
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	5	Unit	Rp 2.450.401.942	5	Unit	100%	Rp 2.274.415.088	Rp 376.076.956	91,81%
	2	Pengembangan Postemans	Jumlah Puskesmas yang dibangun sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDH agar sesuai standar	11	Unit	Rp 10.822.900.750	11	Unit	100%	Rp 10.061.000.000	Rp 761.900.750	92,96%
	3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangunkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDH agar Sesuai Standar	343	Unit	Rp 11.488.030.401	342	Unit	100%	Rp 8.258.326.799	Rp 2.129.803.602	91,46%
	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	21	Unit	Rp 3.570.488.011	21	Unit	100%	Rp 2.868.816.174	Rp 701.671.837	80,21%
	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disiapkan	257	Unit	Rp 15.423.888.800	251	Unit	98%	Rp 14.980.322.913	Rp 443.565.887	94,53%
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kallimat	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional Maintenance Center	100	Unit	Rp 273.448.000	100	Unit	100%	Rp 169.133.952	Rp 104.314.048	91,80%
	7	Pemeliharaan Ruah dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terelihara Sesuai Standar	77	Unit	Rp 393.343.000	56	Unit	21%	Rp 110.211.488	Rp 283.131.512	28,26%
	8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disiapkan	2	Paket	Rp 5.494.270.034	2	Paket	100%	Rp 5.471.375.383	Rp 22.894.651	100%
	9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	22	Paket	Rp 58.743.000	22	Paket	100%	Rp 26.180.500	Rp 32.562.500	68%
<b>X</b>	<b>Pemeliharaan Layanan Kesehatan untuk UMR dan URP Rajukan Tingkat Desa di Kabupaten/Kota</b>	Perawatan pasien pemeliharaan layanan kesehatan untuk UMR dan URP melalui tingkat desa kabupaten/kota	100	Person	Rp 79.399.004.269		89%	Rp 70.313.733.428	Rp 9.085.270.841	89%		
	<b>Sub Kegiatan :</b>											
	1	Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9821	orang	Rp 2.285.808.075	4373	orang	94%	Rp 2.035.482.200	Rp 250.325.875	99%
	2	Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4239	orang	Rp 1.187.083.000	6091	orang	77%	Rp 913.747.840	Rp 273.335.160	79%
	3	Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4226	orang	Rp 296.905.407	4982	orang	80%	Rp 230.414.000	Rp 66.491.407	78%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLH DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK		REALISASI KEUANGAN			
					FISIK/ KINERJA	%	KEUANGAN	SISA PADU ANGGARAN	%	
										6
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	Rp	8	9	10= (8/7)
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30802 orang	Rp 1.609.532.986	23020 orang	77%	Rp 1.379.443.600	Rp 120.089.386	93%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51000 Anak	Rp 468.394.550	30673 anak	99%	Rp 270.805.230	Rp 198.589.300	98%	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Produktif Usia (Produktif) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222161 orang	Rp 336.011.874	127944 orang	57%	Rp 321.494.730	Rp 14.505.224	96%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	Jumlah Produktif Usia Lansia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15176 orang	Rp 349.589.130	26296 orang	83%	Rp 325.794.740	Rp 24.254.370	93%	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109779 orang	Rp 81.480.505	24438 orang	22%	Rp 61.176.000	Rp 304.505	100%	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4175 orang	Rp 437.163.848	5114 orang	122%	Rp 309.298.300	Rp 37.864.548	91%	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jantung Berisi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jantung Berisi Sesuai Standar	446 orang	Rp 152.570.425	538 orang	104%	Rp 53.195.530	Rp 99.375.925	35%	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terpapar Tuberkulosis	Jumlah Orang Terpapar Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3094 orang	Rp 821.330.006	4290 orang	75%	Rp 773.932.040	Rp 57.397.996	93%	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terpapar HIV	Jumlah Orang Terpapar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7926 orang	Rp 98.010.154	8139 orang	103%	Rp 82.571.000	Rp 16.439.154	83%	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dikemas Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1	Rp 162.980.000	1	100,00%	Rp 160.394.000	Rp 2.586.000	99%	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok Terpapar Krisis Kesehatan Akibat Respon Biologis Kejadian Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dikemas Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan bagi Perokok Terpapar Krisis Kesehatan Akibat Respon Biologis Kejadian Bencana Sesuai Standar	11	Rp 79.885.276	4	36,36%	Rp -	Rp 79.885.276	0%	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Dikemas Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	4	Rp 2.036.933.738	4	100%	Rp 2.542.075.900	Rp 304.857.838	87%	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dikemas Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Rp 19.994.300	1	100%	Rp 19.994.300	Rp -	100%	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dikemas Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	Rp 1.388.118.585	2	100%	Rp 1.191.905.845	Rp 206.812.540	86%	
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dikemas Hasil Pengolahan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Rp 312.087.414	1	100%	Rp 288.221.234	Rp 45.876.180	92%	
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Akupresur, Arafur Mandi, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dikemas Hasil Pengolahan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Akupresur, Arafur Mandi dan Tradisional Lainnya	5	Rp 89.907.501	5	100%	Rp 76.400.000	Rp 13.577.501	85%	
20	Pengelolaan Buremi Kesehatan	Jumlah Dikemas Hasil Pengolahan Buremi Kesehatan	3	Rp 484.372.960	3	100%	Rp 429.962.900	Rp 54.409.460	89%	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		OUTPUT DLH GPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN				
							FISIK/ KINERJA		%	KEUANGAN		%		
							7=(6/4)	8		9	10= (8/7)			
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	Rp	8	9	10= (8/7)				
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jera dan NAPZA	Jumlah Penyelenggara NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	600	orang	Rp	448.476.100	413	orang	69%	Rp	254.932.300	Rp	214.483.800	52%
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dukungan Unit Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5	Dukungan	Rp	1.341.830.257	5	Dukungan	100%	Rp	615.829.733	Rp	425.800.507	59%
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dukungan Unit Pengabdian Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	dk	Rp	57.258.938.200	12	dk	100%	Rp	55.127.717.900	Rp	2.121.130.300	90%
24	Pengambilan dan pengiriman specimen Penyakit Puluha HLB ke Labi Rujukan/Nasional	Jumlah Sistem Penyakit Puluha Kajian Low Risk (KLH) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didokumentasikan	4	Paket	Rp	58.124.000	4	Paket	100%	Rp	11.791.000	Rp	46.433.000	20%
25	Penyertenggaran Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dukungan Unit Penyertenggaran Kabupaten/Kota Sehat	2	dk	Rp	88.061.000	2	dk	100%	Rp	77.986.900	Rp	11.305.000	87%
26	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dukungan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	18	dk	Rp	1.475.428.641	18	dk	100%	Rp	1.286.604.261	Rp	188.322.380	87%
27	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11	unit	Rp	519.688.400	11	unit	100%	Rp	471.156.400	Rp	48.730.000	91%
28	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan Pasca Imunisasi dan Peristiwa Obat Masak)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan Pasca Imunisasi dan Peristiwa Obat Masak)	1	lap	Rp	85.975.000	1	lap	100%	Rp	62.285.000	Rp	23.690.000	72%
29	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dukungan Unit Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	1	dk	Rp	249.995.000	1	dk	100%	Rp	160.308.000	Rp	89.687.000	64%
30	Pemediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Publik Safety Case (PSC) 171 Terwujud, Terbaharui dan Terintegrasi dengan Sistem Safety Data dan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	unit	Rp	274.983.000	1	unit	100%	Rp	237.001.230	Rp	17.086.750	94%
31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	904	orang	Rp	133.695.750	814	orang	89%	Rp	135.515.000	Rp	18.180.750	88%
32	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Terdaftar Masa Latensi (OT) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24	orang	Rp	33.468.800	25	orang	146%	Rp	5.440.000	Rp	28.028.800	18%
33	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	90	orang	Rp	90.083.272	20	orang	39%	Rp	40.743.400	Rp	15.333.792	37%
34	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dukungan awal pengabdian upaya kesehatan ibu dan anak	1	dk	Rp	176.940.800	1	dk	100%	Rp	171.725.600	Rp	5.215.200	97%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLH DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN			
						6	7=(5/4)	8	9	10=(8/5)		
1	2	3	4	5			%	KEUANGAN	SESUAI PAGU ANGGARAN	%		
XI	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Perentase akses pada sistem informasi kesehatan yang digunakan	100	Person	Rp. 316.230.000			100,00%	Rp. 311.428.000	Rp. 4.795.000	99%	
	Sub Kegiatan :											
	1	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	1	duk	Rp. 316.230.000	1	duk	100%	Rp. 311.428.000	Rp. 4.795.000	99%
XII	Pemberitaan dan Rumah SAKH Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk 22 kecamatan dan 3 RSUD yang terakreditasi minimal utama	90	Person	Rp. 229.218.727			100%	Rp. 197.550.000	Rp. 31.668.727	86%	
	Sub Kegiatan :											
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22	unit	Rp. 149.222.727	22	unit	100%	Rp. 133.713.000	Rp. 15.509.727	90%
	2	Pemilihan Pemukiman dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rutinan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rutinan	1	duk	Rp. 79.995.000	1	duk	100%	Rp. 63.835.000	Rp. 16.160.000	80%
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											
XIII	Pemberitaan dan Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Perentase Pembinaan dan Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100	Person	Rp. 15.291.890			77%	Rp. 9.012.500	Rp. 6.279.390	59%	
	1	Pengembangan Perilaku Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perilaku Praktek Tenaga Kesehatan	22	duk	Rp. 15.291.890	17	duk	77%	Rp. 9.012.500	Rp. 6.279.390	59%
XIV	Kegiatan Pemecahan Ketidapan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk GMP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	100	Person	Rp. 256.870.887			92%	Rp. 266.094.000	Rp. 198.776.887	60%	
	Sub Kegiatan :											
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19	orang	Rp. 274.402.000	15	orang	84%	Rp. 219.200.000	Rp. 115.700.000	68%
	2	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	dokumen	Rp. 182.478.987	1	duk	100%	Rp. 166.894.000	Rp. 75.576.887	59%
XV	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase tenaga kesehatan yang berkongres	100	Person	Rp. 987.116.447			100%	Rp. 926.925.508	Rp. 31.090.879	92%	
	Sub Kegiatan :											
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Mutu dan Kompetensinya	60	orang	Rp. 957.116.447	60	orang	100%	Rp. 916.925.508	Rp. 31.090.879	92%
IV	PROGRAM KEDUAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BARANG KESEHATAN											
	Perentase apotik, toko obat dan optikal yang memiliki izin											
	Perentase TVV (Tempat Pengambilan Pengas) yang memenuhi standar sesuai standar											
XVI	Pemberitaan dan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Perentase Pembinaan dan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	Person	Rp. 14.875.000			55%	Rp. 12.676.250	Rp. 2.198.750	65%	
	Sub Kegiatan :											
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengembangan serta Tidak Lajuin Pengembangan Perilaku Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik/Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	44	dukumen	Rp. 14.875.000	24	Dokumen	55%	Rp. 12.676.250	Rp. 2.198.750	65%

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2024 (Rp.)	REALISASI FISIK			REALISASI KEUANGAN		
						FISIK/ KINERJA	%	Rp	KEUANGAN	SISA PAGU ANGGARAN	%
1	2	3	4		5	6	7=(6/4)	8	9	10= (8/5)	
XVII	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Label Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Penerbitan jumlah industri pangan yang telah memiliki label produk oleh industri rumah tangga	100	Tahun	Rp 214.381.000		100%	Rp 177.154.300	Rp 37.226.700	83%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1	Pengembangan dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Label Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	ok	Rp 214.381.000	1	ok	100%	Rp 177.154.300	Rp 37.226.700	83%
XVIII	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Penerbitan jumlah industri rumah tangga yang mempunyai sertifikat laik hygiene sesuai TPM	100	Pada	Rp 12.500.000		100%	Rp 11.700.000	Rp 800.000	94%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1	Pengembangan dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	ok	Rp 12.500.000	1	ok	100%	Rp 11.700.000	Rp 800.000	94%
XIX	<b>Pemeriksaan dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	Pemeriksaan jumlah IRT yang terdapat dan telah dilakukan pemeriksaan untuk pemertanian label obat	100	Persis	Rp 180.560.688		85%	Rp 125.790.688	Rp 54.770.000	70%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Bersifat dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan	70	Ura	Rp 180.560.688	61	ura	85%	Rp 125.790.688	Rp 54.770.000	70%
<b>Y</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Pemerataan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan sehat	80	Persen	Rp 820.388.300		100%	Rp 686.654.875	Rp 133.733.425	84%	
XX	<b>Adaptasi, Pemberdayaan, Koordinasi, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase capaian Adaptasi, Pemberdayaan, Koordinasi, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	Rp 138.441.500		100%	Rp 130.383.700	Rp 8.057.800	94%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Koordinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	1	ok	Rp 138.441.500	1	ok	100%	Rp 130.383.700	Rp 8.057.800	94%
XXI	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase capaian Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	Rp 586.673.800		100%	Rp 477.492.175	Rp 109.181.625	82%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1	Pengembangan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	ok	Rp 586.673.800	1	ok	100%	Rp 477.492.175	Rp 109.181.625	82%
XXII	<b>Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota</b>	Persentase dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi UKBM	100	Persen	Rp 54.870.000		100%	Rp 79.580.000	Rp 16.290.000	83%	
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	ok	Rp 54.870.000	2	ok	100%	Rp 79.580.000	Rp 16.290.000	83%

## Monev Renstra

NO	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	
	Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	Angka	70	74.64
	Sasaran 1.1 : Menurunnya Angka Kematian Ibu, Menurunnya AKB, Menurunnya Prevalensi Stunting, Menurunnya Angka Kesakitan	1	Angka Kematian Ibu	Angka	170	118
		2	Angka Kematian Bayi	Angka	8	12.6
		3	Prevalensi Stunting	%	14	5.55
		4	Angka Kesakitan	Angka	10	
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	100	70.03
		2	Persentase Pelayanan Ibu Bersalin Melahirkan di Fasyankes dan ditolong Nakes	%	100	99.7
		3	Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	84.35
		4	Persentase remaja yang minum Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	%	100	99.41
		5	Persentase Ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	100	100
		6	Persentase Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	%	100	84.6
		7	Persentase penderita Penyakit Menular dan PTM yang terlayani sesuai standart	%	100	100
		8	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	%	98	100.01
		9	Persentase Puskesmas yang terakreditasi paripurna	%	68	91
		10	Persentase SPA sesuai standar	%	70	70.71

		11	Persentase Ibu hamil KEK	%	10	13.42
		12	Persentase Ibu Hamil Resiko tinggi	%	20	1.288
		13	Persentase Balita Gizi Wasting	%	7	5.08
		14	Prevalensi Hipertensi	%	10,37	6.91
		15	Prevalensi diabetes melitus	%	1,59	1.43
		16	Succes Rate TB	%	90	79.6
		17	IKM Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks	90	85.29
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan ANC Lengkap	Orang	6851	4.371
		2	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	orang	6851	4.712
		3	Jumlah Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali	orang	6851	3.018
		4	jumlah ibu nifas yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 4 kali	Orang	6851	4.991
		5	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan IMD	%	70	92.89
		6	Persentase Neonatal yang mendapatkan skrining penyakit jantung bawaan	%	20	35,54
		7	Jumlah bayi yang mendapatkan KN lengkap	Orang	5916	4990
		8	Persentase Neonatal yang mendapatkan skrining Hipotiroid Kongenital	%	55	30,02
		9	Jumlah remaja Putri yang mendapatkan tablet Fe	Orang	13000	9259
		10	Jumlah remaja putri yang mendapat skrining anemia	Orang	13000	2800
		11	Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	orang	345	684
		12	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	orang	234462	132958
		13	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	27962	25204

		14	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	4287	5208	
		15	Jumlah skrining penyakit menular	Orang	4679	3693	
		16	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	orang	364117	366800	
		17	Jumlah Puskesmas Yang melaksanakan yankestrad	Puskesmas	3	3	
		18	Persentase pelayanan kesehatan terdampak krisis kesehatan akibat bencana	%	100	100	
		19	Persentase Anak Usia Dibawah lima Tahun yang dipantau Perkembangannya	%	100	100	
		20	Jumlah penanganan sampah medis	kegiatan	1	1	
		21	Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	100	100	
		22	Persentase Usia Lanjut mendapat pelayanan sesuai standar	%	100	84,5	
		23	Persentase Pelayanan kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	%	100	100	
		24	Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	95	85,53	
		25	Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lanjutan baduta	%	95	74,32	
	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6851	4371
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	6539	5051
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	Orang	5916	4990
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	30045	25424
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Orang	51000	50673

6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	222761	127944
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	222761	29299
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	41831	24438
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4	Orang	4175	5114
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Orang	498	519
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5694	4290
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7926	8139
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi KLB sesuai standar	Dokumen	1	1
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	11	4
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	2
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	5	5

20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	3	3
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	650	419
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	5	5
23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12
24	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	2	2
25	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	18	18
26	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dokumen	11	11
27	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1
28	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1
29	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1
30	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	964	814
31	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	24	35
32	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	80	30

	33	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	4	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	4	4
	34	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1	<b>Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial</b>	%	<b>95</b>	<b>100</b>
			2	<b>Persentase Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan bersalin</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>
			3	<b>Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial</b>	%	<b>95</b>	<b>100</b>
			4	<b>Jumlah Pengembangan Puskesmas</b>	Unit	<b>2</b>	<b>2</b>
	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Unit	5	5
	2	Pengembangan Puskesmas	1	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	Unit	11	11
	3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	343	342
	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	21	21
	5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	257	251
	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / Regional Maintaince Center	Unit	100	100
	7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	77	16
	8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Paket	2	2

	9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan	Paket	22	22
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>		<b>1</b>	<b>Persentase RME di Fasilitas Kesehatan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1
<b>4</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>	<b>Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Puskesmas	22	22
	2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	1
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		<b>1</b>	<b>Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>%</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>5</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>	<b>Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1
<b>6</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>	<b>Persentase masyarakat yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1
<b>7</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1</b>	<b>Persentase dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi UKBM</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	1

III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		1	<b>Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</b>	%	<b>86</b>	<b>100</b>
8	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		1	<b>Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	19	16
	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1
9	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		1	<b>Persentase Nakes yang memiliki STR</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	22	17
10	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		1	Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti peningkatan berkompetensi	%	60	100
	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	60	60
IV	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		1	<b>Persentasi Tempat Pengolahan Pangan Yang memenuhi syarat sesuai standar</b>	%	<b>62</b>	<b>26</b>
			2	<b>Persentase apotik, toko obat, optikal yang memiliki izin</b>	%	<b>100</b>	<b>84,8</b>
11	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>		1	Persentase Apotik, toko obat dan Optikal yang memiliki izin	%	100	84,8
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut	Sarana	44	24
12	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>		1	<b>Jumlah Sertifikat PIRT</b>	<b>Sertifikat</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk produk makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1
<b>13</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>		<b>1</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	2	2
<b>14</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>		<b>1</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan Pos Market</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	72	61
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah</b>			<b>1</b>	<b>Nilai SAKIP Kabupaten</b>	<b>Nilai</b>	<b>70,01</b>	<b>70,16</b>
<b>Sasaran 2.1 : Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan</b>			<b>1</b>	<b>Nilai AKIP Dinas Kesehatan</b>	<b>Nilai</b>	<b>82</b>	<b>81,5</b>
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		1	Nilai hasil Evaluasi	Nilai	82	99,92
<b>15</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4
<b>16</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Presentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>97</b>
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1100	1035
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	3
<b>17</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2
	6	Penyediaan Bahan/Material	1	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	200	200
<b>18</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	53

	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	2	2
<b>19</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
<b>20</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	6
<b>21</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	25
<b>22</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3
	3	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	37	37
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2

## Matriks Keselarasan

TUJUAN			SASARAN STRATEGIS			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
Meningkatkan Derajat Kesehatan			Menurunnya Angka Kematian Ibu, Menurunnya AKB, Menurunnya Prevalensi Stunting, Menurunnya Angka Kesakitan			I. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
Sasaran	Indikator	Target 2024	Sasaran	Indikator	Target 2024	Sasaran	Indikator	Target 2024	Sasaran	Indikator	Target 2024	Indikator	Target	Pagu (Rp)		
Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup	70	Menurunnya Angka Kematian Ibu, Menurunnya AKB, Menurunnya Prevalensi Stunting, Menurunnya Angka Kesakitan	Angka Kematian Ibu	170	1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu hamil	Persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar	100%	1	Terlaksananya pelayanan Ibu Hamil yang mendapatkan ANC Lengkap	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan ANC Lengkap	6851 orang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6851 orang	2.285.908.875
				Angka Kematian Bayi	8		Menurunnya Resiko tinggi Pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Resiko tinggi	20%	2	Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	6851 orang			
				Prevalensi Stunting	10				3	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali	6851 orang				



					4	Meningkatnya pelayanan kesehatan pada remaja putri	Persentase remaja yang minum Tablet Tambah Darah (Tablet Fe)	100%	9	Terlaksananya pemberian tablet Fe pada Remaja putri	Jumlah remaja Putri yang mendapatkan tablet Fe	13000 Orang				
									10	Terlaksananya skrining anemia pada remaja putri	Jumlah remaja putri yang mendapat skrining anemia	13000 Orang				
													<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</b>			
					6	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan anak di bawah usia 5 tahun	Persentase Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	100%	12	Terlaksananya Pemantauan Tumbuh Kembang Balita	Persentase Anak Usia Dibawah lima Tahun yang dipantau Perkembangannya	100%	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30882 Orang	1.699.532.986	
													<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</b>			
						Meningkatnya status gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	7%	13	Terlaksananya Balita Gizi Kurang mendapat asupan gizi	Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100%				
													<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b>			
									14	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Usia Lanjut mendapat pelayanan sesuai standar	100%	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35178 Orang	349.999.130	

								<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>		
				15	Terlaksananya Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar	Persentase Pelayanan kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	100%	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51000 orang	469.394.550
								<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</b>		
				16	Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Jumlah penanganan sampah medis	1 Keg	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dok	1.398.118.385
								<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>		
	7	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Menular	Persentase penderita Penyakit Menular dan PTM yang terlayani sesuai standart	100%	Terlaksananya pelayanan Kesehatan penduduk Usia Produktif	persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222761 Orang	336.011.974



									<b>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>		
									Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5 Dok	0
									<b>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</b>		
						Terlaksana nya pelayanan imunisasi	Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dok	484.372.360
							Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lanjutan baduta	95%			
									<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</b>		
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dok	0

									<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>		
	Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Prevalensi Hipertensi	10,37%		Terlaksananya pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109779 Orang	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	109779 Orang	61.480.565	
								<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>			
		Prevalensi diabetes melitus	1,59%		Terlaksananya pelayanan Kesehatan pada penderita diabetes melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4175 orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4	4175 orang	437.163.849	
								<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>			
		Succes Rate TB	90%		Terlaksananya screening penyakit menular	Jumlah skrening penyakit menular	5694 Orang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5694 Orang	831,33,006	

								<b>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</b>		
	Meningkatnya jaminan kesehatan	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	98%		Tersedianya Jaminan Kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	364117 orang	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	364117 Org	57.258.856.200
				<b>2.Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaa</b>				<b>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</b>		
	Meningkatnya Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi paripurna	68%		Meningkatnya Mutu Fasilitas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu	100%	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22 Unit	149.223.727
								<b>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dok	79.995.000

				<b>3.Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>				<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>		
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	IKM Layanan kesehatan	90%		Meningkatnya RME di Fasilitas Kesehatan	Persentase RME di Fasilitas Kesehatan	100%	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	316.230.000
				<b>4.Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</b>		
	Meningkatnya Akreditasi Fasilitas Kesehatan	Persentase SPA sesuai standar	70%		Tersedianya Pemenuhan obat di Fasyankes	Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial	95%	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Pkt	-
								<b>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>		
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	257 Unit	-



						Tersedianya Layanan bersalin di fasilitas kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan bersalin	100%	<b>Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>		
									Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	344 Unit	-
									<b>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>		
									Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	21 Unit	-

								<b>Pengembangan Puskesmas</b>		
					Terlaksananya Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pengembangan Puskesmas	2 Unit	0%	11 unit	-
<b>II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>					<b>5.Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>			<b>Pengendalian Perizinan Praaktik Tenaga Kesehatan</b>		
1	Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas di Puskesmas	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	86%		Meningkatnya Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Nakes yang memiliki STR	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	22 Dok	-
					<b>6.Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>			<b>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</b>		
					Tersedianya SDM Kesehatan yang berkualitas di Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar	19 PKM	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 org	-

									<b>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>		
									Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	-
				<b>7.Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
					Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti peningkatan berkompentensi	60%	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Org	-	









